

YANDRI SUSANTO APRESIASI PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH UNTUK RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.11/TH.XVI/NOVEMBER 2022



Semua Delegasi Antusias Dukung PEMBENTUKAN **FORUM MPR DUNIA**



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
MPR RI Gagas Pendirian
Forum MPR Dunia

29 Nasional
Semoga Forum MPR Dunia
Menjadi Torehan Sejarah

39 Selingan
"Maafkanlah Kami"
Setelah Temukan Bukti Baru

60 Sosialisasi
Ajak Generasi Muda Gelorakan
Empat Pilar MPR RI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Daftar Isi

EDISI NO.11/TH.XV/NOVEMBER 2022



08 BERITA UTAMA

Pembentukan Forum MPR Dunia

Semua delegasi yang mengikuti Konferensi Internasional sangat antusias mendukung usulan MPR RI untuk pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau nama Lainnya yang sejenis dalam satu forum yang menjadi bagian dari Parliamentary Union of the OIC Member States (Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI).



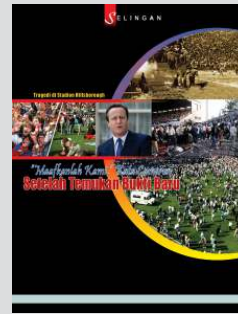
16 Nasional

UIN SMH Harus Menjadi Solusi yang Solutif Bagi Bangsa dan Negara



62 Sosialisasi

MPR Berupaya Membangun "Benteng Ideologi"



39 SELINGAN
"Maafkanlah Kami," Kata Cameron



80 Profil
Yandri Susanto

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	67
Wawancara	69
Figur	76
Ragam	78
Dari Rumah Kebangsaan	84
Rehal	86



COVER

Edisi No.11/TH.XVI/November 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,
Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,
Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,
Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Faridz Rizky,
Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayaty

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,
Achmad Farobi,
Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan
Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

“Deklarasi Bandung”

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyelenggarakan sebuah konferensi internasional di Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2022. Nama konferensi internasional tersebut adalah Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States). Konferensi internasional ini digelar dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia yang diinisiasi MPR RI.

Sebenarnya gagasan untuk membentuk Forum MPR Dunia ini sudah muncul sejak tahun 2019. Gagasan ini berkembang saat kunjungan Pimpinan MPR ke Arab Saudi dan Maroko pada Desember 2019. Pimpinan MPR menyampaikan gagasan itu ketika bertemu dengan Raja Salman bin Abdul Aziz, Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Dr. Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Riyadh; serta dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Kerajaan Maroko Hakim Benchamach di Rabat, pada bulan Desember 2019.

Gagasan tersebut mendapat dukungan yang sangat baik, namun upaya untuk merealisasikannya terkendala oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Barulah, pada saat pandemi Covid-19 reda, pada tahun 2022 inilah saat yang tepat memulai langkah merealisasikan gagasan tersebut. Itu sebabnya, MPR RI menggelar konferensi internasional dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia. Untuk pertama kali MPR RI menyelenggarakan event internasional yang melibatkan negara-negara lain.

MPR memilih kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional dengan alasan kota ini memiliki nilai historis atau sejarah. Di Kota Kembang ini, pada tahun 1955, diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Untuk mengingat kembali KAA tahun 1955, salah satu agenda pada pembukaan konferensi internasional ini adalah para delegasi melakukan *historical walk* berjalan kaki sekitar 100 meter dari Gedung Savoy menuju Gedung Merdeka. Konferensi internasional ini dibuka secara

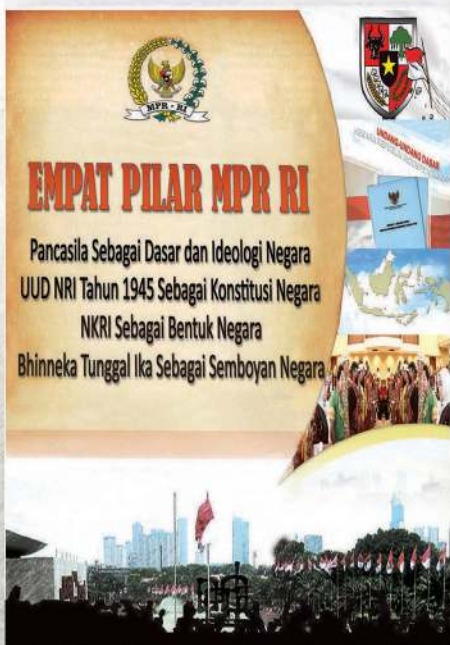
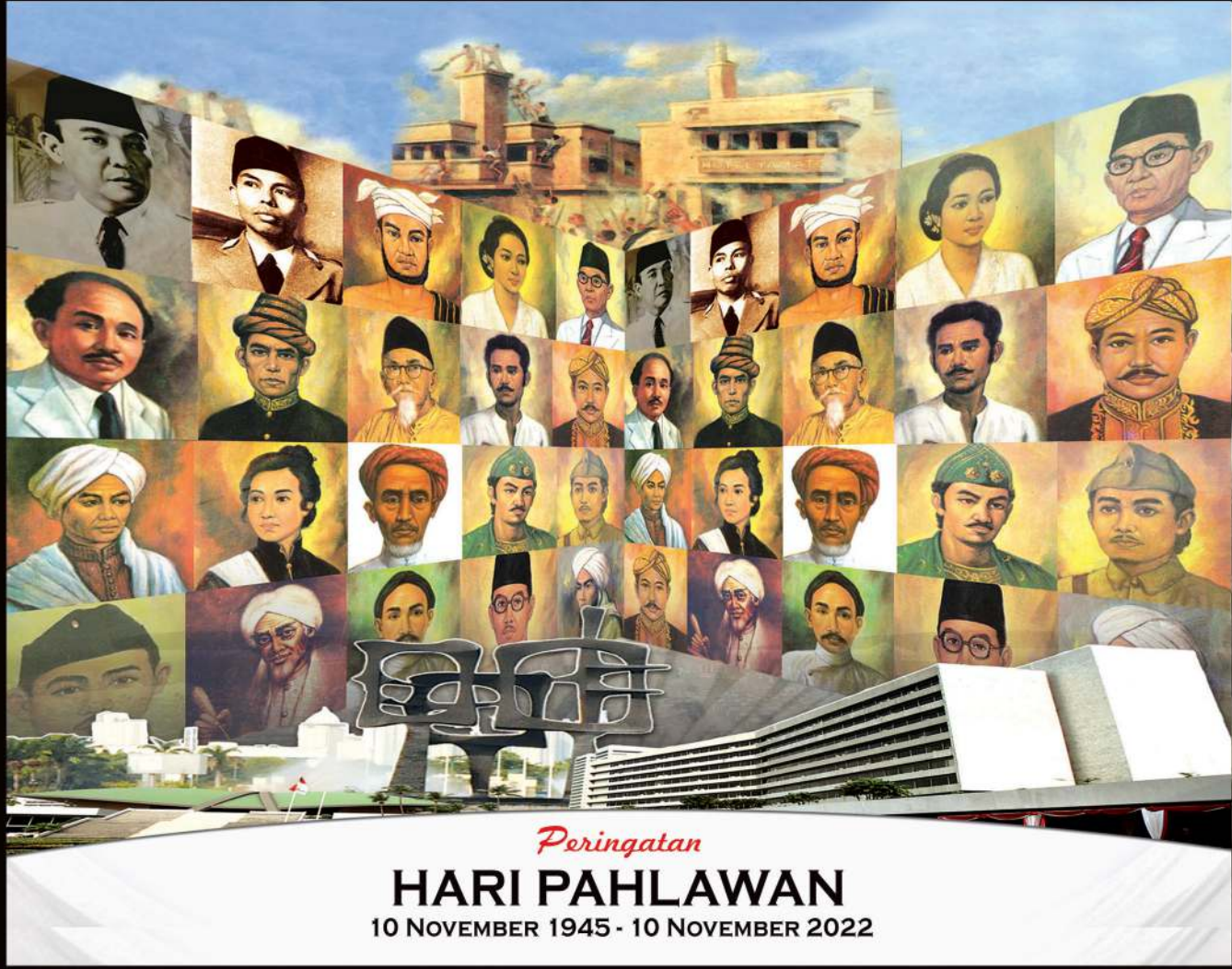
resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Dr. M. Mahfud MD., mewakili Presiden Joko Widodo di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini diikuti oleh 15 lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya dan dua organisasi internasional, yaitu Sekjen dari Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) serta Pimpinan dari Moslem World League (Liga Muslim Dunia).

Delegasi negara yang mengikuti konferensi internasional ini adalah Republik Indonesia, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maroko, Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, Palestina, Malaysia, Republik Mozambik, Republik Yaman, Republik Turki, Republik Islam Iran, Republik Irak, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah.

Setelah pembukaan di Gedung Merdeka, para delegasi kembali ke Hotel Pullman untuk mengikuti sidang (rapat). Berlangsung dari pukul 14.00 siang hari, dan sidang baru berakhir pada Rabu dinihari. Beberapa catatan dari konferensi internasional ini, antara lain semua delegasi sangat antusias mendukung usulan MPR RI untuk pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau nama sejenis lainnya yang sejenis dalam satu forum yang menjadi bagian dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Selain itu, semua delegasi menyepakati pembentukan satu kelompok kerja (Komite Kerja) yang akan mempersiapkan mekanisme pembentukan forum tersebut, meliputi AD/ART, visi misi, program kerja, kesekretariatan, dan lainnya. Komite Kerja ini terdiri dari sembilan negara dan satu organisasi internasional, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Maroko, Turki, Mesir, Iran, Aljazair, Pakistan, Palestina, dan Perhimpunan Parlemen Negara-negara Anggota Kerjasama Islam (PUIC).

Tak kalah penting, konferensi internasional ini menghasilkan “Deklarasi Bandung” yang berisi tujuh poin (butir) kesepakatan para delegasi. “Deklarasi Bandung” juga merujuk pada spirit Dasasila Bandung. Sebagaimana KAA di Bandung tahun 1955, MPR pun membuat sejarah dengan penyelenggaraan konferensi internasional ini. □



MPR RI Gagas Pendirian Forum MPR Dunia

BANDUNG kembali menjadi tuan rumah pembentukan forum bangsa-bangsa yang penting. Setelah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, pada 24-26 Oktober 2022 perwakilan dari puluhan negara-negara Asia-Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), berkumpul di Bandung untuk mengikuti Konferensi Internasional OKI. Konferensi OKI tersebut utamanya adalah dalam rangka pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (Forum MPR Dunia). Para wakil yang hadir, antara lain adalah ketua majelis permusyawaratan atau majelis syuro atau lembaga sejenis di negara-negara OKI. MPR RI sebagai tuan rumah telah mengundang perwakilan dari lebih 50 negara OKI.

Sebagai penggagas, MPR RI sudah melakukan pendekatan ke sejumlah negara sejak beberapa waktu belakangan. Kunjungan pimpinan MPR RI ke majelis permusyawaratan atau dewan syuro di sejumlah negara OKI mendapat sambutan positif, bahkan mendorong agar segera diselenggarakan pembentukan forum tersebut. Sebagai penggagas, mereka juga mendorong agar MPR RI menjadi penyelenggara pembentukan forum tersebut dan sekaligus menjadi tuan rumah.

Forum ini diharapkan akan menjadi jembatan komunikasi antara majelis permusyawaratan, dewan syuro, atau lembaga sejenis di sejumlah negara OKI. Diharapkan forum ini akan banyak membicarakan kerja sama antar-majelis permusyawaratan (dewan syuro) dan masalah-masalah perdamaian dunia. Tentu positioning forum ini tidak akan tumpang tindih dengan forum sejenis, seperti kerja sama antar-parlemen, atau forum lainnya. Untuk itulah Konferensi Internasional OKI di Bandung ini diselenggarakan. Diharapkan juga dari hasil konferensi itu akan

dihasilkan poin-poin penting. Selain itu, nama forum juga bisa disepekat.

Dukungan MPR pada KTT G20

Seperti diketahui, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi Presidensi G20 sejak Desember 2021 dan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. Anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat



Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggota mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global.

KTT G20 tidak hanya merupakan pertemuan para eksekutif

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



(presiden dan juga para menteri) negara anggota kelompok negara-negara ini, tetapi juga diikuti pimpinan parlemen (legislatif). Pertemuan parlemen menjelang KTT bahkan tidak hanya diikuti oleh parlemen anggota G20. Pada 20-24 Maret 2022 diselenggarakan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri delegasi parlemen lebih dari 100 negara. Ini tentunya karena pengaruh dari KTT G20 akan bisa dirasakan dunia karena komposisi keterwakilan G20 dari sisi PDB, volume ekspor, dan populasi dunia yang dominan.

Kali ini giliran MPR RI yang menyelenggarakan konferensi pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang diharapkan diikuti delegasi lebih dari 50 negara. Dengan diadakannya konferensi internasional yang diikuti para ketua majelis permusyawaratan atau majelis syuro ini, maka MPR RI memiliki hubungan internasional dalam bidang parlemen, terutama untuk majelis tinggi (upper house).

Penyelenggaraan konferensi ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menjadi ajang penajagan kerja sama antara majelis permusyawaratan, dewan syuro, atau lembaga sejenis yang kelak akan diformalkan dalam bentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia atau nama lain sesuai kesepakatan. Kedua, sebagai bentuk dukungan atas Presidensi Indonesia dalam G20 dan penyelenggaraan KTT

G20 di Bali. Ketiga, Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang terbentuk akan menjadi legacy bagi MPR RI yang sekarang.

Spirit Konferensi Asia-Afrika

Bandung dipilih sebagai tempat konferensi karena nilai sejarah Konferensi Asia-Afrika. Perhelatan tersebut terbukti berhasil menyatukan negara-negara se-Asia-Afrika dan memunculkan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Diharapkan spirit Konferensi Asia-Afrika itu akan menggelora kembali dalam Konferensi Internasional OKI kali ini.

Untuk menggali spirit itu, dalam satu kegiatan konferensi, antara lain diselenggarakan “historical walk”. Delegasi konferensi melakukan jalan kaki dari Hotel Savoy ke Gedung Merdeka pada 25 Oktober 2022.

Banyak harapan hasil konferensi akan memberi dampak signifikan dari sisi pemikiran dan gagasan dalam upaya meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama dunia. Dunia sekarang sedang “tidak baik-baik saja”. Pandemi Covid-19 yang belum reda, perang Rusia-Ukraina yang belum usai dan berdampak global, kesulitan ekonomi dunia yang diperkirakan akan menghadapi resesi besar tahun 2023, membutuhkan pemikiran-pemikiran jitu yang bermuara pada perlunya meningkatkan kerja sama antar-negara. Mudah-mudahan dari konferensi di Bandung ini diperoleh pemikiran-pemikiran penting. □

Semua Delegasi Antusias Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Semua delegasi yang mengikuti Konferensi Internasional sangat antusias mendukung usulan MPR RI untuk pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau nama Lainnya yang sejenis dalam satu forum yang menjadi bagian dari Parliamentary Union of the OIC Member States (Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI).

JALAN Asia Afrika, Kota Bandung, mulai disterilkan dari kendaraan menjelang agenda pembukaan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya di Gedung Merdeka, Bandung, pada Selasa, 25 Oktober 2022. Sejak pukul 07.00 WIB, kepolisian sudah menutup Jalan Asia Afrika. Kendaraan warga dilarang melintas di jalan tersebut. Sepanjang jalan Asia Afrika tampak lengang. Polisi pun sudah berjaga di mulut jalan untuk mengalihkan kendaraan yang mau masuk ke Jalan Asia Afrika.

Pada pagi itu kepolisian menutup sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Jalan Asia Afrika sendiri ditutup selama tujuh jam mulai pukul 07.00 sampai pukul 14.00 WIB, yaitu selama berlangsungnya pembukaan konferensi internasional di Gedung Merdeka hingga selesai. Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Deden Juandi, menuturkan, pihaknya hanya menutup jalan seputar radius Gedung Merdeka yang menjadi fokus, dimulai dari Jalan Tamblong.

"Penutupan jalan hanya dilakukan sehari, yakni tanggal 25 Oktober 2022. Penutupan dilakukan di ruas Jalan Asia Afrika, Sukarno, Homan, Cikapundung, dan Braga Pendek. Kegiatan konferensi di Gedung Merdeka hanya setengah hari, kemudian para delegasi kembali ke Hotel Pullman untuk melanjutkan rapat di sana," katanya. Para pengguna jalan yang akan melintasi Jalan Asia Afrika, sekitar Gedung Merdeka, terpaksa mencari jalan alternatif lain.

Jalan Asia Afrika sengaja disterilkan dari kendaraan karena akan digunakan para delegasi dari parlemen negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Di Kota Kembang itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States). Konferensi Internasional ini digelar selama tiga hari, 24-26 Oktober 2022, dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia yang diinisiasi MPR RI.

Konferensi internasional ini diikuti sebanyak 15 negara, termasuk Indonesia, dan dua lembaga internasional, yaitu PUIC (Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam) dan MWL (Muslim World League atau Liga Muslim Dunia). Mereka adalah Ketua Majelis Suro Kerajaan Arab Saudi, Dr. Abdullah Muhammed Ibrahim Al-Sheikh, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko, Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Arab Mesir, Abdel Wahab Abdel Razeq, Ketua Senat Republik Islam Pakistan, Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Negara Palestina, Rahwi A.M. Fatouh, Wakil Presiden Senat Malaysia, Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Wakil Ketua Dewan Bangsa Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Salim Chenoufi.



Hadir pula Deputy Pertama Ketua Dewan Suro Kerajaan Bahrain, Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik, Saide Fidel, Wakil Ketua Dewan Suro Republik Yaman, Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki, Orhan Atalay, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran, Dr. Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak, Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Dr. Mustafa Al-Barari, dan Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI, Mouhamed Khourchi NIASS, Supervisor Liga Muslim Sedunia untuk Asia dan Australia, serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia, Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.

Historical Walk

Sebelum pembukaan konferensi internasional, para delegasi mengikuti rangkaian *historical walk* di sepanjang Jalan Asia Afrika tersebut. *Historical walk* merupakan salah

satu rangkaian acara konferensi internasional. Dalam catatan sejarah, pada tanggal 18 April 1955 para pemimpin Asia Afrika berjalan kaki sekitar 100 meter dari Hotel Savoy ke Gedung Merdeka untuk mengikuti KAA. Pada saat itu nampak Presiden Soekarno, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdul Naser berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Momen itulah yang kemudian dikenal sebagai *historical walk*.

Para delegasi antusias untuk mengikuti *historical walk*. Meski prosesi dimulai pada pukul 9.30 WIB, delegasi sudah berdatangan ke Hotel Savoy pada pukul 8.30 WIB. Sepanjang Jalan Asia Afrika juga sudah dipenuhi petugas kepolisian yang berjaga. Sementara, beberapa kendaraan dari undangan mulai berdatangan. Beberapa mobil anggota DPR juga memasuki halaman lobi Hotel Savoy. Kendaraan Pimpinan MPR juga berdatangan. Di lobi hotel, Pimpinan MPR dan Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono telah siap menyambut kedatangan delegasi.

Satu per satu mobil para delegasi mulai berdatangan ke Hotel Savoy Homan sebagai tempat transit sebelum menuju Gedung Merdeka. Iring-iringan mobil para delegasi mulai memasuki halaman hotel Savoy Homan. Ada nama negara di plat nomor setiap mobil. Tampak iring-iringan mobil para delegasi, di antaranya delegasi dari Maroko, Arab Saudi, hingga Aljazair. Terlihat juga mobil yang digunakan delegasi dari Malaysia, Bahrain, Iran, Irak, hingga Mozambik.

Beberapa pejabat negara juga sudah hadir. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mahfud MD., sudah tiba di Hotel Savoy Homan. Menko Polhukam mewakili Presiden RI Joko Widodo mewakili Presiden Joko Widodo akan membuka konferensi internasional ini. Beberapa pejabat negara seperti Ketua Mahkamah Agung H.M Sjarifuddin dan Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata juga sudah hadir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memimpin *historical walk* ini.

Tepat pukul 9.30 WIB, perjalanan *historical walk* yang dipimpin Gubernur Jawa

Barat, Ridwan Kamil, pun dimulai. Mengenakan setelan jas serta kopiah plus kacamata hitam, Ridwan Kamil mendampingi para delegasi menuju Gedung Merdeka. Dengan berbaris rapi, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ridwan Kamil, Mahfud MD serta para wakil ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, mendampingi delegasi peserta konferensi internasional melakukan *historical walk*.

Mereka berjalan beriringan menyusuri jalan istimewa yang menjadi saksi betapa besarnya peran Indonesia dalam menyatukan negara-negara Asia Afrika. "Dengan *historical walk*, para delegasi merasakan aura kebersamaan dan semangat solidaritas yang dimiliki para pemimpin negara-negara peserta KAA tahun 1955 itu," ujar Ridwan Kamil usai napak tilas. Kang Emil bercerita, selama perjalanan tersebut, beberapa kali sempat menjawab pertanyaan anggota delegasi seputar *historical walk* dan KAA.

"Saya katakan kepada mereka, Anda hari ini sangat beruntung punya kesempatan melewati jalur yang sangat istimewa ini. Banyak yang tanya, bagaimana dulunya. Saya terangkan prosesi ini dulu kepala negara Anda melakukan ini. Semua jawaban saya sepertinya memuaskan rasa penasaran mereka tentang sejarah KAA," tuturnya.

Setelah berjalan menyusuri Jalan Asia Afrika, Menko Polhukam, Pimpinan MPR RI, Gubernur Jawa Barat, dan para delegasi memasuki Gedung Merdeka untuk mengikuti acara pembukaan konferensi internasional. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan tari nusantara yang merupakan gabungan (medley) tari-tari dari berbagai daerah di Indonesia untuk menyambut para delegasi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Berikutnya pidato dari Sekretaris Jenderal PUIC (Parlemen Negara-Negara OKI), Mouhamed Khourchi NIASS. Kemudian pidato Presiden Joko Widodo yang diwakili Menko Polhukam, Mahfud MD, dilanjutkan dengan peresmian konferensi internasional dengan memukul gong. Acara pun diakhiri dengan foto bersama dengan semua delegasi peserta konferensi internasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Seperti diketahui, MPR RI menginisiasi pembentukan Forum MPR Dunia. Gagasan untuk membentuk Forum MPR Dunia ini mengemuka dalam kunjungan Pimpinan MPR RI ke Arab Saudi dan Maroko pada Desember 2019. Gagasan itu disampaikan Pimpinan MPR ketika bertemu dengan Raja Salman bin Abdul Azis, Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Dr. Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Riyadh; serta dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Kerajaan Maroko Hakim Benchamach di Rabat, pada bulan Desember 2019.

Gagasan tersebut mendapat dukungan yang sangat baik, namun upaya untuk

merealisasikannya terkendala oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Barulah, pada saat pandemi Covid-19 reda, pada tahun 2022 inilah saat yang tepat memulai langkah merealisasikan gagasan tersebut. Itu sebabnya, MPR RI menggelar konferensi internasional dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia pada 24-26 Oktober 2022 ini di Bandung, Jawa Barat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pembukaan konferensi internasional di Gedung Merdeka mengungkapkan lima alasan pentingnya pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama lain yang disepakati. *Pertama*, ikatan solidaritas di antara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat, sehingga dibutuhkan



bermacam saluran yang bisa mawadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada.

Kedua, spektrum persoalan kemanusiaan di negara-negara OKI dan lain-lainnya membutuhkan peranan dari lebih banyak lagi elemen kelembagaan, termasuk parlemen, untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk berkontribusi menjadi solusi atas permasalahan yang ada. *Ketiga*, pembentukan Forum MPR, Majelis Suro, dan nama sejenis lainnya juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC.

Keempat, kerja sama antarlembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga itu atau mitranya, sesuai tugas dan fungsi lembaga itu. *Kelima*, kerja sama antarlembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan dan persoalan global, yaitu menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Bamsuet kemudian mengusulkan nama forum itu adalah Forum MPR Dunia. "Untuk nama forum ini, dan sesuai dengan visi besar yang kita pikirkan bersama, bila para pimpinan delegasi menyetujui maka MPR RI mengusulkan nama Forum for World Consultative Assembly (Forum MPR Dunia)," katanya.

Dalam pembukaan konferensi, Menko Polhukam Mahfud MD yang mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan, setiap persoalan di suatu negara dapat menjalar ke negara lain. Oleh karena itu diperlukan penguatan kerjasama yang melibatkan semua unsur, termasuk parlemen. Dia melihat peran penting Majelis Permusyawaratan untuk memperkuat upaya menghadapi semua krisis.

"Pemerintah berharap, pertemuan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Syuro dunia ini akan dapat menjadi wadah yang bersifat positif dengan pendekatan yang sinergis dan inklusif dalam mencari solusi atas berbagai tantangan global yang kita hadapi bersama," ujarnya.

Usai seremoni pembukaan konferensi internasional di Gedung Merdeka Bandung, para delegasi kembali ke Hotel Pullman untuk mengikuti rapat (sidang). Hidayat Nur Wahid

memimpin sidang-sidang dalam konferensi internasional ini. Masing-masing delegasi diberikan kesempatan selama 15 menit untuk menyampaikan pandangannya terhadap berbagai isu penting yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh anggota forum.

Seluruh delegasi memiliki kesamaan pandangan untuk mendukung agar bangsa Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Rata-rata delegasi juga menyoroti Islamophobia yang masih menyebar. Hal ini sebagaimana disampaikan delegasi dari Mesir, Pakistan, Bahrain, Malaysia, dan Yordania.

Ada juga yang membahas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan sebagaimana disampaikan delegasi Maroko, Krisis Energi disampaikan oleh delegasi



Bahrain, Perubahan iklim disampaikan oleh delegasi Iran, penghormatan atas kedaulatan sebuah negara bangsa sebagaimana disampaikan delegasi Aljazair, serta pembangunan berkelanjutan yang disampaikan delegasi Yordania.

Pada Rabu (26/10/2022) Konferensi Internasional yang digelar MPR berakhir. Usai penutupan konferensi internasional, Bamsuet menyebutkan, para delegasi menyetujui dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang digagas oleh MPR Republik Indonesia dan akan bekerja sama dengan Perhimpunan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC). Kesepakatan diambil melalui musyawarah secara mufakat melalui sidang

yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid hingga Rabu dinihari.

"Delegasi dari 15 negara anggota OKI bersama PUIC dan Liga Muslim Dunia akan tercatat dalam sejarah sebagai Deklarator Pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Kita juga telah membentuk Komite Khusus yang bertugas menyempurnakan berbagai kebutuhan teknis forum, seperti road map dan arah perjuangan, hingga kebutuhan teknis kesekretariatan, serta berbagai hal detail lainnya seperti yang mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," ujar Bamsuet usai sidang konferensi internasional.

Dalam konferensi pers yang sama, Hidayat Nur Wahid menambahkan, semua delegasi yang mengikuti konferensi internasional ini sangat antusias mendukung usulan MPR RI untuk pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau nama Lainnya yang sejenis dalam satu forum yang menjadi bagian dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC adalah Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI).

Menurut HNW, meskipun menjadi bagian dari PUIC, disepakati oleh Sekjen Parlemen OKI, juga disetujui oleh peserta konferensi, bahwa Forum yang diusulkan oleh MPR RI itu tetap independen, tapi juga tidak duplikasi dengan keanggotaan DPR di PUIC. Forum ini juga tidak berada di bawah PUIC, tidak dikooptasi oleh PUIC, tapi juga tidak setara dengan PUIC apalagi berpretensi untuk menghilangkan peran dan nilai penting PUIC. Hal-hal tersebut menepis kekhawatiran dari beberapa pihak.

"Justru Forum ini adalah mitra PUIC, bagian dari PUIC seperti juga forum-forum yang lain yang lebih dahulu ada di PUIC. Dan PUIC juga tetap memberikan kebebasan kepada MPR untuk menjalin dan melanjutkan kolaborasi dengan membentuk forum sejenis bersama negara-negara/parlemen-parlemen yang bukan anggota OKI, tetapi mempunyai kemiripan kewenangan, juga kesamaan visi misi dengan MPR. Maupun kesamaan kondisi belum terwadahi secara spesifik di dalam berbagai organisasi parlemen internasional. Dengan demikian akan lengkaplah Forum MPR Se-Dunia itu," katanya. □

MBO/DER/BSC

Dari Isu Palestina Hingga Islamophobia

Dari pandangan para delegasi dalam sidang sudah tergambar, misalnya, seluruh delegasi memiliki kesamaan pandangan untuk mendukung agar bangsa Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Selain itu, Rata-rata delegasi juga menyoroti Islamophobia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

USAI pembukaan Konferensi Internasional di Gedung Merdeka, Bandung, para delegasi kembali ke Hotel Pullman untuk mengikuti serangkaian sidang-sidang. Pada pukul 14.00 Selasa siang (25/10/2022), sidang pun dibuka. Sidang dipimpin Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Hadir dalam sidang ini Pimpinan MPR lainnya, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan para wakil ketua MPR di antaranya Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Delegasi yang hadir, antara lain Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Arab Mesir Abdel Wahab Abdel Razeq, Ketua Senat Republik Islam Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Negara Palestina Rahwi A.M. Fatouh, Wakil

Presiden Senat Malaysia Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Wakil Ketua Dewan Bangsa Republik Demokratik Rakyat Aljazair Salim Chenoufi.

Berikutnya, Deputi Pertama Ketua Dewan Syuro Kerajaan Bahrain Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik Saide Fidel, Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki Orhan Atalay, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Yordania Hasyimiyah Dr. Mustafa Al-Barari, Sekretaris Jenderal PUIC Mouhamed Khourchi, Supervisor Liga Muslim Sedunia Untuk Asia dan Australia serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman

Muhammad Amin Al Khayyat.

Pada sidang ini masing-masing delegasi diberikan kesempatan selama 15 menit untuk menyampaikan pandangannya terhadap berbagai isu penting yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh anggota forum. Hidayat Nur Wahid sebagai pimpinan sidang mempersilakan secara berturut-turut delegasi untuk berbicara. Sebagian besar delegasi menyampaikan pandangan dalam bahasa Arab. Hanya Pakistan yang menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan delegasi Malaysia menyampaikan dalam bahasa Malaysia.

Delegasi Malaysia, dalam pandangannya yang disampaikan oleh Wakil Presiden Senat Malaysia, Mohamad Ali bin Haji Mohamad, memberikan apresiasi kepada MPR Indonesia yang telah menyelenggarakan konferensi internasional ini. "Konferensi internasional ini membicarakan tentang dinamika global serta permasalahan yang dihadapi umat Islam di



seluruh dunia. “Sejak tahun 1999, Parlemen Malaysia telah menjadi anggota PUIC. Malaysia terus mendukung PUIC. PUIC memiliki tanggungjawab, peran, dan komitmen yang tinggi menghadapi perkembangan global dan permasalahan seperti Islamophobia dan kekerasan,” katanya.

Menurut Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Islamophobia sering dikaitkan dengan sentimen-sentimen anti-Islam, terutama di media sosial yang berisi kebencian terhadap Islam. Untuk mencegah Islamophobia perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang Islam, memupuk hidup bertoleransi, serta harmoni di antara masyarakat dengan beragam ras, bangsa, dan budaya. Untuk mencegah Islamophobia ini perlu dilakukan bantuan kepada pusat-pusat pencegahan Islamophobia di seluruh dunia.

Selain Islamophobia, lanjut Mohamad Ali, umat Islam juga menghadapi masalah kekerasan. Untuk mencegah kekerasan perlu dilakukan kerjasama dan solidaritas antar-bangsa. “Kita juga harus menentang segala doktrin kekerasan di masyarakat Islam. Sedangkan dalam isu Palestina, diperlukan tindakan secara bersama. Dari forum ini, kita berharap, dapat mencari jalan keluar dari masalah Palestina ini sehingga penyelesaian masalah Palestina dapat dilaksanakan. Malaysia berharap, pertemuan ini menjadi wadah yang kokoh bagi negara-negara Islam untuk membicarakan masalah-masalah dunia untuk kepentingan umat Islam,” paparnya.

Sementara itu, delegasi Maroko seperti disampaikan Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Ennam Mayara, dalam pandangannya mengatakan, Maroko merasa dekat dengan Indonesia karena Bung Karno pernah datang tahun 1960, karena itu Raja Maroko mendukung kegiatan ini, terutama agar forum ini mendukung kemerdekaan Palestina yang lebih luas. “Kedamaian harus dirasakan bangsa Palestina sesuai harapan masyarakat Indonesia. Ibukota Jerusalem adalah milik tiga agama besar, sesuai kesepakatan kesepakatan komisi Jerusalem. Komisi Jerusalem ini dibentuk oleh Raja Maroko,” ujarnya.

Maroko pun mengajukan 10 poin untuk forum ini. Pertama, hendaknya masing-masing anggota Forum MPR Dunia ini sama-sama memperkuat sistem bikameral. Hanya dengan begitu maka kalau forum ini terwujud MPR, Majelis Syuro, atau Majelis Suyukh dan nama sejenis lainnya, semakin kuat.

Kedua, Maroko mengusulkan agar forum meningkatkan kedudukan, dalam hal ini negara-negara Islam, dalam kancah internasional. Karena selama ini, lembaga-lembaga yang ada hanya sekadar ada tetapi tidak pernah membuat resolusi yang menggetarkan dunia. Ketiga, forum ini harus membentuk sebuah komite yang khusus mengangkat isu-isu Palestina. Karena hanya dengan sebuah komite itu, persoalan Palestina menjadi terfokus dan bisa menekan PBB karena selama ini PBB hanya bisa membuat resolusi-resolusi tanpa pernah

diimplementasikan.

Keempat, Maroko mendorong kerjasama lintas agama. Kelima, hendaknya Forum MPR Dunia ini meningkatkan pertukaran pengalaman yang aneka ragam dari semua anggota nantinya. Hanya dengan begitu forum itu akan memperkaya masing-masing parlemen. Keenam, Maroko menghendaki forum ini agar mempertahankan kepentingan negara-negara Islam. Karena selama ini negara-negara Islam saat ini masih dalam posisi developing countries dan under developing countries (negara berkembang dan negara miskin). Ketujuh, hendaknya setiap anggota forum ini tidak mencampuri urusan negara lain.

Kedelapan, hendaknya forum ini mengadopsi persoalan-persoalan yang sekarang berkembang, misalnya perubahan iklim, anti-korupsi karena korupsi di negara-negara berkembang juga di negara Islam masih besar. Kesembilan, harus ditunjuk komisi tersendiri untuk merumuskan forum ini. Jangan sekadar konferensi, perlu dibuat komisi sendiri yang akan mengatur AD/ART, visi misi, aturan main, dan sebagainya. Kesepuluh, Maroko mendukung Indonesia menjadi Sekretariat Tetap pertama di forum ini.

Dari pandangan para delegasi dalam sidang sudah tergambarkan, misalnya, seluruh delegasi memiliki kesamaan pandangan untuk mendukung agar bangsa Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Selain itu, rata-rata delegasi juga menyoroti Islamophobia yang masih menyebar, khususnya bagi yang mengalami trauma akibat terjadinya tindak terorisme serta kekerasan berbasis agama. Hal ini sebagaimana disampaikan delegasi dari Mesir, Pakistan, Bahrain, Malaysia, dan Yordania.

Ada juga yang membahas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan sebagaimana disampaikan delegasi Maroko, krisis energi disampaikan oleh delegasi Bahrain, perubahan iklim disampaikan oleh delegasi Iran, penghormatan atas kedaulatan sebuah negara bangsa sebagaimana disampaikan delegasi Aljazair, serta pembangunan berkelanjutan yang disampaikan delegasi Yordania, dan berbagai isu menarik lainnya yang nanti akan dielaborasi lebih jauh oleh Komite Khusus. □

BSC

Konferensi Internasional MPR Hasilkan “Deklarasi Bandung”

Deklarasi hasil dari konferensi internasional ini dinamakan “Deklarasi Bandung,” karena masih terkait dengan Dasasila Bandung yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR Bambang Soesatyo memanggil para ketua delegasi yang mengikuti konferensi internasional untuk naik ke atas panggung. Segera para Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau nama lain yang sejenis peserta konferensi internasional berjalan menuju panggung. Setelah berjejer rapi, Bamsoet membacakan “Deklarasi Bandung” sebagai hasil Konferensi Internasional Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya yang berlangsung selama tiga hari di Kota Bandung, Jawa Barat, 24-26 Oktober 2022.

“Kami Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya dari Negara-negara (Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Arab Mesir, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Bahrain, Republik Irak, Republik Islam Iran, Malaysia, Kerajaan Maroko, Republik Mozambik, Republik Islam Pakistan, Palestina, Republik Turkiye, Kerajaan Yordania Hasyimiyah,

Republik Yaman), dan Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam, Liga Muslim Dunia sebagai peserta dalam Konferensi Internasional Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam, yang hadir di Bandung-Indonesia, pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2022, dengan ini menyampaikan “Deklarasi Bandung”, sebagai berikut:

1. Menyepakati usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai bagian dari PUIC, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

2. Masalah Palestina tetap menjadi isu sentral Forum dan Umat Islam hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat

Palestina serta berdirinya Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai kerangka hukum internasional;

3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 mewujudkan tujuan mulia tersebut, dibentuklah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya di dalam PUIC, sesuai kewenangan masing-masing lembaga, terutama konsultasi dan kerja sama untuk mengatasi tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama, seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, dan generasi muda;

4. Mencermati dinamika perkembangan global yang bisa menimbulkan kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensional di setiap Negara, yang berdampak pada tingkat regional maupun internasional, diperlukan adanya partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau

Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya, sesuai dengan komitmen terhadap Dasasila Bandung, serta Piagam PBB;

5. Membentuk Komite Kerja yang terdiri dari para Pendiri Forum dengan berkoordinasi bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal PUIC, untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, syarat-syarat keanggotaan Forum, selanjutnya Komite Kerja akan menyampaikan laporan pekerjaannya pada pertemuan Forum berikutnya;

6. Menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas inisiatif prakarsa penyelenggaraan Konferensi dalam rangka pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai Forum di antara forum-forum PUIC lainnya. Pertemuan selanjutnya dari Forum ini disepakati dapat diselenggarakan bersama dengan kegiatan lainnya dari PUIC;

7. Para Delegasi Konferensi ini menyampaikan ucapan selamat kepada Republik Indonesia atas penyelenggaraan dan Presidensi G-20 pada tahun 2022, serta mengharapkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan tugas tersebut.

Deklarasi tersebut menjadi kesepakatan bersama yang berhasil dirumuskan oleh 15 negara yang hadir, termasuk Indonesia, serta perwakilan dari Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (PUIC) dan Liga Muslim Dunia (World Moeslem League). Menurut Bamsuet, deklarasi hasil dari konferensi internasional ini dinamakan “Deklarasi Bandung,” karena masih terkait dengan Dasasila Bandung yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. “Kami menamakan kesepakatan itu sebagai “Deklarasi Bandung”, karena masih terkait dengan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan pada pertemuan Asia Afrika tahun 1955,” tuturnya.

Sebelumnya, sidang pada hari kedua konferensi internasional itu, pada Selasa, 25 Oktober, memang panjang. Setelah acara pembukaan di Gedung Merdeka, MPR RI dan para delegasi kemudian mengadakan sidang pleno sejak Selasa Pukul 14.00 hingga Pukul

01.00 Rabu dini hari. Setiap perwakilan menyampaikan pandangan dan membahas isu-isu penting. Permasalahan Palestina dan Yaman termasuk dalam bahasan panjang, dan juga pembahasan kesepakatan tentang nama yang akan dipakai untuk forum ini.

Dari berbagai pandangan tersebut, akhirnya MPR RI sebagai tuan rumah menetapkan empat kesimpulan besar yang dihasilkan dalam forum ini. Pertama, pentingnya upaya meningkatkan kerja sama antara negara dalam segala bidang untuk memaksimalkan potensi-potensi kolektif, khususnya antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan terlebih dari 15 negara yang hadir pada forum ini.

Kedua, perlunya secara kolektif untuk memperkuat posisi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna memperkuat posisi tawar

terus mendorong upaya pengarusutamaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, menjawab tantangan islamophobia melalui dialog konstruktif antarbangsa dan antarperadaban, serta komitmen yang sungguh-sungguh secara bersama-sama untuk mengatasi radikalisme, terorisme, dan tindak kekerasan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hasilnya dituangkan dalam Deklarasi Bandung dengan 7 poin penting. Deklarasi ini, seturut lokasi penyelenggaraan konferensi di Bandung, sekaligus membangkitkan lagi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 yang berhasil meletakkan dasar perubahan terhadap sikap banyak negara di dunia tentang pentingnya kesetaraan, kemerdekaan, kerja sama, dan perdamaian.

“Izinkan saya mengutip pidato Presiden



kolektif negara-negara Islam di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, serta memberikan dukungan dan komitmen solidaritas antara bangsa, untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi secara bersama, ataupun secara spesifik dihadapi oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia.

Ketiga, Pentingnya forum antarparlemen yang bersifat cair, tetapi tetap memiliki kemampuan taktis untuk mewakili kepentingan rakyat di masing-masing negara, serta mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk lebih memperkokoh kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Keempat, perlunya peran parlemen untuk

Soekarno yang disampaikan pada sebuah momentum kesejarahan 67 tahun yang lalu di Kota Bandung, pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika, bahwa ‘tak ada tugas yang lebih mendesak daripada memelihara perdamaian’. Pesan ini akan selalu relevan dan kontekstual untuk kita jadikan rujukan dalam tatanan kehidupan global, karena ke depan, laju peradaban akan menghadirkan tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Tidak hanya terwujud pada potensi konflik, namun juga berdampak pada berbagai dimensi lainnya, seperti krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan berbagai krisis lainnya,” tutur Bamsuet dalam pidato menutup konferensi internasional. □

BSC

Dies Natalis Ke-60 UIN SMH Kota Serang

UIN SMH Harus Menjadi Solusi yang Solutif Bagi Bangsa dan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, berharap, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin berada di garda terdepan dalam melakukan edukasi dan transformasi kepada masyarakat.

RATUSAN civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH), jajaran Muspida, dan masyarakat lainnya, Kamis, 13 Oktober 2022, tampak memenuhi Aula Gedung Prof. KH. M. Sjadzli Hasan, lantai 2, Kampus UIN SMH, Kota Serang, Banten. Kehadiran mereka di sana adalah mengikuti acara Dies Natalis Ke-60 UIN SMH.

Acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Yandri Susanto S.Pt., Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia SE., Dirjen Pendidikan Islam Adib Abdussomad Ph.D., Rektor UIN SMH Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin M.Pd., serta para guru besar, dan para dekan.

Dalam orasi kebangsaannya, Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, secara khusus mengucapkan selamat Dies Natalis Ke-60 kepada perguruan tinggi tertua di Banten itu. "Usia 60 tahun bukan usia yang pendek," ujar politisi PAN itu. Terlebih, UIN SMH dalam perkembangannya telah melalui jalan yang panjang, mulai menjadi bagian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lalu bersatus STAIN, IAIN, hingga

akhirnya UIN.

Keberadaan UIN SMH, menurut pria asal Bengkulu itu, sangat strategis. Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan. Pembelahan masyarakat di akar rumput selepas Pemilu 2019 diakui belum selesai. Menghadapi masalah yang demikian, dia mengajak seluruh civitas akademika untuk berperan penting menyelesaikan persoalan yang ada.

"Sejatinya kita jangan baperan, jangan main perasaan, sesama anak bangsa tidak boleh ada dendam, iri, dan dengki", tegasnya.

Alumni Universitas Bengkulu itu berharap, UIN SMH menjadi garda terdepan untuk melakukan edukasi dan transformasi kepada masyarakat. "UIN SMH harus menjadi solusi yang solutif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara", ujarnya.

Masalah yang dihadapi saat ini, menurut Yandri, bukan lagi soal siapa mendukung siapa. Bukan juga soal salat menggunakan qunut atau tidak, tarawih dua puluh tiga atau sebelas rakaat. "Masalah itu saya kira tidak perlu lagi diperdebatkan", paparnya. Masalah yang lebih penting dihadapi bangsa Indonesia saat ini



adalah soal mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

Yandri Susanto mendorong agar UIN SMH mampu melakukan terobosan atau pengabdian yang penting bagi bangsa dan negara. Ia berharap, para alumni, dosen, dan mahasiswa berada dalam satu frekuensi untuk mengatakan UIN bukan bagian dari persoalan, tetapi menjadi bagian dari solusi yang solutif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Dia mengingatkan, bilamana kita bersatu padu, saling mendukung, mendoakan, memahami perbedaan, merawat kebersamaan maka hal yang demikian akan menjadi modal utama dalam membangun bangsa dan negara. "UIN SMH harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan," tegasnya.

Selanjutnya Yandri juga berharap, kampus ini masuk jajaran perguruan tinggi

yang berkualitas di Indonesia. "Saya bagian dari Keluarga Besar Banten ikut bertanggung jawab untuk kemajuan UIN SMH di masa akan

datang", ujar wakil rakyat dari Dapil Banten II, meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang, itu. □



Kunjungan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UI

Agar Demokrasi Pancasila Tidak Terjebak dalam Demokrasi Angka-angka

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Pilkada Langsung dalam kehidupan Demokrasi Pancasila.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Pilkada Langsung dalam kehidupan Demokrasi Pancasila.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak

para mahasiswa magister ilmu hukum yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) untuk terlibat mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Pilkada langsung dalam kehidupan Demokrasi Pancasila. Termasuk mengkaji langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk semakin menekan

money politic dan high cost politic dalam Pileg dan Pilpres Langsung.

Mekanisme Pilkada dan Pileg berbeda dengan Pemilihan Presiden yang oleh konstitusi diamanatkan agar dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk Pilkada, amanat konstitusi dalam Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

“Sedangkan untuk Pileg, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. IMMH UI dan juga berbagai kelompok akademisi lainnya bisa mengkaji tafsir terhadap konstitusi tersebut, apakah bisa mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ataupun Pileg dengan sistem tertutup seperti dahulu, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi, money politic, dan high cost politic. Dengan demikian bisa menyelamatkan Demokrasi Pancasila kita agar tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki,” ujar Bamsoet usai menerima IMMH UI, di Jakarta, Rabu (12/10/22).

Pengurus IMMH UI yang hadir antara lain, Ketua Umum Muhammad Nur Isra, Wakil Ketua Muyassar Nugroho, Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi M Faiz Putra Syanel, Kepala Bidang Minat dan Bakat Fero Frets, Wakil Sekretaris Umum Sari Ramadhanti, Sekbid Minat dan Bakat Retno Astuti, dan Staf Bidang Pengabdian Masyarakat Raras Nadifah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMMH UI dan para



kelompok akademisi lainnya juga bisa terlibat untuk mengkaji pilihan bentuk hukum yang ideal bagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI saat ini sudah memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Sekaligus menjamin keselarasan antara pembangunan daerah dengan pusat, serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

“Badan Pengkajian MPR RI telah memberikan rekomendasi tiga pilihan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN. Yakni diatur secara langsung dalam konstitusi, diatur

melalui Ketetapan MPR RI, atau diatur melalui undang-undang. Pilihan bentuk hukum mana yang akan diambil, nanti akan diusulkan oleh Panitia Ad Hoc yang akan dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR RI. Masyarakat melalui berbagai kelompok akademisi seperti IMM UI bisa membantu MPR RI dengan memberikan masukan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyiapkan haluan negara yang dikenal Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB), yang dirumuskan sekitar tahun 1959 dan dijalankan mulai tahun 1961. PNSB disusun lebih dari 500 pakar dan ahli dari

berbagai bidang, sehingga mampu menggambarkan berbagai capaian yang ingin diraih Indonesia hingga puluhan tahun pasca kemerdekaan. Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Namun, sejak reformasi, haluan negara justru dihapuskan. Akibatnya kini kita seperti kehilangan arah dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus tidak adanya jaminan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Serta tidak adanya keselarasan antara pembangunan pusat dengan daerah, serta satu daerah dengan daerah disekitarnya,” pungkas Bamsoet. □

Kunjungan Pengurus DPP Korps Indonesia Muda

Bamsoet Ajak Ormas Tanamkan Nilai Kebangsaan

Kehidupan ormas sebagai entitas sosial-politik akan selalu dihadapkan pada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, ormas juga dituntut untuk menyikapi dinamika kehidupan kebangsaan secara bijak.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga Juni 2022 mencatat ada 512.997 ormas di Indonesia. Di satu sisi, banyaknya ormas

mengindikasikan bahwa kehidupan berdemokrasi telah berjalan di jalur yang tepat, dimana hak-hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi, terjamin dan terlindungi.

“Banyaknya jumlah ormas di Indonesia, salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan Korps Indonesia Muda, harus memiliki sinergi positif sebagai sumber daya pembangunan, sehingga memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran ormas tidak boleh menjadi sarana untuk membangun sekat-sekat yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi ‘duri dalam daging’ bagi pembangunan,” ujar Bamsoet usai menerima DPP Korps Indonesia Muda, di Jakarta, Rabu (12/10/22).

Pengurus Korps Indonesia Muda yang hadir, antara lain Ketua Umum Hika Transisia AP, Sekjen Rendy Herpy, Wakil Bendahara Harizal Agus, Wakil Panglima Komando Bowo Winata, Bidang Kesehatan Agus Henryanto, Ketua DPC Kabupaten Bekasi Devied, Kantor Hukum Indonesia Muda Ewin Rahmat, Bidang Pendidikan Giwal Robiansyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Keamanan ini mendorong Korps Indonesia Muda untuk bisa merangkul berbagai golongan kepemudaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip persaudaraan, solidaritas, dan nasionalisme.

Kehidupan ormas sebagai entitas sosial-politik akan selalu dihadapkan pada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, ormas juga dituntut untuk menyikapi dinamika kehidupan kebangsaan

secara bijak. Setiap wacana yang berkembang harus didalami dan dimaknai dengan mengedepankan logika berpikir yang argumentatif.

“Seiring waktu, eksistensi ormas akan selalu diuji oleh tantangan dan dinamika zaman. Untuk dapat bertahan, Korps Indonesia Muda sebagaimana ormas lainnya harus menjaga komitmen untuk membangun soliditas organisasi, merapatkan barisan di

semua lini, tidak mudah terpecah belah, dan menjadikan visi organisasi sebagai cita bersama yang menyatukan segenap anggotanya,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Korps Indonesia Muda harus mampu memaksimalkan potensi generasi muda bangsa. Mengingat generasi muda bangsa adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban.

“Terlebih saat ini kita telah menapakkan kaki pada kuartal keempat menuju usia satu abad kemerdekaan. Dalam kurun waktu 23 tahun ke depan, kita akan mencapai usia emas, di mana salah satu pilar yang ingin kita wujudkan dalam visi Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mimpi besar yang ingin kita wujudkan, sebagaimana digagas oleh Presiden Jokowi, adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Mewujudkannya perlu kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan dari organisasi kepemudaan Korps Indonesia Muda,” pungkas Bamsuet. □



Peringatan Hari Santri Nasional

Ahmad Basarah Ajak Kaum Santri Berjihad Perang Melawan Fitnah di Media Sosial

Berita hoaks di media sosial bukan kebohongan semata, tapi banyak juga yang sengaja mengadu domba antarsuku dan agama, menipu, mengajak masyarakat memusuhi pemerintah.

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengajak kaum santri yang dulu angkat senjata melawan tentara *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) pada 22 Oktober 1945 kini berjihad perang melawan hoaks dan fitnah di media sosial. Dia menilai, ribuan hoaks di media sosial dapat memecah belah bangsa, jihad menumpasnya dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berita hoaks di media sosial bukan kebohongan semata, tapi banyak juga yang sengaja mengadu domba antarsuku dan agama, menipu, mengajak masyarakat memusuhi pemerintah, bahkan menyebarkan paham asing untuk tujuan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Berperang melawan kebohongan di media sosial adalah medan jihad baru buat kamu santri," tegas Ahmad Basarah, dalam pernyataannya memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2022.

Dalam kurun tiga tahun terakhir hingga 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 9.546 hoaks tersebar di berbagai platform media sosial di Internet. Selain hoaks, Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo juga menemukan konten-konten negatif, seperti penipuan pinjaman online sampai konten yang berisi ajaran radikalisme dan terorisme yang merongrong pertahanan dan kewibawaan negara.

Menurut Ahmad Basarah, inti dari fatwa perang sabil yang diserukan KH. Hasyim Asy'ari dan alim ulama di Jawa-Madura pada 22 Oktober 1945 adalah menjaga kedaulatan NKRI. Fatwa yang ditetapkan oleh tokoh besar Nahdlatul Ulama itu berisi ajaran agama yang di dalamnya semangat kebangsaan digelorakan dalam satu tarikan napas.

"Karena itu, jika kita tarik semangat fatwa itu di era sekarang, elan jihad di dalamnya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sangat relevan dalam konteks jihad di media sosial. Jihad yang artinya bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu itu harus dimaknai sebagai kesungguhan kaum santri dan semua komponen bangsa lainnya dalam membela tanah air," tandas Sekretaris Dewan Penasihat PP. Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, jihad membela negara dengan memerangi hoaks di media sosial tidak kalah sulit dibandingkan perang fisik melawan tentara kolonial. Bedanya, jika dulu jihad dilakukan dengan mengusir penjajah yang tampak di depan mata, di era 5.0 sekarang musuh negara tidak terlihat kasat mata, tapi terasa pergerakannya menggerogoti sendi-sendi pertahanan negara.

Ahmad Basarah menjelaskan, mereka yang tidak suka Indonesia bersatu di

bawah naungan ideologi Pancasila menggunakan kecanggihan teknologi, terutama media sosial, untuk melancarkan propaganda anti NKRI, Pancasila, dan pemerintahan yang sah. Taktik dan strategi mereka luar biasa dalam mengadu domba antara masyarakat dengan aparat pemerintah, antara tokoh agama dengan polisi atau TNI, dan kadang mengafirkan antarpemeluk agama untuk memunculkan sikap saling curiga.

"Di sinilah medan jihad baru buat kalangan santri terbuka lebar. Dengan ilmu agama yang digali di pesantren, kaum santri bisa melakukan kontra narasi lewat ceramah, khutbah, proses belajar di pesantren atau sekolah, juga lewat konten-konten media sosial mereka untuk memerangi semua berita bohong yang meresahkan kita semua sebagai bangsa. Jika mereka bisa memanfaatkan teknologi komunikasi, kaum santri juga bisa," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU 2022-2027 ini mengimbau agar kaum santri tidak melupakan fakta sejarah bahwa berdirinya NKRI tidak jatuh dari langit dengan tiba-tiba, tapi ada darah tumpah dan perjuangan para syuhada bangsa, termasuk para ulama. Saat Pancasila lahir sebagai ideologi negara pun, ada ijthad para alim ulama di dalamnya bahwa negara dengan bangsa majemuk seperti Indonesia hanya layak dinaungi oleh ideologi terbuka Pancasila, bukan oleh agama tertentu.

"Kaum santri itu pewaris para kiai dan alim ulama. Golongan santri tentu tidak akan pernah rela jika warisan kiai dan alim ulama mereka diganggu dan dirusak. Sebagai santri sudah seharusnya mereka bergerak menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila sebagai bagian dari ketaatan pada kiai dan ajaran Islam," tandas Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) tersebut. □

Peresmian Fasilitas Air Bersih di Banten

Yandri Susanto Apresiasi Program Bantuan Air Bersih Untuk Rakyat

Air bersih siap konsumsi sangat dibutuhkan rakyat, terutama yang kondisi alamnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan air yang layak.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt mengapresiasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Air Bersih (PPMTAB) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Salah satu kegiatannya adalah menyediakan bantuan seperangkat peralatan penjernih air di beberapa daerah, sehingga masyarakat bisa mengolah air asin atau air kotor menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

“Saya sangat mendukung program itu karena air sangat penting untuk kehidupan. Di samping itu, memang masih ada daerah-daerah di Indonesia yang kekurangan sumber air bersih atau kesulitan air tawar, karena berada di pinggir pantai, sehingga air laut selalu merembes ke daratan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini usai menghadiri acara Peresmian Bantuan Air Kotor Menjadi Air Minum PPMTAB Kemensos RI, di Kampung Cikedung, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi

Banten, Selasa (4/10/2022).

Selain Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, hadir pula dalam acara itu Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto, Walikota Serang Syafrudin, Lurah Desa Margaluyu, Camat Kasemen, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Terkait program yang sedang gencar dilaksanakan Kemensos tersebut, Yandri melihat itu merupakan sebuah terobosan luar biasa untuk memaksimalkan pelayanan kepada rakyat Indonesia. “Saya rasa ini bisa menjadi satu bentuk pola pelayanan pemerintah kepada rakyat Indonesia, dan itu menunjukkan pemerintah peka terhadap kesulitan rakyat,” tambah Yandri.

Untuk itu, “Perangkat desa dan masyarakat mesti bersama-sama, bahu-membahu, menjaga dan merawatnya sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tandas anggota Komisi VIII DPR F-PAN Dapil Banten II ini, yang juga menjadi aspirator memperjuangkan Desa Margaluyu mendapatkan program bantuan penjernihan air dari Kemensos.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos

Rismaharini mengungkapkan bahwa program ini muncul karena memang masih banyak daerah yang sangat kekurangan air bersih untuk memenuhi kehidupan dasar rakyat sehari-hari, seperti di Asmat Papua.

“Di sana, Asmat, rakyat sangat susah payah mendapatkan air bersih. Kami upayakan dengan sekuat tenaga walau kondisi alamnya sangat berat, sumber air jauh, listrik belum ada sehingga kami membangun solar Cell, tapi semua kami lakukan untuk rakyat,” ungkap Mensos Risma.

Sedangkan di Provinsi Banten, menurut Mensos, ada empat desa yang dibantu, salah satunya Margaluyu ini. “Daerah-daerah lain juga sudah kami data dan akan kami bantu,” terang Risma.

Di sesi akhir, Yandri Susanto bersama Risma didampingi perangkat dan tokoh masyarakat desa Margaluyu melakukan peninjauan ke lokasi Instalasi Pengolahan Air Terpadu, berbentuk bangunan permanen persis berada di sebelah Musola desa. Di bangunan inilah proses pengolahan air tidak layak menjadi air bersih dan bisa di minum. □

DER

Kasus Gagal Ginjal Akut Misterius Anak

HNW Minta Agar Segera Diidentifikasi Penyebabnya

Sesuai tupoksinya, KemenPPPA harus maju ke depan mengambil inisiatif dan membuktikan kemampuannya dalam melakukan koordinasi lintas sektor terkait penanganan gangguan ginjal akut misterius pada anak.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang antara lain membidangi urusan anak, Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengambil tanggung jawab dengan memaksimalkan peran koordinasi dalam kasus terus terjadinya gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak Indonesia.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, menilai, kejadian tersebut sudah cukup masif dan meluas, sehingga dibutuhkan penanganan lintas Kementerian dan Lembaga yang terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan data Kemenkes, setidaknya sudah 152 anak yang terkena gangguan ginjal akut misterius. Penyakit itu ditemukan sudah menyebar di 16 Provinsi di Indonesia.

“Saya turut prihatin, sudah ratusan anak terkena gagal ginjal akut misterius,” ujar politisi PKS dalam keterangan di Jakarta Senin (17/10). Oleh karena itu, kata HNW, penting bagi KemenPPPA untuk mengambil

tanggung jawab sesuai tupoksinya, dengan mengoptimalkan koordinasi intensif dengan Kemenkes, IDAI, BPOM, dan para orang tua, sehingga penyakit ini bisa dicegah dan dihentikan.

Menurut HNW, tingkat kematian gagal ginjal akut cukup mengkhawatirkan. Di DKI Jakarta misalnya, dari 42 kasus pada anak, 25 anak di antaranya meninggal dunia atau sekitar 60%.

Penyakit ini harus segera diidentifikasi penyebabnya, dan kemudian dijelaskan bagaimana penanganan dan pencegahannya, serta edukasi kepada para orang tua terkait tentang cara menyikapinya. “Kompleksitas ini sangat membutuhkan koordinasi yang kami harapkan bisa dimaksimalkan oleh KemenPPPA,” tegas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

HNW menyebutkan, setidaknya ada beberapa institusi yang bersinggungan dengan kasus ini, yakni Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk penanganannya, BPOM untuk pengecekan kandungan obat-obatan anak,

Kemendagri dan Pemerintah Daerah terkait pendataan pasien di daerah, dan kader-kader Posyandu untuk sosialisasi ke masyarakat. Tentu juga peran keluarga dan orang tua, baik dalam aspek pencegahan maupun penyembuhan.

Dia berharap, sejumlah K/L tersebut bisa fokus pada tugasnya masing-masing tanpa distraksi sektoral. Untuk itu, KemenPPPA harus mengambil inisiatif tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan tersebut secara lebih komprehensif dan lintas sektor. Karena, memang, salah satu misi KemenPPPA adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan perlindungan khusus anak.

“Sesuai tupoksinya, KemenPPPA harus maju ke depan, mengambil inisiatif dan membuktikan kemampuannya dalam melakukan koordinasi lintas sektor terkait penanganan gangguan ginjal akut misterius pada anak ini, sehingga ke depan KemenPPPA yang spesifik ini bisa semakin dipercaya untuk diperkuat kewenangan dan anggarannya,” pungkasnya. □

Milad ke-25 Ponpes Al Mubarak, Kota Serang

Yandri Susanto: Pondok Pesantren Penjaga Moral Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto berharap, Ponpes Al Mubarak di Kota Serang, Banten, bisa membentengi generasi muda dari penyakit masyarakat, seperti narkoba, dekadensi moral, LGBT dan lainnya itu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Yandri Susanto meminta pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejatinya memperhatikan keberadaan pondok pesantren dan madrasah. “Jangan sampai pondok pesantren dan madrasah dianaktirikan,” ujar Yandri Susanto di Kota Serang, Banten, Senin malam (10/10).

Berbicara dalam acara Tabliq Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad ke-25 Pondok Pesantren Al Mubarak, Kota Serang, Yandri yang juga anggota MPR dari daerah pemilihan Banten ini menyatakan, pondok pesantren dan madrasah adalah pencetak dan penggembleng akhlak anak bangsa dari berbagai macam penyakit masyarakat.

“Ponpes dan madrasah menjadi garda terdepan membentuk karakter anak bangsa,” katanya dalam acara yang dihadiri, antara lain para pengasuh dan pimpinan Ponpes Al Mubarak, Walikota Serang H. Syarifuddin, penceramah Dr. K.H. Mulyadi Effendi, MA., Kepala Kantor Kemenag Kota Serang Abdul Rojak, Camat Serang, serta para santri dan santriwati.

Yandri yang mengikuti perjalanan ponpes Al Mubarak, menyatakan rasa bangga, senang, dan sekaligus haru dengan Ponpes Al Mubarak yang kini memasuki usia seperempat abad. “Perjalanan Ponpes ini sangat luar biasa. Karena itu, atas nama lembaga negara MPR RI, kami memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada

Ponpes Al Mubarak,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN ini mengharapkan, ponpes ini tidak pernah berhenti memberikan kontribusi positif untuk umat, bangsa, dan negara. Sebab, tantangan yang dihadapi bangsa dan negara cukup berat. Pada waktu lalu, kata Yandri, saat memperjuangkan kemerdekaan, para santri dan ulama, serta para syuhada, menghadapi musuh yang wujudnya sangat jelas, yaitu tentara Belanda, Jepang, Inggris. Itulah musuh bangsa Indonesia. Tapi saat ini, musuh yang dihadapi adalah narkoba, minuman keras, dekadensi moral, dan lainnya.

“Hari ini musuh yang dihadapi bangsa Indonesia remang-remang, bahkan tidak



kelihatan tapi selalu menyerang setiap saat. Musuh itu adalah narkoba, minuman keras, dekadensi moral, rongrongan dari dunia maya dan lainnya,” ujar anggota Komisi VIII DPR Ini.

Yandri mencontohkan peristiwa pesta LGBT di Palangkaraya yang viral di media sosial. Dalam pesta itu, para pria berperilaku mesum sesama jenis. “Ini menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, Yandri berharap, Ponpes Al Mubarak bisa membentengi generasi muda dari penyakit masyarakat itu. “Jangan sampai Banten yang katanya serambi Mekah di Pulau Jawa tercemari berbagai penyakit sosial itu. Untuk narkoba, Banten sudah masuk kategori zona merah. Perkembangan miras dan LGBT di Banten juga cukup mengkhawatirkan,” katanya.

Menurut Yandri, Ponpes Al Mubarak sudah

membuktikan dengan kiprah dan kontribusinya selama seperempat abad usianya. “Kalau ada penghargaan tingkat nasional, saya akan mengusulkan Ponpes Al Mubarak karena layak mendapat penghargaan itu,” ujarnya.

Komitmen Ponpes Al Mubarak terlihat dari alumni Ponpes ini yang tersebar di Indonesia dan menyebarkan kebaikan. “Ponpes ini membantu kerja-kerja keumatan dan kebangsaan. Saya sebagai keluarga besar Ponpes Al Mubarak siap untuk membesarkan pesantren ini sehingga ke depan Ponpes ini menjadi nomor satu di Banten,” pungkasnya.

Ponpes Al Mubarak berada di kota Serang, Banten. Berdiri pada Kamis, 10 Oktober 1997. Ponpes ini bermula dari tanah hibah seluas 1.200 meter kepada Yayasan Al Mubarak. Kini, Ponpes Al Mubarak berkembang hingga luas area mencapai 3 hektare. Selama seperempat abad Ponpes Al Mubarak yang mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum telah mengalami perkembangan, baik sarana dan prasarana maupun jumlah santri dan santriwati.

Rangkaian peringatan Milad ke-25 Ponpes Al Mubarak berlangsung 28 September sampai 10 Oktober 2022, dengan rangkaian acara di antaranya ziarah ke makam, beragam perlombaan, dan panggung gembira. □

Jakarta

Langkah Cepat dan Tepat Atasi Gagal Ginjal Akut

Sosialisasi masif alternatif obat penurun panas yang aman harus segera dilakukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian.

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan, terus bertambahnya penderita gagal ginjal akut yang meninggal harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah yang cepat dan tepat.

“Sosialisasi alternatif obat penurun panas anak yang aman harus masif dilakukan,” kata Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/10). Menurut Rerie, sosialisasi masif alternatif

obat penurun panas yang aman harus segera dilakukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat per-Selasa (18/10) jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari total jumlah penderita itu, 99 di antaranya meninggal dunia.

Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indo-

nesia (IDAI) telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus tersebut.

Gangguan ginjal akut misterius itu diduga karena keracunan (intoksikasi) etilen glikol, seperti yang terjadi di Gambia. Puluhan anak di negara itu meninggal karena mengonsumsi parasetamol sirup yang mengandung senyawa etilen glikol.

Menurut Lestari, upaya pencegahan harus dilakukan dengan segera lewat langkah-langkah yang terukur.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dia menyarankan, penguatan upaya pengawasan terhadap kandungan bahan berbahaya pada obat-obatan yang beredar di tanah air harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Selain itu, ujar Rerie, informasi terkait sejumlah langkah alternatif obat penurun panas yang aman bagi anak harus masif dilakukan. Para pemangku kepentingan juga harus mampu memberikan informasi yang pasti terkait sejumlah obat penurun panas yang mengandung bahan berbahaya bagi anak.

Jangan sampai, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, ketidakpastian informasi terkait obat yang berbahaya dan cara aman untuk menurunkan panas anak menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat.

Penanganan kasus yang menasar anak-anak sebagai korban ini, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus benar-benar ditangani hingga tuntas untuk mencegah pertambahan jumlah kematian anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Di masa sering terjadinya cuaca ekstrim yang rawan penyebaran penyakit saat ini, Rerie mendorong agar pola hidup sehat di setiap keluarga harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap anggota keluarga dari ancaman penyakit.*

Upaya Pencegahan Harus Konsisten dan Terukur

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyarankan agar pencegahan penyebaran penyakit harus didasari kebijakan yang konsisten dan terukur untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

“Upaya menemukan penyebab gangguan ginjal akut pada anak harus terus dilakukan. Para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penyakit tersebut menyebar lebih luas,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah meneliti kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Sementara, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan temuan kasus gagal ginjal akut yang menyerang 131 anak di Indonesia.

Diduga kasus ini dipicu oleh konsumsi obat yang mengandung etilen glikol, merupakan senyawa organik tak berwarna maupun berbau dan berkonsistensi kental seperti sirup pada suhu kamar. Dugaan tersebut merupakan hasil diskusi dengan tim dari Gambia yang mempunyai kasus serupa.

Pemerintah hingga kini belum menemukan bakteri atau virus spesifik yang menyebabkan terjadinya gangguan ginjal

akut tersebut.

Menurut Lestari, upaya pencegahan sambil konsisten mengkaji penyebab gangguan penyakit tersebut harus dilakukan untuk mencegah merebaknya penyakit itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, sosialisasi masif terkait gejala penyakit yang menyerang ginjal pada anak itu harus dilakukan agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam proses pencegahan tersebut. Keterlibatan semua pihak dalam mencari penyebab gangguan ginjal pada anak ini, menurut Rerie, sangat diperlukan untuk mempercepat upaya Pemerintah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pemerintah daerah juga ikut aktif mendorong percepatan pengkajian dan pencegahan penyakit yang di Gambia telah menelan korban puluhan anak meninggal dunia.

Menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, langkah-langkah pencegahan sejak dini harus dilakukan lewat berbagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman gangguan penyakit itu.

Kepedulian masyarakat tentang asupan yang dikonsumsi anak dalam keseharian, tegas Rerie, juga harus ditingkatkan dan diarahkan pada konsumsi asupan yang sehat dan bergizi sesuai standar kesehatan yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak menjadi lebih baik. □

Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Pentingnya Kesetaraan Gender

Ketimpangan gender bukanlah satu-satunya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Persoalan lain yang mengemuka adalah adanya kekerasan berbasis gender justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, perjuangan keadilan dan kesetaraan gender merupakan legasi kesejarahan yang telah diwariskan sejak 114 tahun lalu oleh Raden Ajeng Kartini. Dengan segala keterbatasannya sebagai seorang perempuan, Kartini berani menghadapi tantangan zaman, memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita dalam bidang pendidikan. Meskipun memiliki akar kesejarahan yang cukup dalam, namun pada kenyataannya, hingga saat ini keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut dapat dirujuk dari beberapa indikator, antara lain dari indeks ketimpangan gender. Berdasarkan laporan Global Gender Gap Report 2022 yang dirilis World Economic Forum pada bulan Juli 2022 lalu, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia berada di kisaran 0,697 (pada skala 0 sampai dengan 1), dan berada pada peringkat ke-92 dari 146 negara. Rendahnya peringkat ketimpangan gender di Indonesia ini berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik yang masih berada di bawah rata-rata global.

“Sebagai pembanding, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata indeks pemberdayaan gender nasional tahun 2021 tercatat berada pada kisaran 76,26, pada skala 0 sampai 100. Yang menjadi persoalan adalah belum meratanya tingkat pemberdayaan gender, di mana masih ada beberapa daerah, khususnya di beberapa wilayah Indonesia bagian timur yang nilai indeks pemberdayaan gendernya di bawah 40, sementara di beberapa daerah lain justru memiliki skor di atas 80,” ujar Bamsoet dalam sambutan secara daring pada Rapat Kerja Nasional ke-5 Forum Pemberdayaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perempuan Indonesia (FPPI), di Jakarta, Sabtu (15/10/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, ketimpangan gender bukanlah satu-satunya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Persoalan lain yang mengemuka adalah adanya kekerasan berbasis gender yang seiring dengan kemajuan dan modernitas zaman, justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Sepanjang periode tahun 2012 hingga 2021, tercatat angka kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah kasus kekerasan berbasis gender tahunan meningkat tajam, dari 135.170 kasus pada tahun 2012, meningkat 150 persen menjadi 338.496 kasus pada tahun 2021,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, hasil survei yang dilakukan bersama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlingungan Anak, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, menemukan bahwa 1 dari 19 perempuan di usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual. Bahkan survei lain yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman mencatat bahwa selama masa pandemi Covid-19 lebih dari 78% responden yang disurvei menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik.

“Berbagai data hasil survei tersebut mengisyaratkan pesan penting dan krusial bahwa perilaku dan tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan akut yang harus mendapatkan perhatian serius dari segenap elemen bangsa. Kita patut bersyukur bahwa setelah 10 tahun ‘mangkrak’, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tanggal 12 April 2022. Lahirnya undang-undang ini tentunya menjadi oase di tengah dahaga akan hadirnya perlindungan dan keadilan bagi kaum perempuan,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPPI ini menambahkan, jika merujuk pada landasan Konstitusi, sesungguhnya semangat kesetaraan gender pun sudah tersirat pada perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi merujuk individu subjek hukum dengan sebutan ‘setiap orang’ atau ‘setiap warga negara’, dan tidak ada satu pasal pun yang merujuk pada status gender pria atau wanita.

“Yang perlu kita sadari bersama bahwa landasan legalitas hanya akan bermakna ketika dihadirkan dalam ruang realita. Seberapa pun lengkap dan rigid aturan dibuat, tidak akan bermakna apa apa tanpa adanya niat dan itikad baik, kesungguhan komitmen, dan kebulatan tekad dalam implementasinya,” pungkask Bamsoet. □

Terima Pengurus PAPDESI

Bamsoet Dorong DPR RI dan Pemerintah Selesaikan Revisi Undang-Undang Desa

Revisi Undang-Undang Desa harus didasarkan pada semangat peningkatan pemerintahan desa, agar bisa semaksimal mungkin memakmurkan masyarakat desa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) yang mendorong pemerintah bersama DPR RI bisa menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, yang diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

“Beberapa aspirasi PAPDESI, antara lain tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, syarat domisili calon kepada daerah dan perangkat desa, penggunaan dana desa, persentase besaran penghasilan tetap sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Serta berbagai aspirasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Bumdes, dan perangkat desa lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT bisa menjadi leading sector dalam menindaklanjuti aspirasi PAPDESI ini,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PAPDESI, di Jakarta, Selasa (11/10/22). Pengurus PAPDESI yang hadir, antara lain Ketua Umum Wangiyati, Dewan Kehormatan Jatim Supratman, Ketua DPD Jabar Halim Sukaeri, Ketua DPD Jogja Wahyudi Anggoro Hadi, ketua DPD Banten Ahmad Wahyudin Nasar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, revisi Undang-Undang Desa harus didasarkan pada semangat peningkatan pemerintahan desa, agar bisa semaksimal mungkin memakmurkan masyarakat desa. Sehingga perangkat desa bersama masyarakat desa bisa memanfaatkan penggunaan dana desa secara tepat sasaran dan tepat guna.

“Dalam APBN 2023, pemerintah dan DPR

RI telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Dengan arah kebijakan penggunaan dana desa, antara lain untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, secara keseluruhan, sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015 hingga di tahun 2022 ini, jumlah dana desa yang tersalurkan ke masyarakat sudah mencapai sekitar Rp 400,1 triliun. Antara lain digunakan untuk membangun 227.000 Km jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 Bumdes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500 penahan tanah.

“Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran dan tepat guna, misalnya melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrim. Mengingat dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14% atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89%. Sedangkan di pedesaan mencapai 13,10%.

Pemerintah menargetkan, pengentasan kemiskinan ekstrim pada 2021 sebanyak 35 kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan di 138 kabupaten/kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 kabupaten/kota untuk 37.523 desa,” pungkas Bamsoet. □

Semoga Forum MPR Dunia Menjadi Torehan Perjalanan Sejarah Dunia

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, berharap, bila nanti Forum MPR Dunia terbentuk dan berperan aktif di dunia internasional maka ini merupakan kebanggaan bagi rakyat, karena MPR RI mampu memberikan kontribusi buat rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2022. Konferensi ini sebagai curah pendapat pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lain yang nanti disepakati para delegasi.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA., menyebutkan, kehadiran Forum MPR Dunia akan melengkapi dan menguatkan peran Indonesia di berbagai organisasi dunia, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, Liga Muslim Dunia. Keberadaan forum ini harus didorong agar lebih mendunia sehingga Indonesia sebagai penggagas utama Forum MPR Dunia kembali memainkan peran sentral dalam organisasi dunia dan gerakan internasional.

“Dulu, pendahulu kita pernah menggagas ASEAN, Gerakan Non blok, sampai yang fenomenal, yakni Konferensi Asia Afrika. Saatnya kita menggagas kembali organisasi internasional yang lebih luas cakupannya, lebih inklusif, dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah global,” kata Syarif Hasan, di Jakarta, Ahad (23/10).

Menurut Syarif Hasan, bila Forum MPR Dunia terbentuk dan bisa berperan aktif di dunia internasional maka ini merupakan kebanggaan bagi rakyat, karena MPR RI mampu memberikan kontribusi buat rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia. “MPR mampu membawa musyawarah ke tingkat Internasional. Dan, mudah-mudahan Forum MPR Dunia bisa menjadi torehan dalam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

perjalanan sejarah dunia saat ini maupun masa yang akan datang, sejajar dengan KAA, Gerakan Non Blok, ASEAN, yang mengharumkan nama bangsa Indonesia hingga kini,” katanya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, inisiasi MPR untuk membentuk Forum MPR Dunia atau nama lainnya adalah representasi dari amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Pada awalnya forum ini bernama Majelis Syuro Dunia, namun untuk tujuan yang lebih besar memfasilitasi MPR Dunia maka teretuslah World Forum Peoples Consultative Assembly (Forum MPR Dunia),” jelasnya.

Forum ini, lanjut Syarif Hasan, menjadi

wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem dua kamar, terutama negara-negara berpenduduk muslim. Negara yang mempunyai sistem majelis permusyawaratan, majelis syura, atau nama sejenis lainnya bisa bergabung dalam forum ini. Negara-negara anggota kerja sama Islam memang menjadi sasaran awal untuk bergabung dalam forum ini. Negara-negara di luar anggota kerja sama Islam juga bisa bergabung karena masalah dunia dirasakan semua warga tanpa melihat agama dan sistem politiknya.

“Saya mendorong agar Forum MPR Dunia ini tidak hanya pada negara-negara Islam, tetapi diperluas ke negara-negara lain agar terjadi kolaborasi untuk tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban serta untuk menyelesaikan masalah global,” ujarnya.

Syarief mengakui, memang sudah ada lembaga kerja sama antarpalemen, namun belum ada lembaga kerja sama antarmajelis permusyawaratan atau majelis syura, atau lembaga sejenis lainnya. “Saya rasa lembaga atau organisasi seperti Forum MPR Dunia mesti ada dan tetap penting. Sebab, forum ini akan menyempurnakan kerja sama palemen yang sudah ada. Jika perbincangan masalah dunia di forum lain tidak mencapai titik temu maka di Forum MPR Dunia bisa lebih disempurnakan. Kerja sama tidak hanya DPR saja, tapi juga majelis permusyawaratan atau majelis syura, atau nama sejenis lainnya juga harus dimaksimalkan,” paparnya.

“Masalah global seperti isu perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan, perlu disikapi secara serius dengan melibatkan negara maju dan berkembang dengan berbagai sistem parlemennya masing-masing,” imbuhnya. □

Bandung

Bilateral di Sela Konferensi Internasional Lembaga MPR di Bandung

Di sela acara Konferensi Internasional Pembentukan Forum Consultative Assembly di Bandung (24-26 Oktober 2022) berlangsung pertemuan bilateral Pimpinan MPR RI dengan beberapa negara, pimpinan delegasi peserta konferensi. Pertemuan bilateral itu adalah sebagai berikut:



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pimpinan MPR RI dan Pimpinan Dewan Syuro Republik Yaman

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menekankan, Indonesia berharap konflik berkepanjangan yang terjadi di Yaman bisa segera berakhir secepat mungkin. Terlebih sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman, Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, bahwa pemerintah Yaman bersedia berdialog

dengan kelompok Houthi untuk segera mengakhiri konflik tersebut.

Indonesia sangat menghormati kedaulatan setiap negara, sekaligus menentang berbagai tindakan pemberontakan maupun penjajahan yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang dapat mengganggu stabilitas kedaulatan sebuah negara merdeka. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Pembukaan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, juga mengamanatkan bahwa tujuan pemerintahan negara Indonesia salah satunya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua amanat konstitusi inilah yang mendorong MPR RI menggagas pembentukan Forum for World Consultative Assembly (Forum Consultative Assembly) untuk memaksimalkan fungsi diplomasi keparlemen guna berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian, peradaban, toleransi, dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dunia,” ujar Bamsuet usai menerima Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman, Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, disela Konferensi Internasional pembentukan Forum Consultative Assembly, di Bandung, Senin malam (24/10/22).

Turut hadir, antara lain, Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Abdulghani Nassr Ali Al Shamiri, serta Kepala Kantor Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman Gaber Hebat Allah Gaber. Hadir pula para pimpinan MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi dukungan Yaman terhadap gagasan MPR RI membentuk Forum Consultative Assembly. Melalui Forum ini, Yaman dan juga berbagai negara lainnya diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya tentang kondisi apapun yang dihadapi dunia, termasuk tentang konflik yang terjadi di negaranya. Sehingga, nantinya, Forum bisa berkontribusi mencari solusi yang komprehensif dalam



menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berbagai negara dunia.

“Dukungan Yaman tersebut tidak lepas dari hubungan bilateralnya dengan Indonesia selama ini sudah terjalin dengan baik, karena kedua bangsa memiliki kaitan emosional dan historis, khususnya terkait dengan sejarah penyebaran agama Islam ke Indonesia di masa lampau. Kerjasama Indonesia dan Yaman selama ini terfokus pada penguatan kerjasama ekonomi serta peningkatan diplomasi sosial budaya. Selama periode 1990-2015, hubungan perdagangan Indonesia dan Yaman telah meningkat cukup pesat. Bahkan di bidang pendidikan dan keagamaan telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif karena kedua negara telah memiliki payung hukum kerjasama tersebut. Namun, kemudian menjadi tersendat akibat konflik di Yaman yang terus berkelanjutan, khususnya pada periode 2014-2015,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI menyambut baik berbagai permintaan Yaman kepada Indonesia. Antara lain, tawaran agar Indonesia bisa memanfaatkan tenaga pendidik dari Yaman yang bergelar doktor hingga profesor untuk mengajar di Indonesia, karena akibat konflik berkepanjangan mereka tidak bisa mengajar di Yaman. Yaman juga meminta bantuan Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada rakyatnya untuk menempuh pendidikan di Indonesia, khususnya di berbagai disiplin ilmu yang dapat berguna untuk membangun kembali Yaman pasca konflik, seperti di bidang studi arsitektur dan teknik.

“Sebagai sahabat, MPR RI akan mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk memberikan perhatian lebih terhadap rakyat Yaman. Dasarnya adalah kemanusiaan, membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah, tanpa perlu mencampuri urusan dalam negerinya,” pungkas Bamsoet. □

Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Parlemen Aljazair

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi dukungan Parlemen Aljazair



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terhadap gagasan MPR RI membentuk Forum for World Consultative Assembly (Forum Consultative Assembly). Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Parlemen (Dewan Bangsa) Aljazair, Salim Chenoufi, bahwa bagi bangsa Aljazair, segala niat baik yang dilakukan Indonesia akan didukung. Hal ini tidak lepas dari hubungan diplomatik Indonesia - Aljazair yang mempunyai akar kesejarahan yang sangat mendalam.

“Ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung tahun 1955, pada saat itu Aljazair masih dijajah Prancis. Presiden Soekarno mengundang para pejuang kemerdekaan Aljazair untuk menghadiri KAA, sebagai bentuk manifestasi nyata dari amanat konstitusi Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan,” ujar Bamsoet usai menerima

Parlemen Aljazair, disela penyelenggaraan Konferensi Internasional pembentukan Forum Consultative Assembly, di Bandung, Senin malam (24/10/22).

Turut hadir antara lain, Wakil Ketua Parlemen Aljazair, Salim Chenoufi, serta para anggota Parlemen Aljazair: Kamel Chourak, Mabrouk Dridi, dan Abdelhamid Boucherma. Hadir pula pimpinan MPR RI, antara lain Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia senantiasa menjadi negara yang aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair. Sekaligus menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Aljazair pada 5 Juli 1962. Buah dari ini semua, sebagaimana kembali disampaikan Wakil Ketua Parlemen (Dewan Bangsa)



Aljazair, Salim Chenoufi, bahwa sejak kecil anak-anak Aljazair selalu diajarkan untuk menghargai Indonesia.

“Tidak heran jika pada April 2005 lalu, saat pemerintah Indonesia menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika sebagai peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika turut hadir. Kini saat MPR RI menyelenggarakan konferensi internasional pembentukan Forum Consultative Assembly, Parlemen Aljazair juga turut hadir dan memberikan dukungan,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dengan mengusung spirit yang sama seperti penyelenggaraan KAA 1955 dan KTT 2005 di Bandung, akan menjadi dorongan bagi parlemen Indonesia dan Aljazair untuk menyukseskan penyelenggaraan konferensi internasional pembentukan Forum Consultative Assembly yang dilaksanakan pada 24-26 Oktober 2022 di Bandung.

“Melalui Forum Consultative Assembly, Indonesia dan Aljazair dapat bekerjasama mendorong penguatan kolaborasi antarkomunitas internasional, untuk mewujudkan tatanan dunia yang damai dan harmonis. Sekaligus dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Aljazair di berbagai bidang. Indonesia menilai Aljazair sebagai pasar yang cukup potensial bagi komoditi ekspor Indonesia, khususnya lemak dan minyak nabati, selain kopi, teh, dan rempah-rempah,” pungkas Bamsuet. □

Pimpinan MPR RI dengan Ketua Dewan Nasional Negara Palestina

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan, Indonesia senantiasa berada di garis terdepan dalam mendukung Palestina agar bisa merdeka seutuhnya dari penjajahan Israel. Hal ini tercermin dalam spirit Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (KAA 1955) yang diprakarsai Presiden Soekarno. Kemerdekaan Palestina juga menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan oleh negara-negara peserta KAA 1955, karena dari berbagai negara peserta yang hadir, hanya Palestina yang

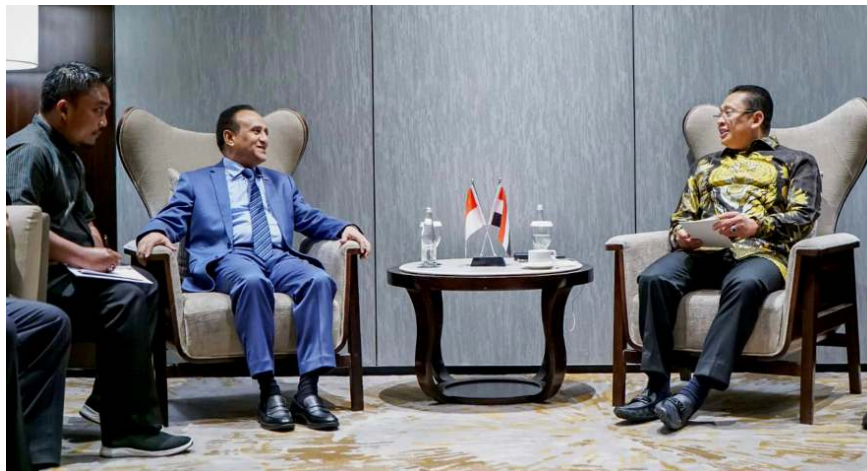


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hingga kini belum menikmati kemerdekaan yang utuh.

Bahkan, Presiden Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.

“Dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2012, dari 193 negara anggota PBB, 138 menyetujui peningkatan status Palestina dari ‘entitas’ menjadi ‘negara pengamat non-anggota’, sembilan negara menolak, dan 41 tidak memberikan suara. Walaupun sudah menjadi angin segar, status tersebut belum memberikan kemerdekaan seutuhnya bagi Palestina. Sehingga perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina dari konflik berkepanjangan dengan

Israel belum tuntas,” ujar Bamsuet saat menerima Ketua Dewan Nasional Negara Palestina, Rahwi A.M. Fatouh, di sela penyelenggaraan Konferensi Internasional pembentukan World Consultative Assembly Forum, di Bandung, Selasa (25/10/22).

Delegasi Parlemen Palestina yang hadir antara lain, Deputy of Speaker Mr. Fahmi S.N. Zarir, Assistant Mr. Sameh A.S.Qettami, Counsellor Embassy Mr. Ahmed M.I Metani dan Mr. Muammar M.H.Milhim.

Hadir mendampingi Bamsuet, Pimpinan MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, spirit KAA 1955 untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut kini juga dibawa kembali melalui pembentukan World Consultative



Assembly Forum yang digagas MPR RI dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena salah satu isu yang dibahas dalam forum ini menyangkut berbagai isu kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, dan perdamaian antarbangsa.

“Komitmen Indonesia dalam membantu Palestina tidak perlu diragukan. Pada saat Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022), menghasilkan beberapa MoU. Antara lain, MoU Pembangunan Kapasitas untuk Mendukung Pendirian Otoritas Obat dan Makanan Independen di Palestina,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina. Selain itu, Indonesia juga senantiasa menyalurkan berbagai bantuan kepada Palestina melalui berbagai jalur, seperti UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan ICRC (International Committee of the Red Cross),

“Bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina tidak hanya dilakukan melalui negara, melainkan juga melalui masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada Agustus 2022 sudah memperbaharui MoU dengan Wali Kota Hebron terkait pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron (RSIH),” pungkas Bamsoet. □

Pimpinan MPR RI dengan Mohamad Ali Bin Mohamad, Deputy President House of Senate Malaysia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi dukungan Parlemen Malaysia sebagaimana disampaikan Deputy Presi-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dent House of Senate Malaysia, Mohamad Ali Bin Mohamad, yang mendukung langkah MPR RI menyelenggarakan Konferensi Internasional Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly lainnya.

Konferensi dihadiri 15 parlemen dari berbagai negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta dua lembaga internasional, terdiri dari Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) dan Muslim World League (Liga Muslim Dunia).

“Saat penutupan konferensi pada 26 Oktober 2022, delegasi Parlemen Malaysia mewakili para peserta konferensi membacakan Deklarasi Bandung (*Bandung Declaration*), sebagai sebuah kesepakatan bersama untuk membentuk World Consultative Assembly Forum ataupun nama lainnya

yang disepakati oleh para peserta konferensi,” ujar Bamsoet saat menerima Deputy President House of Senate Malaysia, Mohamad Ali Bin Mohamad, di sela penyelenggaraan Konferensi Internasional Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly lainnya dari berbagai negara anggota OKI, di Bandung, Selasa (25/10/22).

Hadir mendampingi Bamsoet, Pimpinan MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dukungan Parlemen Malaysia tersebut menggambarkan betapa kuatnya hubungan Indonesia dengan Malaysia sebagai negara serumpun. Terlebih kedua negara merupakan pemain utama dalam industri minyak sawit dunia.



“Indonesia dan Malaysia menyumbang lebih dari 85% ekspor minyak sawit dunia. Bagi Malaysia, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-9 dan mitra dagang ASEAN terbesar ke-3. Sedangkan bagi Indonesia, Malaysia adalah mitra dagang terbesar ke-5, dengan total perdagangan kedua negara pada tahun 2020 lalu mencapai USD 14 miliar,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain mempromosikan kerjasama ekonomi, Indonesia dan Malaysia juga bisa mempromosikan semangat moderasi beragama melalui World Consultative Assembly Forum ataupun nama lainnya yang disepakati para peserta konferensi. Indonesia adalah bangsa yang majemuk sejak kelahirannya, di mana dari 273 juta penduduk menganut 6 agama berbeda yang diakui oleh negara, serta puluhan aliran kepercayaan.

“Begitupun dengan Malaysia yang komposisi masyarakatnya memiliki banyak etnis dan budaya. Dengan kemajemukan tersebut, moderasi dalam kehidupan beragama menjadi faktor kunci terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Melalui semangat moderasi beragama, masyarakat Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa antarpenduduk beragama, yakni penduduk muslim dan penduduk beragama lainnya, bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain,” pungkas Bamsuet. □

Pimpinan MPR RI dengan Delegasi Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyambut hangat rencana kunjungan Presiden Iran ke Indonesia, yang dijadwalkan akan datang sekitar Januari atau Februari 2022. Sekaligus mengapresiasi peran delegasi Iran yang telah berperan aktif mendukung gagasan MPR RI membentuk Consultative Assembly Forum, sebuah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya.

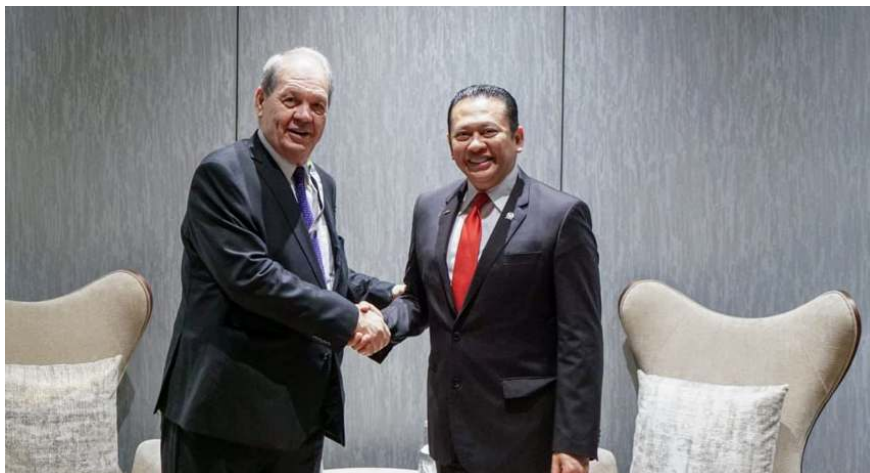


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Kerjasama dalam pembentukan Consultative Assembly Forum ini semakin menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Iran yang selama ini terfokus pada peningkatan diplomasi ekonomi. Tercatat nilai perdagangan kedua negara naik sepanjang dua tahun terakhir, dari sekitar USD 142 juta pada tahun 2019 menjadi USD 216 juta di tahun 2020,” ujar Bamsuet usai menerima delegasi Iran dalam Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya, di Bandung, Rabu (26/10/22).

Iran dan Indonesia juga, kata Bamsuet, dapat bekerjasama menjadi jembatan bagi dua pasar besar ASEAN dan ECO (Economic Cooperation Organization) yang mencakup negara-negara, seperti Azerbaijan, Afghanistan, Iran, Kazakhstan,

Kirgistan, Pakistan, Turki, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Delegasi Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran yang hadir antara lain, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Dr. Abolfazl Amoei, dan Anggota Majelis Dr. Ebrahim Rezaei. Hadir pula Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Dr. Mohammad Khoush Heikal Azed. Serta para pimpinan MPR RI, antara lain, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sejak Februari 2006, Indonesia dan Iran telah memiliki persetujuan bilateral yang membebaskan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Sejak April 2006 kedua Pemerintah juga telah mengesahkan kebijakan



pemberian *visa on arrival* bagi pemegang paspor biasa bagi kedua negara yang melakukan kunjungan singkat ke masing-masing negara.

“Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan Iran ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata KBRI menerbitkan sekitar 500 visa berbagai jenis per tahun. Umumnya wisatawan Iran berkunjung ke Indonesia bukan semata untuk berlibur, namun juga untuk kegiatan dagang. Mereka datang berkunjung dan berbelanja di pusat-pusat perdagangan, seperti Mangga Dua atau Tanah Abang di Jakarta untuk kemudian dikirim ke Iran,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menerangkan, hubungan *people to people contact* antara Iran dan Indonesia telah terjalin sejak di masa

Pimpinan MPR RI dengan Ketua Senat Pakistan, Muhammad Sadiq Sanjrani

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Pakistan terhadap gagasan MPR RI membentuk Consultative Assembly Forum, sebuah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis lainnya sebagai bagian dari PUIC (Parliamentary Union of the OIC Members States/Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam). Dukungan Pakistan tersebut semakin meningkatkan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin sejak 72 tahun lalu. Terlebih Indonesia dan Pakistan juga pernah bersama-sama menjadi inisiator di Konferensi Asia Afrika 1955.

“Hubungan Indonesia dengan Pakistan

Muhammad Zubair Thaheem, dan Sekretaris Utama Ketua Senat Pakistan Mr. Haris Rehman.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, Pakistan termasuk dalam 5 besar penyumbang surplus perdagangan Indonesia dengan kelapa sawit sebagai komoditas utama. Kedua negara juga konsisten membantu perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional yang kini semakin dikuatkan dengan kehadiran Consultative Assembly Forum.

“Melalui forum tersebut, Indonesia dan Pakistan dapat saling memperkuat diplomasi antarpemerintah di negara masing-masing, sebagai wujud kontribusi nyata dalam upaya menghadirkan tatanan dunia yang harmonis, berkemajuan dan berkeadilan. Sehingga bisa memaksimalkan fungsi diplomasi keparlemen guna berkontribusi untuk perdamaian, peradaban, toleransi, dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dunia,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kedekatan hubungan Indonesia dengan Pakistan juga tercermin dalam berbagai kunjungan Presiden Indonesia ke Pakistan. Presiden RI pertama Ir. Sukarno tercatat melakukan enam kali kunjungan ke Pakistan. Hampir semua Kepala Negara RI berikutnya juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan, yaitu Presiden Soeharto pada 1980, Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000, Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005, dan Presiden Joko Widodo pada 2018.

“Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan Pakistan kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1995 Pemerintah Indonesia memberikan Penghargaan Bintang Adipurna Kelas Satu kepada Muhammad Ali Jinnah, Bapak Bangsa Pakistan. Selain itu, para tentara muslim yang ‘membelot’ dari pemerintah Inggris atas perintah pejuang Pakistan Muhammad Ali Jinnah, dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia juga dianugerahi penghargaan Independence War Awards,” pungkas Bamsuet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lampau. Sejarah mencatat, para saudagar Iran (Persia) sejak ribuan tahun lalu sudah melalui ‘jalur sutra’ ataupun ‘jalur rempah’ mendatangi nusantara, melakukan interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat setempat hingga melakukan aktivitas perdagangan.

“Karena kuatnya ikatan emosional yang dihasilkan dari eratnya interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Iran, tidak heran jika di Indonesia terdapat beberapa tradisi sosial, budaya dan keagamaan yang mirip dengan di Iran. Sebagai contoh, terdapat sekitar 400 kosakata bahasa Persia yang kini diserap dalam bahasa Indonesia keseharian, seperti kata saudagar dan tajir,” pungkas Bamsuet. □

merupakan hubungan yang sangat spesial yang didirikan berdasarkan pandangan agama yang sama, di mana Indonesia dan Pakistan adalah dua negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Kesamaan visi ini dapat dikembangkan menjadi kerjasama di berbagai bidang yang lebih produktif dan komprehensif, bukan hanya bagi kemajuan Indonesia dan Pakistan melainkan juga bagi negara-negara berpenduduk muslim lainnya di berbagai belahan dunia,” ujar Bamsuet usai menerima Ketua Senat Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, di Bandung, Rabu (26/10/22).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Sekretaris Gabungan Senat Pakistan Mr.



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Bersama Melangkah Dalam Era Transisi Energi Mewujudkan NZE

NET Zero Emission (NZE) atau netralitas karbon tahun 2060 menjadi agenda kerja dan proses berkelanjutan untuk transisi penggunaan energi, dari energi fosil yang polutif ke energi bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, hasil dari pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dengan tersedianya sumber-sumber energi bersih yang lebih dari memadai dan beragam, Indonesia diyakini mampu merealisasikan NZE pada waktunya.

Namun, sebagaimana sudah dipahami bersama, transisi energi tidak bisa berlangsung cepat. Tak hanya inovasi, melainkan juga perlu kerja dan proses berkelanjutan yang konsisten, dengan durasi waktu hingga puluhan tahun. Sebab, dalam tahap transisi itu, harus diupayakan teknologi baru untuk memproses ragam sumber energi menjadi energi bersih siap pakai. Sudah barang tentu butuh investasi, termasuk menyediakan infrastruktur energi untuk interkoneksi jaringan.

Komitmen merealisasikan NZE merupakan bagian dari upaya komunitas global merawat dan merevitalisasi bumi yang tengah berselimut krisis iklim. Sejumlah penelitian sudah membuktikan bahwa penggunaan atau pembakaran energi fosil untuk industri dan transportasi yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir menjadi penyumbang terbesar gas karbon dioksida (CO₂)—juga dikenal sebagai gas rumah kaca (GRK).

GRK yang semakin tebal di atmosfer otomatis berfungsi sebagai penyekat panas matahari ke bumi. Suhu bumi dengan sendirinya meningkat, yang pada gilirannya memengaruhi semua aspek kehidupan

manusia. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pemanasan global tak hanya berdampak pada kuantitas dan kualitas air, tetapi juga menghadirkan dampak cukup serius terhadap aspek kesehatan manusia.

Fakta tentang eksekusi kenaikan suhu bumi itulah yang mendorong komunitas global bersepakat dalam Perjanjian Paris pada 2015 bagi upaya mitigasi, adaptasi, dan upaya lain untuk merespons perubahan iklim. Sebanyak 195 negara yang menandatangani Perjanjian Paris bersepakat mengurangi emisi CO₂ dan GRK lain untuk meminimalisir pemanasan global pada level di bawah dua (2) derajat Celsius.

Indonesia ikut menandatangani Perjanjian Paris itu. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Paris, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 menunjukkan kesungguhan dengan menetapkan target NZE pada kisaran waktu tahun 2050-2070. G20 tidak menyeragamkan upaya, melainkan diserahkan kepada kemampuan setiap negara anggota berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, ketersediaan sumber energi, dan perkembangan teknologi masing-masing negara anggota.

Peta jalan (road map) transisi energi Indonesia sudah dirancang. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan ambisi Indonesia untuk merealisasikan NZE pada 2060, atau lebih cepat. Untuk pencapaian target itulah model kebijakan energi nasional dewasa ini telah mengarah pada transisi energi dimaksud. Dan, demi konsistensi kerja dan proses, transisi energi tak boleh dihentikan atau diubah-ubah. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang dirumuskan MPR RI akan memastikan bahwa rangkaian tahap transisi energi akan terus berkelanjutan, kendati figur kepala

pemerintahan RI berganti nantinya.

Dalam rangkaian tahap transisi energi di Indonesia sudah ditetapkan bahwa energi fosil masih digunakan sebagai perantara. Seperti diketahui bersama, untuk penyediaan daya listrik selama ini, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Sedangkan sektor transportasi di dalam negeri pun masih mengandalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari energi fosil.

Ketika waktunya tiba, penggunaan energi fosil akan dikurangi. Bersamaan dengan berkurangnya penggunaan energi fosil, pemerintah dan semua elemen masyarakat harus bertekad memanfaatkan sumber-sumber energi lain, seperti angin, air, serta sinar matahari. Para ahli sudah menghitung bahwa di Indonesia, kekuatan tiga sumber energi ini lebih dari memadai. Sayangnya, sejauh ini belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Kini, dengan tumbuhnya kesadaran akan urgensi penggunaan energi bersih, negara dan segenap elemen masyarakat hendaknya mulai lebih bersungguh-sungguh mengembangkan dan mengolah angin, air, dan matahari menjadi energi untuk berbagai kebutuhan. Apalagi, mengembangkan dan mengolah angin, air, serta matahari sebagai sumber energi sudah dikenal dan dicoba, walaupun oleh kalangan terbatas.

Di masa lalu, misalnya, eksperimen hingga proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sudah coba dikembangkan dengan hasil yang cukup menjanjikan. Namun, karena belum adanya kesungguhan dan minimnya tanggapan, gagasan-gagasan seperti itu tidak segera berkembang. Bersyukur bahwa akhir-akhir ini sejumlah pihak telah berinisiatif membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Dalam road map transisi energi, ditetapkan perlunya sejumlah inisiatif dan kebijakan yang akan mengubah kebiasaan selama ini. Misalnya, dimunculkan dorongan untuk penggunaan kompor listrik, lampu LED, serta peningkatan penggunaan gas di perkotaan. Selain

itu, pemerintah terus berupaya agar target bauran energi nasional dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dapat diwujudkan.

Untuk mempercepat pencapaian target bauran 23% itu, pemerintah mendorong masyarakat meningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), karena potensinya berlimpah dan pembiayaannya makin terjangkau. Menurut data Kementerian ESDM per Juni 2022, sumber EBT telah menghasilkan listrik hingga 17,89 gigawatt.

Untuk mencapai target tahun 2025 itu, sudah barang tentu diperlukan rangkaian upaya yang lebih intensif. Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Penerbitan peraturan Menteri ESDM itu hendaknya ditindaklanjuti dengan aksi sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa. Sosialisasi peraturan itu idealnya juga disertai dengan program pengenalan PLTS Atap. Sebab, tidak semua komunitas atau rumah tangga paham PLTS.

Menyimak perencanaan transisi energi yang dirancang Kementerian ESDM akan membantu semua pihak semakin memahami agenda ini. Pada periode tahun 2021 – 2025 misalnya, pemerintah akan terus menerbitkan dan mengimplementasi regulasi yang terkait dengan undang-undang tentang EBT. Dalam periode ini, pemerintah bahkan menghentikan pembangkit berbasis batubara, serta dilaksanakannya konversi diesel ke gas dan EBT.

Perubahan dan pembaruan akan terus berlangsung secara bertahap hingga tercapainya target NZE tahun 2060.. Kerja dan proses yang berkelanjutan ini harus berkepastian. Karenanya, agenda transisi energi ditetapkan dalam PPHN, agar menjadi kewajiban bagi setiap pemerintahan untuk melaksanakan dan mewujudkannya. □

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



PANCASILA



Tragedi di Stadion Hillsborough



"Maafkanlah Kami," Kata Cameron
Setelah Temukan Bukti Baru

Stadion bisa berubah menjadi sumber bencana apabila terjadi kesalahan dalam menangani masalah di lapangan. Stadion Hillsborough menjadi saksi dari kesalahan yang dilakukan oleh polisi dan panitia penyelenggara pertandingan. Tragedi kemudian diusut terus hingga semua fakta terungkap. Pemerintah Inggris secara resmi meminta maaf kepada korban tragedi tersebut. Dan, tragedi itu terus dikenang agar tidak terulang.



KEJADIAN itu sudah berlangsung 23 tahun lalu, namun kepedulian Perdana Menteri (Inggris) David Cameron atas Tragedi Hillsborough tetap tinggi. Dalam tragedi itu ia menunjukkan bukti baru yang membuat segalanya menjadi jelas, dan dalam pandangan Cameron, keluarga-keluarga tersebut sudah diperlakukan dengan tidak adil, yaitu ketidakadilan dalam hal banding, kegagalan dari pemerintah melindungi orang-orang yang mereka cintai dan selalu ditahan-tahan untuk mengetahui kebenaran dan lalu kemudian ketidakadilan ketika fitnah menimpa mereka yang sudah pergi itu - bahwa kematian mereka adalah salah suporter itu sendiri. Ungkapan panjang Cameron itu termuat dalam *sport.detik.com*, 12 September 2012.

Lebih lanjut dalam *web* itu, Cameron mengatakan, dengan bukti baru bersumber dari laporan-laporan, maka ini adalah saat yang tepat bagi saya sebagai perdana menteri untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada 96 keluarga korban yang sudah menderita selama 23 tahun terakhir. "Atas nama pemerintah dan negara kami, saya amat sangat menyesal atas ketidakadilan ganda yang sudah berlangsung sangat lama ini", ujarnya.

Tragedi Hillsborough merupakan tragedi tidak hanya bagi pendukung Liverpool FC, namun juga pemerintah Inggris, rival Liverpool, bahkan juga seluruh umat manusia. Rival klub yang berjuluk *The Red* juga menyampaikan duka atas tragedi itu.

Saat semifinal Piala FA antara Liverpool dan Manchester City, di Stadion Wembley, 16 April 2022, sebelum pertandingan *kick off*, supporter Manchester City melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ketika seluruh penonton yang ada dalam stadion melakukan *minutes of silence* untuk memperingati 23 tahun Tragedi Hillsborough, seharusnya suasana stadion hening tapi saat itu menjadi gaduh karena supporter Manchester City bernyanyi-nyanyi.

Atas ulah supporternya itu, Manchester City FC merasa malu dan tidak nyaman sehingga club yang berjuluk *The Citizen* itu



David Cameron

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menyampaikan permohonan maaf. Klub yang juga disebut Manchester Biru itu melontarkan kekesalannya dan mengecam pendukungnya sendiri.

Tragedi yang menjadi catatan kelam dalam dunia sepakbola itu bermula ketika Liverpool dan Nottingham Forest FC bertemu dalam semifinal Piala FA pada tahun 1989. Semifinal digelar di Stadion Hillsborough, 15 April 1989. Stadion itu merupakan markas klub Sheffield Wednesday. Hillsborough dipilih sebab stadion itu merupakan tempat yang netral, baik bagi Liverpool maupun Nottingham Forest.

Bagi rakyat Inggris yang terkenal gila bola,

terutama supporter Liverpool, pertandingan tersebut tentu sangat menarik, tidak boleh dilewatkan. Antusiasme penonton yang datang berduyun-duyun ke Hillsborough sebenarnya sudah diantisipasi oleh aparat keamanan, polisi, setempat. Dalam kronologi yang ditulis dalam *kumparan.com*, 16 April 2019, diceritakan, supporter Nottingham mendapatkan jatah di tribunet Utara dan Timur, sementara Liverpool di tribunet Selatan dan Barat yang dinamai *Leppings Lane*.

Dalam *web* itu disebutkan ada kejanggalan, sebab *Leppings Lane* memiliki kapasitas penonton lebih sedikit dibandingkan dengan tribunet yang





dijatahkan untuk suporter Nottingham Forest. Keanehan terjadi, karena Liverpool memiliki basis massa yang lebih besar ketimbang Nottingham Forest. Inilah yang disebut dalam web itu sebagai musabab dari tragedi.

Lebih lanjut dalam tulisan itu, bersumber dari BBC, tragedi bermula saat suporter Liverpool masuk ke *Leppings Lane*. *Leppings Lane* yang memang tidak besar, hanya memiliki beberapa pintu putar. Tujuh dari beberapa pintu putar tersebut mengarah ke tribun berdiri *Leppings Lane*.

Karena minimnya pintu masuk, suporter Liverpool tidak bisa masuk ke dalam *Leppings Lane* saat pertandingan dimulai. Selain itu, suporter di dalam tribun juga berdesakan, karena informasi mengenai bagian mana yang mereka tempati tidak jelas.

Dari kondisi itulah malapetaka terjadi. Berbagai versi berita dan cerita bermunculan. Selepas malapetaka, harian *The Sun* menyebut, suporter Liverpool sebagai penyebab terjadinya kerusuhan di Hillsborough. Apa yang ditulis *The Sun* itu dibantah keras oleh suporter Liverpool.

Lalu bagaimana fakta sebenarnya hingga tragedi itu terjadi? Dalam *idws.id*, 13 Maret 2015, dipaparkan, setelah penyelidikan, Kepolisian South Yorkshire ternyata melakukan kebohongan publik. Ketika itu salah satu petinggi Kepolisian South Yorkshire, David Duckenfield, mengatakan, kalau fans Liverpool mabuk dan memaksa masuk stadion. Namun, kenyataannya, kamera CCTV menunjukkan kalau pintu stadion malah dibuka atas perintah Duckenfield. Kepolisian South Yorkshire menghilangkan beberapa bagian di CCTV dan mengkambinghitamkan fans *The Reds*.

Duckenfield pun mengakui kalau dirinya telah menyimpan dosa besar dalam kasus tersebut. Rasa penyesalan pun menghampirinya. "Itu adalah kesalahan besar dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semua orang (fans Liverpool) tahu yang sebenarnya kalau kami telah membuka pintu stadion", katanya seperti dalam web itu. Lebih lanjut, dia mengatakan: "Jelas ini adalah salah suatu

kesalahan terbesar dalam hidup saya. Sangat sulit mengakuinya. Saya seperti itu mungkin dalam keadaan emosi dan mendapat situasi yang membuat pikiran saya selalu kosong."

Dalam *Wikipedia*, diungkapkan, Tragedi Hillsborough adalah tragedi yang mengakibatkan kematian para penonton sepakbola, karena saling berjejalan pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough, yang menjadi kandang dari Sheffield Wednesday di kota Sheffield, Inggris. Peristiwa tersebut mengakibatkan 96 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pendukung Liverpool

Pada saat itu adalah pertandingan semi final Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest. Tragedi Hillsborough adalah peristiwa kerusuhan fans di stadion kedua yang melibatkan Liverpool F.C., setelah tragedi Heysel pada 1985.

Belakangan berdasarkan hasil penyelidikan dinyatakan bahwa peristiwa tersebut dikarenakan kelalaian pihak kepolisian dan kesalahan pemberitaan oleh *The Sun* hingga terjadi boikot terhadap *The Sun* dengan slogannya *Don't Buy The Sun*. Hal ini membuat PM Inggris David Cameron pun menyatakan permintaan maafnya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FC). Jumlah korban meninggal tersebut tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam kecelakaan di stadion dalam sejarah Britania Raya dan tetap menjadi rekor tragedi terbesar yang berhubungan dengan stadion sepakbola di Britania Raya. Dengan perincian: 96 orang meninggal, 89 diantaranya laki-laki, 7 orang perempuan. Berdasarkan umur, kebanyakan dari mereka adalah usia di bawah 30 tahun serta 13 orang di antaranya di bawah usia 20 tahun. Korban termuda adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 730 orang terluka di dalam stadion serta 36 terluka di luar stadion. Ratusan orang mengalami trauma, karena peristiwa tersebut.

kepada para keluarga korban.

Dalam *tribunnews.com*, 27 April 2016, disebutkan ada 10 penyebab kenapa tragedi itu bisa terjadi. Hal demikian disimpulkan dalam pengadilan yang menyidangkan masalah itu. Dalam sidang, hakim memutuskan 96 korban tragedi tersebut dinyatakan sebagai korban 'unlawfully killed' atau terbunuh secara ilegal. Ada 10 keputusan juri pengadilan. Sepuluh keputusan itu adalah: (1). Kesalahan polisi menyebabkan situasi berbahaya di bagian pagar; (2). Petugas kepolisian gagal melakukan perintah dan menyebabkan kehancuran di bagian teras; (3). Ada kesalahan pada kotak kontrol saat polisi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

membuka pintu keluar di jalan *leppings Lane*.

Selanjutnya, (4). Perhitungan kapasitas penonton berlebihan, sehingga menyebabkan tragedi; (5). Ada kesalahan dalam sertifikasi keamanan stadion Hillsborough; (6). Polisi Yorkshire Selatan (SYP) dan Layanan Ambulans Yorkshire Selatan (SYAS) terlambat melakukan penyelamatan; (7). Respon darurat telat ditanggapi; (8). Sheffield Wednesday (klub yang stadionnya dipakai) gagal menyatakan

alasan penggunaan pagar sebagai pembatas; (9). Ada kecacatan informasi tentang tiket pertandingan yang tidak memadai; (10). Pihak klub harusnya menunda *kick off* ketika mengetahui penonton yang membludak sebelum pertandingan.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari tragedi itu? Dalam *kumparan.com*, 16 April 2019, disebutkan, tragedi Hillsborough berdampak besar pada sepakbola Inggris. Laporan Lord Justice Taylor memegang peranan besar.

Lord Justice Taylor merupakan lembaga bantuan hukum yang menginvestigasi atau menyelidiki tragedi itu. Dalam laporan, Lord Justice Taylor membuat deretan rekomendasi menyoal stadion agar tragedi ini tak terulang kembali. Laporan yang ada dipatuhi oleh FA.

Rekomendasi dari Lord Justice Taylor adalah: Pertama, menghilangkan tribun berdiri dan diganti dengan tribun duduk yang tiketnya jelas. Ini dimaksudkan agar suporter yang masuk lebih termonitor dan tribun menjadi tempat yang lebih aman. Selain itu, pagar-pagar yang membatasi tribun dan lapangan di stadion-stadion di Inggris juga diruntuhkan. Ini untuk mencegah agar tribun tidak kelebihan kapasitas dan terjebaknya suporter yang hadir. Sebagai gantinya, petugas keamanan ditugaskan untuk memonitor dan mencegah masuknya suporter ke lapangan. Pihak FA juga lebih tegas untuk memberikan hukuman terhadap *hooligans-hooligans* yang bengal seusia tragedi terjadi. Dampaknya, kekerasan fisik antarsuporter menurun jauh.

Tragedi yang tidak diinginkan oleh semua itu, oleh *The Reds* pada setiap 15 April diperingati untuk dikenang sebagai catatan kelam menimpa dunia persepakbolaan. □

AWGI dari berbagai sumber

Tegas Hukuman, Kerusuhan Menjadi Masa Lalu

Pelaku keonaran dari klub-klub Inggris ditindak tegas oleh UEFA atas Tragedi Heysel. Sanksi tersebut menjadi efek jera yang manjur. Selepas Tragedi Heysel, intensitas kerusuhan di stadion-stadion Eropa menurun. Apa yang terjadi di Stadion Heysel juga ditonton oleh jutaan penggemar sepakbola di Indonesia. Saat itu, TVRI menyiarkan secara langsung dari Brussels, Belgia.

PERTANDINGAN sepakbola itu sudah digelar sejak tahun 1955. Mereka yang tampil di laga-laga ini adalah klub-klub raksasa, klub terbaik di negaranya masing-masing, di Eropa. Di kejuaraan ini tercatat nama-nama klub besar yang dari dulu dan hingga kini masih bertahan, baik nama maupun reputasinya. Di antara klub itu adalah: Real Madrid, Bayern Munchen, Manchester United, Barcelona, dan Liverpool.

Bergengsinya kejuaraan ini membuat dari babak penyisihan grup hingga final digelar ratusan juta pasang mata di seluruh dunia siap menyaksikannya. Semua deg-degan menjelang *kick off*. Di tempat-tempat yang jauh dari stadion, suasana kejuaraan yang saat ini disebut Liga Champions UEFA itu sangat panas, apalagi di sekitar dan dalam stadion.

Puncaknya terjadi pada saat Final Liga Champions 1985 yang mempertemukan

Liverpool dan Juventus FC. Satu dari Inggris, satu dari Italia. Final yang digelar pada 29 Mei di Stadion Heysel, Brussels, Belgia, suasana sudah panas meski pertandingan belum dimulai. Penggemar sepakbola di Indonesia saat itu bisa menyaksikan, sebab disiarkan secara langsung oleh TVRI. Saat itu, di televisi yang ada terekam bagaimana ulah kedua suporter. Tak terkendalinya ulah para penonton di dalam stadion membuat pertandingan yang hendak digelar sempat diundur.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dalam *tirto.id*, 3 Oktober 2022, diceritakan, kerusuhan antarsuporter di Heysel sudah berlangsung sekitar satu jam sebelum *kick off*. Saksi mata mengatakan, rusuh dimulai ketika Tifosi (pendukung Juventus) mulai melempari Liverpoolian (suporter Liverpool). Tak terima dengan perlakuan itu, Liverpoolian ganti menyerang. Jumlah Liverpoolian rupanya lebih banyak dibanding dengan Tifosi. Disebut serangan balasan itu lebih brutal. Kebrutalan menjadi-jadi setelah pagar pembatas di tribun di rusak.

Karena kalah jumlah, Tifosi pun mundur namun langkah mereka terhalang tembok besar. Akibatnya, Tifosi maupun penonton

netral berhimpitan menahan serangan Liverpoolian yang membabi buta. Akibat serangan Liverpoolian terhadap Tifosi yang bertahan di tembok mengakibatkan tembok runtuh, karena tak kuasa menahan banyaknya massa yang berdesakan.

Dalam *sportstars.id*, 8 Oktober 2022, dikatakan pendukung Juventus yang diserang oleh Liverpoolian bukan dari kelompok garis keras atau ultras sehingga mereka saling menyelamatkan diri dan tidak berusaha melakukan serangan balasan. Mereka kocar-kacir menyelamatkan diri, mendorong dinding pembatas stadion. Lantaran dinding pembatas stadion itu tidak

dapat menahan beban, akhirnya dinding menimpa ratusan orang.

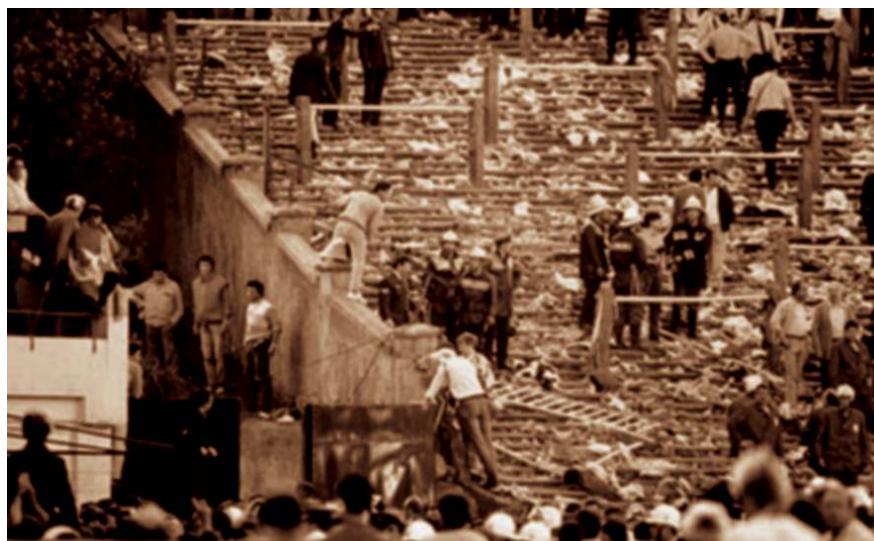
Dari kejadian tersebut, seperti diungkap dalam *tirto.id*, enam ratus orang mengalami luka-luka, 39 orang tewas tertimpa reruntuhan. Tigapuluh dua di antaranya suporter Juventus, sementara tujuh orang lain adalah pendukung netral: empat orang Belgia, dua Perancis, dan seorang dari Irlandia Utara.

Melihat ulah supporter yang demikian, Tifosi di tribun yang lain tak terima dengan serangan membabi buta itu. Mereka membalas dengan bergerak menuju ke area reruntuhan. Langkah serangan balasan itu dicegah oleh aparaturnya keamanan, polisi. Suasana di luar lapangan tak kalah seru dengan apa yang terjadi di dalam lapangan. Saat itu suasana di dalam dan luar lapangan sama-sama panas.

Kericuhan di luar lapangan rupanya menyita perhatian semua yang ada di dalam stadion, sehingga pertandingan sempat dihentikan. Dengan alasan meredam kisruh agar tidak meluas, kedua kesebelasan sepakat pertandingan diteruskan. Hasil dari pertandingan tersebut, Juventus memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol diciptakan oleh Michael Platini dari titik penalti.

Pertandingan usai, namun selepas itu kesedihan, duka, dan lara, muncul dari Stadion Heysel. Enam ratus orang luka-luka dan 39 orang tewas. CEO Liverpool, Peter Robinson, prihatin atas apa yang terjadi. Dia mengutuk kekerasan yang terjadi dan mengkritik standar keamanan stadion. Tak hanya Robinson, Chairman John Smith juga mengatakan hal yang sama, "tempat itu (Heysel) tak layak untuk laga biasa, apalagi sebuah final".

Akibat tragedi itu, kepolisian Belgia, UEFA, dan pemerintah Inggris mengadakan penyelidikan. Berbagai saksi mata dan dokumentasi dikumpulkan untuk mengungkap masalah. Dalam *Wikipedia* disebutkan, film sepanjang 17 menit dan berbagai hasil jepretan kamera menjadi alat untuk mengungkap kejadian. Dari TV Eye ditayangkan satu jam perihal Tragedi Heysel dan foto-foto pun dipublikasikan melalui me-



dia massa.

Dari bukti-bukti yang ada, 27 orang ditahan dengan tuduhan penganiayaan dan pembunuhan. Terungkap bahwa pelaku rupanya sudah beberapa kali berurusan dengan hukum atas masalah yang sama, yakni kerusuhan dalam sepakbola. Dari 27 orang, akhirnya 14 orang dipidana atas dakwaan melakukan penganiayaan dan pembunuhan.

Masalah tidak berhenti di 14 orang. Berdasarkan penyelidikan UEFA, diputuskan Liverpool juga dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dalam tragedi itu. Urusan yang demikian juga menjadi perhatian Perdana

Menteri Inggris Margaret Thatcher. Perdana menteri perempuan itu mendesak FA (PSSI-nya Inggris) untuk melarang klub-klub Inggris merumput di kejuaraan-kejuaraan Eropa.

Apa yang diusulkan ke FA direspon oleh UEFA yang secara resmi menyatakan dan memutuskan melarang klub-klub Inggris mengikuti pertandingan di seluruh kejuaraan resmi sepakbola Eropa dan dunia selama lima tahun dan tiga tahun tambahan untuk Liverpool.

Klub lain di Inggris, seperti MU, Arsenal, Everton, yang saat itu lagi jaya-jayanya yang tidak ikut 'makan nangka' rupanya juga kena 'getahnya'. Mereka tidak bisa berpartisipasi

dalam berbagai kejuaraan sepakbola Eropa dan dunia yang bukan karena akibat ulahnya.

Untuk mengenang apa yang pernah terjadi di Stadion Heysel, dibangunlah penanda peristiwa itu. Penanda itu dibangun dengan biaya £140,000. Penanda yang berbentuk tugu jam matahari diresmikan pada 29 Mei 2005. Di penanda karya seniman Prancis Patrick Remoux itu termuat puisi "Funeral Blues" karya penyair Inggris W. H. Auden. Penanda dan syair yang ada disebut sebagai tanda kesedihan atas tragedi yang terjadi. □

AWG/dari berbagai sumber

328 Tewas Akibat Lemparan Gas Air Mata

Tragedi di Stadion Nasional Peru tidak akan terjadi bila polisi bersikap tenang dan tidak brutal. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan memancing terjadinya kerusuhan. Gas air mata yang ditembakkan menambah kepanikan di pintu keluar.

LIMA, 24 Mei 1964. Stadion Nasional Peru disesaki oleh 53.000 penonton. Stadion terbesar di negeri itu penuh dengan penonton, sebab digelar pertandingan Timnas Peru melawan Argentina. Kedua tim berlaga untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Tokyo 1964. Orang-orang Peru rela berdatangan ke stadion guna memberi semangat agar kesebelasan kebanggaan mereka mampu lolos, apalagi timnas yang dibela hanya butuh nilai seri.

Begitu kick off, pertandingan berjalan seru. Argentina sebagai negara yang perkasa sepakbolanya tentu memberikan perlawanan yang sengit. Peru pun mampu mengimbangi dan kokoh menjaga gawang hingga kedudukan tetap 0-0 di babak I. Begitu memasuki babak II, pertandingan berjalan semakin panas. Silih berganti kedua negara Amerika Latin itu saling menyerang dan bertahan.

Di menit-menit akhir pertandingan Babak II, pemain Peru mampu menjebol gawang Argentina. Para penonton pun sontak melepaskan kegembiraannya. Di antara mereka ada yang menari-nari saat Timnas



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Peru unggul nilai. Rupanya, kegembiraan para penonton beralih menjadi kekecewaan, sebab wasit menganulir gol sehingga kedudukan tetap tidak berubah.

Gol yang dibatalkan oleh wasit menjadi awal petaka di stadion. Di antara pendukung ada yang tidak terima keputusan itu atas

keputusan wasit. Keduanya adalah Bomba dan Edilberto Cuenca. Kedua orang itu selepas peluit panjang dibunyikan atau pertandingan berakhir masuk ke dalam lapangan. Disebut dalam berbagai media mereka ingin memukul wasit.

Atas sikap kedua orang itu, polisi Peru



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bersikap berlebihan. Kepada Cuenca, aparat keamanan itu melakukan tindakan kekerasan. Cuenca ditendang dan dipukuli, dan bahkan mereka membiarkan anjing penjaga keamanan mencabik-cabik baju si korban. Sikap aparat keamanan yang berlebihan itu menimbulkan aksi solidaritas

penonton yang lain. Mereka tidak terima ada suporter Peru diperlakukan seperti itu. Bila di awal hanya dua orang masuk ke lapangan, selanjutnya yang menuju ke lapangan lebih banyak lagi. Tak hanya itu, di antara suporter ada yang melempari polisi dengan benda apa saja.



Kekacauan pun terjadi, banyak penonton yang berusaha menghindari dengan keluar melalui pintu-pintu yang ada. Sayangnya, upaya mereka untuk segera keluar stadion tidak bisa, sebab pintu keluar bagian luar masih terkunci. Mereka yang sudah berada di ujung tidak bisa bergerak balik sebab arus orang yang menuju ke sana semakin padat.

Kekacauan dan kepanikan semakin menjadi-jadi saat polisi menembakkan gas air mata, ditambah dengan gonggongan anjing yang seolah-olah dibiarkan mau menerkam. Kepanikan yang terjadi di pintu keluar akhirnya menjadi tragedi. Mereka saling dorong sehingga terjatuh dan akhirnya terinjak di tengah mata beresah pedih dan perih serta sesak nafas.

Dalam tirta.id, 3 Oktober 2022, diceritakan, seorang saksi mata, Salas, menyatakan, dirinya menyaksikan banyak tabung gas air mata dilemparkan. Ia menduga menghabiskan sekitar dua jam di antara gelombang manusia yang bergegas menuruni tangga. Kerumunan begitu padat, sehingga kakinya tidak menyentuh lantai, ia menginjak-injak tubuh manusia, beberapa hidup beberapa mati.

Dari tragedi itu, Pemerintah Peru mencatat korban tewas akibat kepanikan atas tembakan gas air mencapai 328 orang dan 500 orang mengalami luka-luka. Kompas.com, 02/10/2022, menyebut peristiwa yang terjadi di Stadion Nasional Peru itu sebagai bencana paling mengerikan dalam sejarah sepakbola hingga hari ini. □

AWG/dari berbagai sumber

FIFA Berduka Atas Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menjadi duka semua. FIFA datang ke Indonesia untuk menyatakan perasaan duka yang dalam atas peristiwa itu. Organisasi sepakbola dunia itu juga berniat membantu perkembangan sepakbola dan stadion di tanah air.

DITENGAH upaya untuk meningkatkan prestasi sepakbola di Asia, sepakbola Indonesia terkena musibah. Saat pertandingan Liga I BRI, antara Persebaya dan Arema FC, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, terjadi banyak jatuh

korban. Disebutkan dalam *detik.com*, 18 Oktober 2022, korban tewas dalam peristiwa yang disebut dengan Tragedi Kanjuruhan itu tercatat 133 orang.

Peristiwa tersebut meninggalkan duka, lara, dan kepedulian dari berbagai pihak tidak hanya di Indonesia namun juga dari seluruh

dunia. Suporter Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, dua klub raksasa Eropa dari Jerman, ikut berduka atas apa yang terjadi di Malang. Presiden FIFA Gianni Infantino pun datang ke Indonesia sebagai wujud atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dan kepeduliannya terhadap



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sepakbola di Indonesia.

Selepas bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2022, Infantino mengatakan, FIFA akan membantu memperbaiki sepakbola Indonesia pasca Tragedi Kanjuruhan. Dalam rilis yang beredar di berbagai media online, Infantino mengatakan, FIFA mengungkapkan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban yang meninggal secara tragis di Malang.

“Kedatangan saya ke Indonesia salah satunya untuk menghormati orang-orang ini,” ujarnya dalam rilis yang beredar di berbagai media online.

Dalam pernyataan tertulis, kedatangan Infantino juga untuk menyepakati langkah baru untuk persepakbolaan di Indonesia. Organisasi yang dipimpinnya hadir untuk membantu persepakbolaan di Indonesia. FIFA hadir untuk bekerja dan bermitra dengan pemerintah, AFC, dan PSSI untuk mentransformasi dan mereformasi sepakbola. Menurutnya, merupakan dunia yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. “FIFA berkantor di Indonesia untuk mentransformasi dan mereformasi sepakbola di negara ini”, ujarnya.

Infantino dalam sambutannya, menyebut Indonesia adalah negara sepakbola, negara

yang begitu mencintai sepakbola di antara hampir 300 juta rakyatnya. Untuk itu, setiap penonton harus merasa aman dan nyaman ketika menonton sepakbola di stadion. FIFA sepakat bekerja sama untuk fokus pada operasional stadion-stadion yang ada, juga fokus terhadap stadion-stadion itu sendiri. Lalu juga kepada suporter, tingkah laku suporter, membuat proyek sepakbola untuk sekolah-sekolah, kami akan mengaturnya bersama-sama dengan pemerintah.

Selanjutnya pria asal Swiss itu menyatakan, infrastruktur stadion perlu diperhatikan, karena tragedi yang terjadi (di Malang) juga berkaitan dengan infrastruktur. “Oleh karenanya kami akan membawa ahli-ahli sepakbola dari FIFA. FIFA akan membantu dan memastikan Indonesia bersinar di kancah sepakbola lokal”, ujarnya.

Untuk membantu Indonesia maka datang ke Jakarta. Tahun depan, Indonesia akan menggelar Piala Dunia U-20. Ini adalah kompetisi terpenting di sepakbola putera setelah Piala Dunia, yang akan segera dimulai di Qatar. Pemain-pemain terbaik dunia akan datang ke Indonesia, dan mereka akan unjuk bakat di Indonesia untuk diperlihatkan kepada seluruh dunia. “Oleh sebab itu, kami butuh stadion-stadion terbaik, kami butuh operasional yang berjalan mulus, sebab kami akan memperlihatkan citra Indonesia kepada dunia”, paparnya. □

AWG/dari berbagai sumber



Gianni Infantino dan Presiden Joko Widodo



Rukmana

Tokoh masyarakat Desa Margaluyu, Banten

Program untuk Rakyat Kecil Harus Diperbanyak

DESA kami termasuk desa terpencil, terletak di pinggiran laut, tidak akan pernah bermimpi disambangi pejabat negara. Tapi, pada kenyataannya menjadi luar biasa ketika desa kami dikunjungi banyak pejabat pada awal Oktober 2022 lalu. Ketika Mensos RI, Pimpinan MPR RI Bapak Yandri, Walikota, juga lurah datang sebagai bentuk perhatian terhadap desa kami.

Desa kami memang kesulitan air bersih untuk air minum yang layak, karena berada di pinggir pantai. Setiap kami membuat sumur tanah, pasti merembes air asin. Sampai kemudian kami dibantu oleh negara dengan menyediakan instalasi pengelolaan air kotor menjadi air bersih layak minum. Bantuan itu sangat kami butuhkan dan kami apresiasi dan sangat kami hargai.

Kami berharap, bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan rakyat itu juga menjangkau daerah lain, terutama desa-desa miskin dan terpencil. Saya kira itu akan sangat membantu kehidupan mereka dan keluarga mereka. □

DER

Heryana Bima Saputra

Ketua Paguyuban Sundawani

Organisasi kedaerahan mesti mendapat dukungan

INDONESIA terdiri dari berbagai budaya daerah dan itu merupakan kekayaan asli bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama. Seperti Paguyuban Sundawani Bogor. Sebuah organisasi daerah yang memiliki banyak kegiatan positif yang mengangkat dan melestarikan budaya Sunda. Kami berupaya menjadi garda terdepan dalam hal pelestarian budaya Sunda.

Kami bersyukur, negara melalui pejabat negaranya, seperti Pimpinan MPR Bapak Prof. Syarief Hasan yang peduli dan sangat memperhatikan organisasi kedaerahan, seperti Paguyuban Sundawani ini, yang banyak memberikan dukungan dan spirit kepada kami.

Tentunya banyak sekali organisasi daerah, seperti Sundawani ini di seluruh Indonesia yang sangat concern akan budayanya dan juga perlu diperhatikan eksistensinya, sebagai salah satu upaya dalam pelestarian budaya agar tidak tergerus oleh arus modernisasi global. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Leni Haini

Dayung Mengantarnya Menyeberang

Mendapatkan Kalpataru



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

OLAHRAGA Dayung Indonesia patut berbangga hati karena pernah memiliki Leni Haini (45), atlet dayung perempuan asal Provinsi Jambi. Selama tujuh tahun (1993-2000) menjadi atlet dayung, ia berhasil menyumbangkan berbagai medali tingkat regional dan internasional, di berbagai lomba olahraga dayung yang diikutinya.

Upik Dayung, begitu ia biasa disapa, pernah meraih 1 emas dan 1 perak pada Kejuaraan Asia yang berlangsung di Singapura tahun 1996. Tahun 1997, Leni meraih emas di Kejuaraan Dunia Dragon Boat Melbourne Australia. Meraih dua emas di Kejuaraan Asia di Singapura. Kemudian ia juga menyabet 3 emas, 1 perak pada Kejuaraan Dunia di Hongkong. Dan, di SEA Games Jakarta tahun 1999, ibu tiga anak ini meraih 3 emas dan 2 perak.

Setelah pensiun sebagai atlet dunia olahraga yang membesarkan namanya, Leni menghilang, seperti ditelan bumi. Selama 10 tahun ia mendarmabaktikan dirinya menjadi pelatih bagi para atlet muda. Dan, sejak 2010, Leni kembali ke daerah asalnya. Setelah bertahun-tahun berada di Jambi tanpa kabar berita, pada 2022 ini sosok Leni Haini kembali menjadi buah bibir.

Kali ini Leni banyak dibicarakan karena keberhasilannya menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan.

Usut punya usut sejak kembali ke Jambi, Leni berusaha mengamalkan pengalamannya dengan melatih talenta muda di sana. Sayangnya, keinginan tersebut tak mudah diwujudkan. Danau Sipin, tempat Leni belajar dayung, sudah tidak seperti dulu. Sampah terdapat di hampir seluruh kawasan danau itu.

“Praktis, seluruh permukaan danau tertutup oleh sampah, dan tidak ada ruang untuk mendayung. Plastik, popok sekali pakai, dan enceng gondok, juga menyebabkan bau tak sedap. Padahal, dulu waktu saya sering latihan di sini, saya biasa minum air danau,” cerita Leni tentang masa lalu danau itu.

Meski kondisi danau tidak bersahabat, Leni pantang menyerah. Semangatnya untuk melahirkan pendayung tangguh, seperti dirinya, terus membara. Perempuan yang





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

beralamat di Kampung Legok Danau Sipin, Kota Jambi, ini berusaha membersihkan sampah-sampah di danau. Bersama 10 temannya, setiap hari, ia memunguti sampah dan enceng gondok sembari mendayung.

Karena kegiatannya itu Leni kerap dianggap gila, karena dinilai melakukan kegiatan yang sia-sia. Tetapi Leni tetap bergeming. Ia tidak mpedulikan ocehan orang lain. Bahkan, kegiatan yang dianggap tak berguna itu akhirnya bisa memberikan penghasilan. Leni mendirikan Bank Sampah Habibah, sampah-sampah yang bisa didaur ulang, ia sisihkan. Sementara residunya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Cara ini juga ditempuh oleh teman-temannya yang ikut membersihkan danau bersamanya.

Korban Narkoba

Dengan cara tersebut, lambat laun permukaan danau Sipin mulai terbuka. Danau yang sempat nyaris tak bisa dilewati itu sudah bisa diseberangi kembali. Tekad Leni untuk menularkan pengalaman mendayung kepada generasi muda semakin menjadi kenyataan. Dan, akhirnya, pada 2016, Leni resmi membuka sekolah dayung, sebagian muridnya adalah anak-anak yatim piatu, serta anak dari keluarga korban narkoba.

Tetapi, pilihannya menerima anak didik korban narkoba ternyata menimbulkan masalah. Banyak bos narkoba yang merasa terusik, dan tidak berkenan dengan adanya latihan dayung. Berbagai cara dilakukan untuk mengganggu kegiatan latihan dayung.

Salah cara yang ditempuh mereka adalah membakar perahu yang biasa digunakan untuk belajar mendayung.

“Membuka sekolah dayung itu tantangannya sangat berat. Saya mengalami kekurangan pendanaan untuk bisa terus mengelola sekolah dayung. Tetapi saya tidak ingin anak didik saya berhenti berlatih, karena mereka adalah anak yatim piatu dan korban narkoba,” kata Leni lagi.

Apalagi, bersamaan salah satu anaknya terkena penyakit epidermolysis bullosa atau pengerapuhan kulit sejak lahir, sekujur tubuhnya melepuh dan merah-merah. Dan, tiap bulan harus dibawa ke dokter untuk memeriksakan penyakitnya.

Tetapi, semua itu tidak menyurutkan tekad Leni untuk terus melatih murid-muridnya dalam menggeluti olahraga Dayung. Bersama 10 temannya, ia terus membersihkan danau Sipin dari sampah dan enceng gondok. Hingga akhirnya, setelah lebih dari tujuh tahun dibersihkan, ekosistem danau Sipin Jambi seluas 42 hektar semakin membaik. Usaha Leni ini bahkan mulai menjamah aliran sungai Batanghari

Berkat usaha dan kerja kerasnya itu Leni dianugerahi penghargaan Kalpataru Tahun 2022 kategori Perintis Lingkungan. Penghargaan tersebut tentu membuatnya tersanjung. Tetapi, berbeda dengan penghargaan dari kejuaraan dayung, Leni merasa penghargaan itu tidak pernah diperjuangkan karena niatnya adalah ibadah.

“Di olahraga dayung kita perlu bekerja keras agar keluar sebagai pemenang dan menjadi juara. Di Kalpataru saya berjuang dibantu teman-teman, dan niatnya adalah ibadah agar anak cucu kita juga menikmati alam yang indah. Karena itu, saat menerima Kalpataru saya menangis terharu,” pungkas Leni. □

MBO

Pilkada Langsung Atau Kembali Ke DPRD?

Pilkada langsung yang telah bejalan beberapa dekade membawa perubahan demokrasi di Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah langsung, rakyat bisa menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia. Dari sinilah muncul kepala daerah benar-benar pilihan rakyat. Sisi positif itu rupanya dibarengi dengan wajah yang tidak sedap, pilkada menjadi mahal adanya karena politik transaksional. Politik transaksional ini sangat marak dan menjadi kebiasaan. Istilah 'NPWP' alias nomer piro wani piro. Praktik yang tidak sehat ini dituding menjadi memicu korupsi bagi kepala daerah terpilih.

Kerisauan dampak buruk yang kasat mata ini memunculkan adanya keinginan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Benarkah bila Pilkada dikembalikan ke DPRD akan mampu menghindari politik transaksional? Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah itu.

Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN

Lebih dan Kurangnya Akan Kita Kaji



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT pimpinan MPR menerima Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), saya ikut dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu ada diskusi tentang dinamika pemilu kepala daerah (pilkada) langsung yang telah beberapa kali dilaksanakan. Pilkada langsung

di satu sisi mempunyai banyak persoalan, namun di sisi lain juga banyak manfaatnya. Saat diskusi itu kita petakan apa mudarat dan manfaat dari pilkada langsung, misalnya biayanya tinggi, pembelahan di akar rumput selalu terjadi. Nah, semua dianalisa, dikaji, apakah layak dipertahankan atau tidak

dipertahankan.

Untuk pilkada tahun 2024, tetap menggunakan sistem pemilihan langsung, tidak ada perubahan, tidak mungkin ada perubahan. Tahun 2024 pilkada langsung menjadi sesuatu yang tidak mungkin diotak-atik lagi. Tetap akan berpedoman pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

Kajian, pendapat, diskusi, tentang pilkada langsung, saya kira tidak apa-apa. Buka ke ruang publik apa masalahnya, mudarat, manfaat, dan solusinya. Apakah yang perlu kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan pilkada. Semua diskusi yang dilakukan tidak apa-apa.

Jadi, belum ada kata yang menjurus kembali ke pilkada lewat DPRD. Dianalisa boleh dan semua peraturan perundang-undangan kan tidak ada harga mati. Semua bisa direvisi, dievaluasi. Mungkin dulu sangat baik menurut kita, bisa jadi dalam pelaksanaan ada yang kurang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu wacana untuk melakukan diskusi pasti ada pro dan kontra, itu tidak apa-apa sehingga dari diskusi itu akan muncul solusi terbaik. Jadi, tidak ada harga mati. Dulu kita anggap pilkada langsung biayanya rendah, ternyata sangat mahal. Tidak ada money politic,

ternyata money politic hampir semua terjadi. Kalau tidak ada 'NPWP' kan susah. Itu semua yang menjadi bahan diskusi kita. Kalau pilkada tetap langsung bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada.

Kalau yang mau pilkada kembali ke DPRD, alasannya kenapa. Jadi, ruang diskusi itu kita buka seluas-luasnya. Partai saya sendiri juga belum mempunyai sikap atas pilkada langsung atau kembali ke DPRD. Kita baru

diskusi dengan Watimpres. Mereka juga sedang mengkaji. Intinya, terpilihnya kepala daerah yang bagus, tidak ada persoalan, dan memberi manfaatnya banyak. □

AWG

Saan Mustopa, Anggota MPR Fraksi Nasdem

Bila Ada Kelemahan Perlu Diperbaiki

DALAM *nasdem.id*, 12 Oktober, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD sebagai langkah mundur dari demokrasi yang sudah berjalan. Saan menyebut, apabila ada kelemahan atau kekurangan dalam pilkada langsung sebaiknya diperbaiki bukan malah dikembalikan ke DPRD.

Mantan aktivis HMI itu menegaskan, kalau pemilihan daerah dikembalikan ke DPRD itu merupakan *setback*. Kelemahan-kelemahan yang ada disebut perlu diperbaiki, bukan lalu memilih jalan masa lalu. Ia tidak sependapat dengan pengusul pilkada kembali ke DPRD, karena disebut dampak pilkada langsung adalah muncul praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal demikian bisa terjadi, sebagai akibat politik transaksional terlalu besar. Misalnya, terkait dengan mahar. Kalau semua elite punya komitmen yang sama untuk tidak melakukan itu, kan biaya lebih murah. Kenapa misalnya mereka melakukan itu, karena ada proses yang salah. Proses yang salah ketika mereka mau maju.

Pilkada 2024 masih berjalan sesuai rencana dan berlandaskan UU No.10 Tahun



2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada). Sejauh ini belum ada wacana pengembalian pilkada ke DPRD di Komisi II DPR RI.

Dalam *nasdem.id*, ia menyebut, wacana

terkait pilkada kembali ke DPRD tidak ada. Sampai sejauh ini pilkada masih 27 November 2024 dengan UU yang tidak direvisi, UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016. □

AWG

Hari Sumpah Pemuda

Peringatan ke-94 Tahun Sumpah Pemuda



Bambang Soesatyo

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bamsuet Ajak Tebarkan Narasi Kebangsaan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi perjalanan Aliansi Kebangsaan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pontjo Sutowo yang kini telah memasuki usia ke-12 tahun. Menyambut HUT ke-12, Aliansi Kebangsaan meluncurkan podcast 'Tiga Ranah Pancasila' sebagai media untuk lebih mendekatkan diri kepada generasi muda.

Peringatan hari ulang tahun yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, mengisyaratkan pesan kebangsaan yang ingin dibangun dan diwujudkan bersama untuk mendobrak sekat-sekat primordialisme dan sekat-sekat ego-sentris. Mengingat di tengah kemajemukan Indonesia sebagai sebuah bangsa, salah satu cara untuk dapat bertahan dari pusaran peradaban dan dinamika zaman adalah dengan mentransformasikan setiap diri sebagai bagian dari satu ke-Indonesiaan.

"Selama 12 tahun berkiprah, Aliansi Kebangsaan tetap konsisten menghadirkan narasi-narasi kebangsaan yang mencerahkan sekaligus mencerdaskan. Eksistensi Aliansi Kebangsaan ibarat oase di tengah minimnya pemikiran kritis dan gagasan konstruktif dalam wawasan kebangsaan. Misalnya mewacanakan

paradigma Pancasila dalam pembangunan nasional ke dalam tiga ranah, yaitu: tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera," ujar Bamsuet dalam peringatan HUT ke-12 Aliansi Kebangsaan, di Jakarta, Jumat (28/10/22).

Turut hadir, antara lain: Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ahmad Zacky Siradj, Ketua Umum PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Tokoh Senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Rambe Kamarul Zaman, Sineas Garin Nugroho, serta para pakar Aliansi Kebangsaan, antara lain Manuel Kaisiepo, Yudi Latif, dan Ansel da Lopez.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bagi lembaga MPR, Aliansi Kebangsaan merupakan mitra penting dan strategis. Mengingat adanya kesamaan visi dan kepedulian, terutama dalam memaknai urgensi pembangunan wawasan kebangsaan. Selain itu, Aliansi Kebangsaan juga menjembatani MPR dalam membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai entitas kebangsaan lainnya. Misalnya, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Forum Rektor Indonesia, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

"Dengan mengedepankan sikap inklusif dan merangkul semua pihak, menjadikan kerjasama MPR dengan Aliansi Kebangsaan bisa berjalan baik dan optimal. Selaras dengan visi kelembagaan MPR, sebagai 'Rumah Kebangsaan' yang mawadahi

berbagai arus pemikiran dan dinamika kebangsaan," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sinergi dan kolaborasi yang telah sukses dibangun MPR dengan Aliansi Kebangsaan, antara lain dalam penyelenggaraan forum seminar kebangsaan dan focus group discussion. Kerjasama ini dibangun untuk menghadirkan ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila.

"Dengan mengangkat isu-isu kebangsaan yang relevan dan kontekstual, penyelenggaraan diskusi konstruktif dimaksudkan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta menggalang tanggungjawab intelektual, untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam mengupayakan transformasi sosial," pungkas Bamsuet. (*)

Ahmad Basarah Harap Bonus Demografi Generasi Muda Tidak Jadi Bencana Indonesia

Memperingati 94 Tahun Sumpah Pemuda, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak semua pihak mewaspadaai bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2045 mendatang, atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi agen-agen perubahan dalam pembangunan nasional agar bonus demografi tidak menjadi bencana nasional.

"Untuk menghindari bencana nasional seperempat abad ke depan, saya berharap, generasi muda saat ini sudah diarahkan agar terlibat aktif dalam pembangunan nasional. Tentu bukan hanya pembangunan fisik yang dimaksud dalam pembangunan nasional itu, tapi juga pembangunan mental spiritual yang di dalamnya termasuk kewajiban menjaga ideologi negara yang mempersatukan bangsa," tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (28/10/2022).



Ahmad Basarah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi atau demographic dividend, dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2020 saja jumlah penduduk usia produktif sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia.

Mengutip laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 yang dilansir Kementerian PPN dan BPS, Ahmad Basarah mengingatkan, jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 318,96 juta jiwa pada 2045. Dari jumlah itu, penduduk usia produktif

diperkirakan mencapai 207,99 juta jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktif diperkirakan 110,97 juta jiwa, terdiri atas 44,99 juta penduduk usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) dan 65,98 juta penduduk berusia bayi sampai 14 tahun.

“Berdasarkan data tersebut bisa diprediksi dari sekarang bahwa pada tahun 2045 diperkirakan 100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif. Jika generasi muda tidak dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang, bonus demografi bisa menjadi bencana nasional saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya,” tegas Ahmad Basarah.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini

mengajak semua pihak mengelola dengan baik bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini. Dia menyarankan bonus demografi harus dilihat sebagai berkah, bukan musibah.

“Dulu Indonesia merdeka justru berangkat dari energi besar kaum pemuda saat itu. Bung Karno, Bung Hatta, dan para syuhada bangsa lainnya adalah para pemuda di zaman mereka saat sumpah pemuda dikumandangkan dan saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan,” jelasnya.

Karena itu, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini prihatin membaca hasil sejumlah lembaga survei yang menyebutkan generasi muda saat ini justru menjadi korban dan sasaran empuk penyebaran radikalisme dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Satgas Pencegahan Terorisme BNPT, misalnya, menyebutkan 47,3% pelaku terorisme adalah kelompok muda berusia 20-30 tahun. Pada Februari 2017, BNPT menyebutkan lebih dari 52% narapidana kasus terorisme adalah generasi muda berusia 17 - 34 tahun.

Ahmad Basarah juga menyebut hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta pada 2020 yang memperlihatkan ada 24,89% mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Temuan Lembaga survei Alvara Research bahkan menyebutkan, 12,2% atau hampir 30 juta penduduk Indonesia masuk dalam indeks potensi terpapar radikalisme.

“Bisa dibayangkan, jika sebagian besar pemuda Indonesia terpapar radikalisme, bonus demografi bukannya menjadi berkah tapi justru menjadi ancaman untuk ideologi Pancasila, sekaligus bencana untuk bangsa,” tegas Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah mengingatkan semua pihak bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu, ia mengajak generasi muda memiliki benteng menangkal dan melawan radikalisme dengan cara aktif menjadi bagian dari kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek



Jazilul Fawaid

pembangunan nasional.

“Moralitas kebangsaan itu menjadi penting karena era digital tidak hanya menawarkan sisi positif, tapi juga aspek negatif. Era ini menjadi sarang penyebaran paham trans-nasional, seks bebas, LGBT, penyebaran narkoba, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita para founding fathers,” tutup Ahmad Basarah.

Jazilul Fawaid: Rendahkan Ego Kepentingan Golongan, Tinggikan Mendahulukan Kepentingan Bangsa

Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengingat kembali peristiwa Kongres II Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Dalam kongres tersebut disepakati tiga keputusan yang sangat monumental yang menyatakan: bertumpah darah, berbangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Keputusan yang selanjutnya disebut Sumpah Pemuda itu, menurut Jazilul Fawaid, nilai-nilai yang ada masih sangat relevan hingga kini dan yang akan datang. “Keputusan yang disepakati bersifat abadi,” ujarnya, Jakarta, 28 Oktober 2022.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memuji keintelektual para pemuda masa itu. Mereka yang memiliki beragam latar, baik agama, suku, bahasa, dan budaya namun lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. “Demi kepentingan yang lebih besar mereka rela meninggalkan ego kesukuan,” tuturnya. “Bayangkan kalau mereka masing-masing ingin menang sendiri, pasti tidak ada kesepakatan yang hingga hari ini terus kita peringati,” tambahnya.

Semangat kebersamaan dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara inilah yang menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu perlu terus dirawat, dijaga, dan direvitalisasi. Sebagai bangsa yang memiliki wilayah yang luas dan di dalamnya terdiri berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya tentu tidak mudah mengelola keberagaman itu. Masing-masing kelompok dan golongan tentu ingin mendapat prioritas dalam berbagai sendi kehidupan.

Keberagaman yang ada diakui di satu sisi merupakan suatu kekuatan, namun di sisi yang lain juga mempunyai peluang sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Untuk itulah,

alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu mengajak kepada semua agar merendahkan ego kepentingan golongan dan lebih meninggikan atau mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. “Hal demikian sudah ditunjukkan oleh para pemuda di tahun 1928,” ujarnya.

Para pemuda masa itu, menurut Jazilul Fawaid, berpikir bangsa ini tidak akan merdeka tanpa persatuan. Untuk itu, mereka bersepakat bersama berjuang demi mencapai tujuan menjadi bangsa yang lepas dari belenggu penjajahan.

Nilai-nilai persatuan yang diutamakan oleh para pemuda pada masa itu, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini, perlu dikuatkan kembali untuk membangun bangsa. Tantangan yang dihadapi oleh

“Para pendahulu bangsa sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk persatuan. Semangat yang ada ini perlu dijaga bahkan dikuatkan,” paparnya. “Kalau ada yang menyebarkan berita bohong dan kebencian berarti kita mengingkari semangat yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu bangsa,” tegasnya.

Lestari Moerdijat: Tingkatkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan Bangsa

Menghidupkan semangat dan nilai-nilai Sumpah Pemuda secara konsisten harus dilakukan untuk membangun karakter kebangsaan yang kuat dari para pemuda. Visi generasi muda sangat penting dalam pembangunan bangsa di masa datang.

“Belajar dari peristiwa Sumpah Pemuda



Lestari Moerdijat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bangsa ini lebih rumit dan kompleks dibanding tantangan masa-masa sebelumnya. Untuk itu, dia menekankan, generasi muda tidak hanya bersatu namun juga mampu memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa.

Generasi muda saat ini, katanya, harus bersatu untuk melawan berita bohong dan ujaran kebencian. Berita bohong dan kebencian berpotensi memutus semangat persatuan masyarakat. Bila ini terjadi, menurut Jazilul Fawaid, akan sangat mengkhawatirkan karena nilai-nilai yang sudah dibangun oleh para pendahulu bangsa, termasuk para pemuda di tahun 1928, akan menjadi sia-sia.

1928 yang melahirkan gagasan dari para pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan, generasi muda saat ini harus mampu berperan aktif ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Jumat (28/10).

Para pemuda, menurut Lestari, sejak dini harus ditanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat yang kelak menjadi landasan berpikir mereka dalam keseharian saat berkiprah di tengah masyarakat.

Para pemuda, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejak dini juga harus didorong agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan kritis yang konstruktif dalam upaya mengatasi berbagai masalah bangsa.

Apalagi, tambahnya, Badan Pusat Statistik pada 2021 mengungkapkan, jumlah pemuda di Indonesia tercatat 64,92 juta jiwa atau setara 23,90% dari total populasi Indonesia.

Dengan jumlah yang cukup signifikan itu, ujar Rerie, gerakan para pemuda untuk ikut menentukan arah pembangunan bangsa menjadi lebih baik, sangat diharapkan.

Gagasan Sumpah Pemuda pada 1928 yang berujung pada Kemerdekaan Indonesia pun, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, diinisiasi oleh para pemuda yang merupakan pelajar dan mahasiswa ketika itu.

Saat ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah momentum yang tepat bagi para pemuda dan segenap anak bangsa untuk memberikan sumbangsinya

kebangsaan yang kuat dari para pemuda pembangunan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih baik. *

Hidayat Nur Wahid: Forum MPR Dunia Inisiatif MPR-RI Perjuangkan Generasi Muda

Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan kesyukuran atas disepakati terbentuknya Forum MPR Dunia yang diusulkan oleh MPR-RI, melalui konferensi internasional yang diikuti oleh 15 parlemen, anggota Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI, di Bandung, 24-26 Oktober 2022, atau bertepatan dua hari menjelang peringatan hari Sumpah Pemuda.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, menyampaikan bahwa salah satu poin

dunia,” kata HNW di depan para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin alHikmah, Jakarta, Jumat (28/10).

Menurut HNW, dengan suksesnya Konferensi Internasional MPR di Bandung— yang berlangsung menjelang Hari Sumpah Pemuda— maka menjadi momentum penguatan sinergi antara spirit kepemudaan dan spirit kerja sama lembaga-lembaga ke-Parlemen dan demokrasi untuk kedamaian dunia. Hal itu sebagai bentuk keberlanjutan dari nuansa yang dihadirkan di Kongres Pemuda tahun 1928 dan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

“Konferensi Internasional MPR yang dilaksanakan di kotanya Konferensi Asia-Afrika, Bandung, mendekati hari Sumpah Pemuda, dan menyepakati isu bersama terkait generasi muda, memberi pesan pengingat bahwa anak muda Indonesia merupakan tonggak penting bangsa Indonesia dan sekaligus peradaban dunia, yang terus bisa membuat inisiatif dan melanjutkan sejarah yang positif,” sambungnya.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, selain soal isu kepemudaan, Konferensi Internasional MPR juga setuju memperjuangkan isu kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, dan tentu saja dukungan untuk perjuangan Palestina sehingga bangsa dan negaranya mendapatkan kemerdekaannya.

Perjuangan dilakukan dengan memaksimalkan peran dan kerja sama lembaga-lembaga parlemen se-Dunia yang kini menghimpun diri dalam Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen sejenis lainnya bersama PUIC (Persatuan Parlemen OKI).

“Alhamdulillah seluruh delegasi Majelis Syura/MPR dari 15 negara yang hadir, beserta Sekjen Persatuan Parlemen OKI dan Sekjen Liga Muslim Dunia, secara aklamasi menyetujui pentingnya memperjuangkan pemberdayaan generasi muda tersebut. Ini kembali menjadi bukti konkret kontribusi Indonesia, termasuk MPR-nya dan generasi mudanya, kepada Dunia. Ini sesuatu yang perlu disyukuri dan dijadikan inspirasi khususnya untuk para mahasiswa dan generasi muda, apalagi di saat mereka memperingati Hari Sumpah Pemuda,” pungkasnya. □



Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam upaya ikut menawarkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini.

Kemampuan di bidang teknologi yang mumpuni dari kalangan pemuda, tegas Rerie, harus dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun persatuan dan karakter budaya bangsa yang kuat di negeri ini.

Rerie berpendapat, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dan masyarakat lewat kebijakan yang terukur agar nilai-nilai kebangsaan dalam semangat Sumpah Pemuda mampu dipahami dan dilaksanakan setiap anak bangsa di negeri ini.

Rerie yakin dengan landasan nilai-nilai

Deklarasi Bandung yang dihasilkan adalah dukungan atas pembentukan Forum MPR. Bersama Persatuan Parlemen OKI, Forum ini akan bersama-sama memperjuangkan generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.

“Momen Hari Sumpah Pemuda tahun ini sangat special, karena dua hari lalu di Bandung, Konferensi Internasional MPR sepakat membentuk Forum MPR Dunia yang di antaranya memberi perhatian pada peran generasi muda. Semoga hal tersebut bisa membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia untuk semakin berkontribusi dan berkarya pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kontribusi positif generasi muda untuk masa depan

Sesjen MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.:

“Curah Pandangan Pembentukan Forum MPR Dunia di Kota KAA.”

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia ini dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban. Gagasan ini disambut baik beberapa negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam.

SEKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) siap menyelenggarakan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau nama sejenis lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2022.

Berbicara di Jakarta, pada Ahad (23/10/2022) atau sehari menjelang pelaksanaan Konferensi Internasional di Bandung, Ma'ruf Cahyono menjelaskan, konferensi internasional yang diikuti Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, negara-negara anggota kerja sama Islam ini dalam rangka curah pandangan pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya yang nanti disepakati delegasi. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak terkait lainnya,” jelas Ma'ruf Cahyono.

Ma'ruf menyebutkan, MPR telah siap secara teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan konferensi internasional ini. “MPR sudah mempersiapkan semua yang diperlukan, mulai dari penjemputan delegasi di Bandara, transportasi serta akomodasi selama di Bandung. Juga kesiapan yang terkait dengan bahan dan materi, serta bahasan untuk fasilitasi curah pendapat pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya nanti,” ujarnya.

Selanjutnya Ma'ruf menjelaskan, acara pembukaan konferensi internasional itu berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Untuk keperluan itu, beberapa bagian



Ma'ruf Cahyono

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

gedung bersejarah tempat Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 pun sudah direnovasi, baik di aula, bagian sayap barat gedung, maupun ruangan VIP. Menurut rencana, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin akan membuka secara resmi konferensi internasional yang dihadiri sebanyak 15 delegasi negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam dan organisasi internasional.

“Sampai saat ini sebanyak 15 delegasi atau negara yang sudah memastikan siap hadir mengikuti konferensi internasional ini,” tuturnya. Beberapa negara yang hadir, di antaranya Arab Saudi, Maroko, Iran, Mesir, Yaman, Malaysia. Setelah pembukaan di Gedung Merdeka, pertemuan para ketua majelis permusyawaratan atau majelis syura digelar di Hotel Pullman.

Ma'ruf mengungkapkan, MPR RI sengaja memilih Gedung Merdeka, Kota Bandung, sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional ini. Alasannya, Kota Bandung memiliki nilai historis atau sejarah. Di Kota Kembang inilah, pada tahun 1955,

diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA ini telah mendorong sejumlah negara di Asia Afrika berhasil meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. “Kita ingin nilai historis itu menjadi spirit bahwa persatuan dan kerjasama negara-negara tentu mempunyai pijakan sejarah,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.

Untuk mengingat kembali KAA tahun 1955, kata Ma'ruf, salah satu agenda pada pembukaan konferensi internasional ini adalah para delegasi akan melakukan *historical walk* dari Gedung Savoy menuju Gedung Merdeka. Delegasi juga berkeliling melihat bangunan Gedung Merdeka yang menjadi cagar budaya tempat KAA tahun 1955. Setelah pembukaan konferensi, para delegasi juga mengunjungi Museum KAA.

Selain sebagai tempat penyelenggaraan KAA, lanjut Ma'ruf, Gedung Merdeka juga punya keterkaitan dengan MPR. Pada tahun 1960-1971, MPR (pada waktu itu bernama MPRS) berkantor di Gedung Merdeka. “Ini juga bagian mengapa penyelenggaraan

konferensi internasional dalam rangka curah pendapat pembentukan Forum MPR Dunia ini diselenggarakan di Bandung,” tutur pria yang juga sedang mengikuti Program Doktorat Kajian Strategi Global di Universitas Indonesia ini.

Ma'ruf mengungkapkan, MPR telah menginisiasi gagasan pembentukan Forum MPR Dunia. Gagasan pembentukan forum ini berkembang ketika Pimpinan MPR bertemu dengan Ketua Majelis Syura Saudi Arabia di Riyadh dan Ketua Majelis Syura Maroko di Rabat pada Desember 2019. Namun, upaya untuk merealisasikan gagasan pembentukan

Forum MPR Dunia tersebut terkendala pandemi Covid-19.

“Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia ini dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban. Gagasan ini disambut baik beberapa negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam. Dengan gagasan ini, Indonesia ingin ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” paparnya.

Ma'ruf menyebutkan, konferensi inter-

nasional ini dilaksanakan dengan maksud membahas tentang urgensi keberadaan Forum MPR Dunia. Konferensi membahas bagaimana sinergitas atau hubungan antar-parlemen diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis, beradab, dan adil. “Insya Allah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau nama lainnya jika terbentuk nanti bisa menjadi alternatif forum lembaga-lembaga yang sudah ada. Nanti, pada hari terakhir konferensi internasional ini akan ada pernyataan atau komunikasi bersama dari para delegasi,” pungkasnya. □

Konferensi Internasional MPR Dunia di Bandung

Siti Fauziah: Kepada Delegasi Diperkenalkan Budaya dan Kuliner Jawa Barat

Konferensi Internasional MPR atau nama lainnya yang berlangsung di Kota Bandung diharapkan dapat mendorong pariwisata, baik seni budaya maupun kuliner. “Alam yang indah, seni budaya yang beragam, dan aneka kuliner, menjadi daya pikat Provinsi Jawa Barat,” kata Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM.

PELAKSANA Tugas (Plt) Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyambut kedatangan para delegasi yang mengikuti Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau nama sejenis lainnya dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States). Konferensi internasional yang digelar MPR RI ini berlangsung di Bandung, pada 24-26 Oktober 2022.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyambut kedatangan para delegasi di Kota Bandung dalam *welcoming dinner* pada Senin malam, 24 Oktober 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan jajarannya bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR lainnya sebagai tuan rumah menyambut kehadiran para delegasi peserta konferensi internasional ini,” kata Siti Fauziah

dalam keterangannya, Senin (24/10/2022).

Siti Fauziah menjelaskan, MPR menggelar konferensi internasional dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya yang nanti disepakati para delegasi. Sebanyak 15 negara sudah mengonfirmasi hadir untuk mengikuti konferensi internasional ini. Negara-negara itu, antara lain: Arab Saudi, Mesir, Palestina, Iran, Irak, Aljazair, Bahrain, Maroko, Pakistan, Yordania, Yaman, Malaysia, dan Mozambik.

Menurut Siti Fauziah, konferensi internasional yang dihadiri parlemen dari negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam itu bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan kuliner Jawa Barat. Karena itu, dalam agenda *welcoming dinner* pada Senin malam, 24 Oktober 2022, para delegasi yang hadir disugahi budaya dan masakan khas Jawa Barat. “Pada *welcoming dinner*, sambil menikmati hidangan, delegasi juga disugahi seni angklung dan tarian Jawa Barat. Pada acara pembukaan dan penutupan juga ada penampilan kesenian Jawa Barat,” ungkapnya.

Penampilan kesenian dan kuliner Jawa

Barat, lanjut Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, karena Indonesia memang terkenal dengan ragam budaya dan aneka kuliner. “Jawa Barat memiliki keanekaragaman budaya dan makanan khas,” tutur wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat, ini.

Selain musik tradisional Angklung yang sudah terkenal di mancanegara, kepada para delegasi juga dipersembahkan tarian tradisional Jawa Barat. Salah satu tarian tradisional yang cukup populer adalah Jaipong. Jaipong ini diciptakan seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira, pada sekitar tahun 1960-an. Tarian ini merupakan tarian pergaulan dan jenis musik Jawa Barat.

“Sedangkan makanan khas Jawa Barat memiliki ciri khas rasa gurih, asin, asam, manis, dan pedas. Makanan Sunda memiliki rasa rempah dan ciri khas sendiri. Banyak makanan khas Jawa Barat yang menjadi ikon wisata dan menonjolkan citra Jawa Barat,” imbuh Bu Titi yang juga Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR.

Bu Titi menyebutkan salah satu masakan khas itu adalah nasi liwet atau nasi timbel dengan

tambahan ikan teri, tahu, dan ayam goreng, bersama sayur asam yang sering disajikan di berbagai acara. Karedok juga makanan khas Sunda yang disajikan dengan sayur-sayuran mentah dan siraman bumbu kacang.

Dengan memperkenalkan budaya dan kuliner Jawa Barat, Bu Titi berharap, konferensi internasional ini bisa mendorong pariwisata Jawa Barat. Alam yang indah, seni budaya yang beragam, dan aneka kuliner, menjadi daya pikat Provinsi Jawa Barat.

Jadi, "Konferensi internasional ini menjadi ajang promosi pariwisata Jawa Barat,

menyelenggarakan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau nama sejenis lainnya dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States). Konferensi internasional yang digelar MPR RI ini berlangsung di Bandung, pada 24-26 Oktober 2022.

Siti Fauziah mengungkapkan, konferensi internasional ini diikuti 15 negara, termasuk

strategis, yakni di Jalan Asia Afrika Nomor 65, Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung. "Selain akan berkeliling dan melihat dari dekat Gedung Merdeka, para delegasi juga mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika," tutur Bu Titi.

Kini, Gedung Merdeka yang banyak menyimpan cerita sejarah bangsa digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Di museum ini dipamerkan berbagai benda koleksi dan foto Konferensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 1955. Pengelola Museum KAA sebagai tempat memorabilia KAA pada tahun 1955 siap menyambut para delegasi peserta konferensi internasional.

Gedung Merdeka awalnya adalah sebuah toko yang dimiliki warga keturunan Tionghoa yang dibeli orang-orang Belanda di Bandung yang mendirikan perkumpulan bernama Societeit Concordia pada 1879. Bangunan toko ini kemudian diperluas pada tahun 1895. Dan, pada tahun 1920 bangunan sederhana itu direnovasi besar-besaran oleh arsitek C.P. Wolff Schoemaker dan Van Gallen Last, keduanya Guru Besar pada Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandoeng, yang kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung-ITB). Pada tahun 1940 kembali direnovasi oleh arsitek A.F. Aalbers dengan gaya arsitektur internasional style seperti tampak saat ini.

Pemerintah Indonesia (1946-1950) menjadikan gedung itu sebagai gedung pertemuan umum. Pada 1954, pemerintah menetapkan Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Untuk itu pada awal 1955, gedung kembali dipugar untuk disesuaikan dengan konferensi bertaraf internasional. Pada tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno mengganti nama Gedung Societeit Concordia menjadi Gedung Merdeka dan Jalan Raya Pos menjadi Jalan Asia Afrika.

Tahun 1960-1971, Gedung Merdeka menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terbentuk pada tahun 1960. Di sinilah keterkaitan Gedung Merdeka dengan MPR (MPRS). Di Gedung Merdeka pernah berlangsung Konferensi Islam Asia Afrika (tahun 1965) dan tempat pertemuan Gerakan Non Blok (1974). Kini, Gedung Merdeka yang masih memiliki ikatan sejarah dengan MPR kembali menjadi tempat pertemuan internasional, yaitu konferensi internasional lembaga MPR Dunia yang digelar pada 24-26 Oktober 2022. □



Siti Fauziah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sehingga kita mengharapkan Jawa Barat menjadi destinasi wisata bagi para delegasi, karena mendapat kesan yang baik dalam penyelenggaraan konferensi ini," pungkasnya.

Sejarah Kembali Berulang

Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE, MM, menyebutkan, salah satu rangkaian kegiatan dalam konferensi internasional MPR Dunia adalah *historical walk* para delegasi peserta konferensi internasional dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka, tempat acara pembukaan konferensi internasional pada Selasa, 25 Oktober 2022.

"Para delegasi peserta konferensi internasional MPR Dunia ingin mengingat sekaligus mengulang kembali ketika delegasi peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955 berjalan kaki dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka, tempat KAA," kata Siti Fauziah dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Indonesia, dan dua lembaga internasional, yaitu PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) dan MWL (Muslim World League, Liga Muslim Dunia). Negara-negara itu adalah Saudi Arabia, Aljazair, Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Maroko, Mozambik, Jordania, Malaysia, Pakistan, Palestina, Turki, Yaman. Konferensi internasional ini dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya yang nanti disepakati delegasi.

Menurut Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, dengan alasan historis, MPR sengaja memilih Gedung Merdeka, Kota Bandung, sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional ini. Gedung Merdeka menjadi gedung bersejarah tempat penyelenggaraan KAA tahun 1955. "Konferensi internasional ini ingin mengembalikan semangat dan spirit KAA. Gedung Merdeka kembali mengulang sejarah dan menjadi pusat perhatian dunia," ujarnya.

Ber cerita tentang Gedung Merdeka, Bu Titi menuturkan, Gedung Merdeka sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Letak Gedung Merdeka Bandung memang cukup

Siti Fauziah: Destinasi Wisata Kota Bandung untuk Para Delegasi

“Bandung dikenal sebagai Paris Van Java sudah sangat dikenal di mancanegara. Banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi delegasi yang memperpanjang waktu keberadaannya di Bandung,” ujar Siti Fauziah.

PELAKSANA Tugas (Plt) Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan, Konferensi Internasional Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, Majelis Syuro, atau nama sejenis lainnya berakhir pada Rabu, 26 Oktober 2022. Namun, banyak delegasi yang tidak langsung kembali ke negaranya, tetapi mereka ingin melihat destinasi wisata yang ada di Bandung, dan beberapa destinasi wisata di Indonesia lainnya, seperti Yogyakarta dan Bali.

“Saya mendengar informasi bahwa setelah acara penutupan pada tanggal 26 Oktober, banyak anggota delegasi negara peserta konferensi internasional yang tidak langsung kembali ke negaranya, tapi mereka ingin mengunjungi dan melihat-lihat Kota Bandung. Bahkan, ada yang berencana ke Yogyakarta atau Bali,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di sela-sela Konferensi Internasional yang digelar MPR di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2022).

Menurut Siti Fauziah, *history walk* dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka yang dilakukan para delegasi konferensi internasional untuk mengingat dan mengulang apa yang dilakukan peserta Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, tentu akan membekas pada delegasi peserta konferensi internasional ini. “Selain *history walk*, peristiwa konferensi internasional itu sendiri di Kota Bandung juga akan menjadi kenangan bagi delegasi,” katanya.

MPR sengaja menentukan dan memilih Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro atau nama sejenis lainnya dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam pada 24-26 Oktober 2022. Kota Bandung tentu menjadi kenangan bagi delegasi dari 14 parlemen negara dan dua organisasi internasional (PUIC dan Moeslem World League).

“Bandung yang dikenal sebagai Paris Van Java sudah sangat dikenal di mancanegara. Banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi delegasi yang memperpanjang waktu keberadaannya di Bandung,” ujar Siti Fauziah.

Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, yang lahir di Bandung, mengetahui secara persis destinasi wisata di Bandung dan sekitarnya. “Beberapa lokasi wisata terbaik di Kota Bandung sudah ada sejak zaman kolonial,” tuturnya seraya menyebut contoh Gedung Merdeka.

Selain Gedung Merdeka, tempat Konferensi Asia Afrika yang bersejarah, juga ada Gedung Sate yang sekarang menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate sebagai ikon Jawa

Barat juga sudah ada sejak masa kolonial Belanda.

Peletakan batu pertama pembangunan gedung itu dilakukan pada 27 Juli 1920. Pada acara peletakan batu pertama, waktu itu, hadir Johanna Catherina Coops, putri tertua Wali Kota Bandung, dan B.Coops, serta Petronella Roelofsen mewakili Gubernur Jenderal Batavia.

Akulturasi budaya yang terlihat pada desain gedung menjadi hal yang sangat menarik. Desain gedung yang proses



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pembuatannya dilakukan oleh 2.000 pekerja dan 150 orang pemahat yang berasal dari berbagai kawasan di sekitar Bandung ini, mengadopsi beberapa aliran arsitek pada beberapa bagian gedung. Desain jendela mengusung konsep Moor Spanyol. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia, atap mengadopsi unsur Asia seperti Pura di Bali dan Pagoda di Thailand. Ornamen batu yang ada di gedung ini juga sering disebut mengadopsi arsitektur Candi Borobudur.

Selain Gedung Sate, destinasi wisata lain di kota Bandung adalah Museum Sri Baduga. Di museum yang terletak di Jalan BKR No.185 (Lingkar Selatan) ini, tersimpan banyak koleksi benda-benda bersejarah seperti berbagai jenis koleksi Geologika, Biologika, Etnografika, Arkeologika, Historika, Numismatika/Heraldika, Filologika, Keramik, Seni Rupa dan Teknologi.

“Suasana kota Bandung yang asri, seperti alun-alun dan keramahan penduduknya bisa juga diperlihatkan dan saya yakin akan memunculkan daya tarik yang luar biasa dan melekat dalam benak para peserta delegasi,” pungkas Ibu Titi. □

Dialog Dengan Mahasiswa Untirta

Yandri Susanto
Ajak Generasi Muda Gelorakan
Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., mengajak generasi muda Indonesia untuk terus menggelorakan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR, bukan hanya pada tataran hafalan dan pemahaman semata, tapi sudah masuk kepada implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Kenapa saya tekankan hal itu, karena nilai-nilai dalam Empat Pilar tersebut adalah tanggung jawab kita semua dalam menjaga dan mengamalkannya. Di kampus, mahasiswa mendapatkan pendidikan dan pemahaman Empat Pilar, namun untuk pengamalannya kalian harus aktif di organisasi atau kerja-kerja kemasyarakatan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, saat menerima kunjungan dan berdialog dengan sekitar 200 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Provinsi Banten, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2022)

Pada acara yang dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Budi Muliawan, SH., MH., dihadiri oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta, Dr. Arenawati, M.Si., serta beberapa staf pengajar Untirta.

Lebih jauh Yandri mengungkapkan, aktifnya mahasiswa dalam kegiatan sosial di luar kampus akan mendapatkan beberapa hal positif buat pengembangan diri, yakni: *Pertama*, memperluas pergaulan, melatih serta mempertajam sensitivitas mahasiswa, karena setiap hari menghadapi situasi serta kondisi nyata dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yandri memberi contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Di tengah-tengah kehidupan masyarakatlah generasi muda, mahasiswa, menerapkan perilaku sopan santun dengan sesama, dengan para dosen, orang tua, serta dengan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan.

Kedua, lanjut Yandri, mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan seputar penerapan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang (UU) yang merupakan produk hukum turunan UUD, seperti UU Sisdiknas.

Dalam pemaparan, Yandri menyampaikan beberapa hal tentang MPR yang harus diketahui para mahasiswa. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) MPR, jelas Yandri, sebelum dan sesudah bergulirnya reformasi berbeda. Sebelum reformasi, MPR memiliki kewenangan yang luar biasa. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang



membawahi semua lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, BPK, DPA, MA. “Sebagai lembaga tertinggi negara, lanjut Yandri, MPR memiliki kekuasaan yang tertinggi, salah satunya memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah reformasi, MPR berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Di sini MPR tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun hanya melantik berdasarkan hasil Pemilu dalam Sidang Paripurna MPR,” terang Yandri.

Untuk mempertajam daya tangkap mahasiswa terhadap materi-materi yang dibawakannya, Yandri menerapkan metode yang unik, yakni di tengah-tengah penyampaian materi, anggota Komisi VIII DPR ini memberikan kuis dadakan dalam bentuk pertanyaan seputar materi.

Metode yang diterapkan Yandri ini ternyata sangat efektif. Banyak peserta



mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan yang dilemparkan dengan lugas. Salah satunya Melia, mahasiswi FISIP Untirta, dengan pertanyaan: Sebutkan Empat Pilar MPR secara lengkap. “Ijin menjawab, Empat Pilar MPR adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jawab Melia, disambut tepuk tangan oleh Yandri dan seluruh peserta.

Di sesi akhir, Yandri berharap pasca kunjungan dan berdialog di MPR, wawasan mahasiswa Untirta seputar MPR dan nilai-nilai luhur bangsa akan bertambah. “Saya juga berharap kalian memiliki kesan dan pengalaman yang baik sepulang dari MPR, sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih giat lagi belajar sampai maju dan berhasil sukses,” tandasnya. □

Dies Natalis Universitas Jayabaya

MPR Berupaya Membangun 'Benteng Ideologi' melalui vaksinasi ideologi Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI yang juga alumni Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo, memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-64 dan Wisuda Program Sarjana S1, S2, dan S3 Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Jayabaya. Membahas tentang peran kolaborasi MPR RI dengan perguruan tinggi dalam membangun karakter bangsa di Era Society 5.0, Bamsuet mengungkapkan bahwa saat ini MPR RI sedang menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan bangsa Indonesia siap menghadapi Society 5.0 sekaligus siap menyambut Indonesia Emas 2045.

"Di dalam PPHN terdapat capaian yang ingin diraih bangsa dalam berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan. Sehingga tidak lagi terjadi setiap kali ganti pemerintahan atau ganti menteri, menyebabkan ganti kurikulum pendidikan yang justru membuat tenaga pendidik dan peserta didik menjadi kebingungan. Seringkalinya terjadi pergantian kurikulum menandakan bahwa bangsa kita belum memiliki roadmap pendidikan yang terarah, yang bisa

dilaksanakan oleh siapapun yang memimpin Indonesia," ujar Bamsuet saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-64 dan Wisuda Program Sarjana S1, S2, dan S3 Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (11/10/22).

Turut hadir, antara lain, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) Wilayah III Paristiyanti Nurwardani, Ketua Yayasan Jayabaya Yuyun Moeslim Taher yang diwakili Adang Taher, Rektor Universitas Jayabaya Amir Santoso, dan segenap sivitas akademika Universitas Jayabaya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, generasi muda adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban. Terlebih saat ini bangsa Indonesia telah menapakan kaki pada fase bonus demografi, dimana komposisi demografi didominasi penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda. Titik puncak fase bonus demografi diperkirakan terjadi hingga tahun

2030, dimana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.

"Yayasan Indonesia Forum dalam Visi Indonesia 2030 memproyeksikan kekuatan ekonomi Indonesia mencapai posisi lima besar dunia pada tahun 2030, di saat kita berada pada posisi puncak bonus demografi. Tingkat pendapatan perkapita mencapai 18.000 US dollar per tahun, terbesar kelima setelah China, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sementara dalam laporan 'Essential 2007' yang diterbitkan United Bank of Switzerland (UBS), diprediksi pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke 5," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai proyeksi tersebut menggambarkan besarnya potensi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kekuatan perekonomian nasional, dan kontribusi bonus demografi sebagai sebuah momentum penting yang tidak boleh begitu saja dilewatkan. Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah sukses mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang.

“Kunci keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan bonus demografi adalah dengan mempersiapkan

sumber daya manusia (SDM). Sehingga ketika berada pada fase bonus demografi keberlimpahan penduduk usia produktif bertransformasi menjadi sumberdaya pembangunan yang tidak hanya memiliki daya saing, kreatif dan inovatif, namun juga memiliki karakter dan wawasan kebangsaan,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini mengingatkan, menyiapkan

kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan adalah tantangan yang tidak mudah. Mengingat modernitas zaman di mana lompatan kemajuan teknologi berpacu dengan derasnya arus globalisasi, serta kenyataan bahwa landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang dinamis, penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Di sinilah pentingnya pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan untuk diselenggarakan dalam forum-forum lingkungan akademis, khususnya perguruan tinggi, sehingga dapat secara langsung menyentuh generasi muda bangsa sebagai aset pembangunan.

“Dalam kerangka itu, MPR senantiasa berupaya membangun ‘benteng ideologi’, melalui vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa,” pungkas Bamsuet. □



Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Bengkulu

Yandri Ajak Mahasiswa Berani Bercita-cita Jadi Anggota DPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., mengajak para mahasiswa untuk bekerja keras dalam mencapai cita-cita. Tidak putus asa, bersemangat, dan berani memiliki cita-cita tinggi, seperti menjadi pemimpin negara atau anggota DPR RI. Jangan sampai, karena merasa orang daerah maka tidak berani memiliki cita-cita tinggi.

Pimpinan MPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan motivasinya itu saat menerima delegasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Ikut hadir pada acara itu Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Budi Muliawan SH., MH., serta Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Susi Ramadhani, SH., MH., CPM.

“Saya dari Bengkulu, alumni Universitas Bengkulu, dipercaya menjadi anggota DPR RI tiga periode dan sekarang saya diberi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

amanah sebagai Pimpinan MPR. Semua itu bisa tercapai karena kerja keras, pantang menyerah, dan doa restu orang tua. Itu artinya, orang daerah juga bisa maju, asal mau bekerja keras,” kata putera daerah kelahiran Bengkulu ini.

Yandri lalu menceritakan perjuangan dan

perjalanan kariernya. Waktu masih kecil, papar sarjana lulusan Fakultas Peternakan UNIB ini, desa tempat tinggalnya belum dialiri listrik. Untuk mencapai kota butuh waktu cukup lama, karena jaraknya sangat jauh. Bahkan dulu, ketika pertama kali ke Jakarta, Yandri harus rela naik bus, karena tidak



mampu bayar tiket pesawat. Tetapi semua itu bisa dia lalui dengan baik. Dan, hasilnya, Yandri berasal dari sebuah daerah di Bangkulu Selatan ini bisa mengapai cita-citanya, menjadi anggota DPR RI.

Menjadi anggota DPR RI, lanjut Yandri, adalah pekerjaan mulia, karena seluruh proses penciptaan undang-undang adanya di DPR. Artinya, segala aturan kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan di DPR. Untuk itu, Yandri mengajak para mahasiswa juga berani bercita-cita menjadi anggota DPR RI. Meski untuk menjadi anggota DPR tidak

mudah. Harus berani bersaing dengan orang lain, yang memiliki cita-cita serupa.

Pada kesempatan itu, Yandri juga menyampaikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sila-sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sifatnya sebagai sumber dari segala sumber hukum maka tidak boleh ada satupun produk perundangan yang bertentangan dengan Pancasila, mulai dari UUD hingga produk peraturan daerah.

Yandri memberi contoh, Peraturan Daerah

isinya isinya tidak membolehkan warga masyarakat tidak memeluk agama apapun. "Peraturan daerah seperti itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," kaya Yandri lagi.

Demikian juga kalau ada Peraturan Daerah yang mengutamakan keluarganya sendiri untuk diberi kesempatan mendapat kesejahteraan. Itu juga tidak boleh. Karena, sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. □

MBO

Kunjungan Delegasi SMA I Kuta, Bali

Bagus Adhi: Kekuasaan Adalah Alat Memperjuangkan Kehendak Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ANGGOTA Fraksi Partai Golkar MPR RI, AA. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH., mengajak generasi muda menyiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan lembaga legislatif. Jangan semuanya mau menjadi tenaga

profesional maupun pengusaha. Tetapi harus tetap ada yang menjadi anggota DPR RI. Karena tanpa DPR, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan normal.

Anggota DPR RI, menurut Bagus

Adhi, bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemerintah. Apalagi, pemerintah memang tidak memiliki kesanggupan untuk selalu hadir di setiap kesulitan masyarakat. Sehingga kehadiran anggota DPR bisa membantu masyarakat meringankan bebannya. Anggota DPR juga bisa menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkannya demi kebaikan masyarakat.

"Kekuasaan itu bukan tujuan, tetapi alat yang sangat efektif untuk memperjuangkan kehendak masyarakat. Dengan memegang kendali kekuasaan, berarti memiliki kemampuan lebih dalam membantu orang lain," ungkap AA. Bagus Adhi saat menerima kunjungan delegasi SMA I Kuta Bali, di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/ DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2022) Mahendra Putra menambahkan.

Tapi, dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Budi Muliawan, SH., MH., dan Kepala SMA I Kuta, Drs. I Ketut Sumanthi Artha, M.Pd., itu, Bagus Adhi mengingatkan, untuk memperoleh kekuasaan itu harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar. Seperti, ikut berbagai organisasi dan

melakukan banyak kegiatan sosial. Bukan menggunakan cara-cara kotor seperti *money politic*. Karena politik uang hanya akan menyebabkan kerakusan materi dan mendorong perilaku korupsi.

Untuk itu, Bagus Adhi meminta agar generasi muda untuk membiasakan diri bergaul dengan tokoh-tokoh yang mewakilinya di Lembaga Legislatif. Ini penting, agar mudah menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi, dan mudah pula mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bagus Adhi mengajak para siswa dan siswi SMA I Kuta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, menjadikan sila-sila Pancasila dari logos menjadi etos, seperti membumikan gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari.

“Inilah salah satu tugas MPR, yaitu Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” pungkas Bagus Adhi. □



MBO



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Setjen MPR Ikuti Evaluasi RB dan SAKIP 2022 Kementerian PANRB

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI mengikuti kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring, dari Ruang Diklat MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Hadir dalam acara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H., Plt. Deputy Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., para Pejabat Madya, Pejabat Pratama, dan para anggota Pokja RB di lingkungan Setjen MPR. Dari Kementerian PANRB hadir, Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian, SH., LL.M., bersama Tim Evaluasi.

terwujud.

"Tapi harus diingat, good governance tentu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan semata, tapi harus terimplementasi dalam lingkungan kerja dan menurun di tingkat individu. Satu lagi, sistem akuntabilitas kinerja dalam lingkup kerja Setjen MPR harus menjadi pembangkit semangat yang ada dalam setiap individu ASN," tambah Ma'ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Rahadian menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wapres, khususnya menuju pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta merealisasikan pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional yang memerlukan birokrasi sebagai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam sambutan awal, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan beberapa hal, yakni: Pertama, evaluasi yang dilakukan akan menambah wawasan dan pemahaman di lingkungan Setjen MPR terkait dengan kemajuan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan kerja Setjen MPR.

"Kami ucapkan terima kasih sudah setiap tahun kami telah mendapatkan bimbingan, panduan bahkan harapan-harapan dari KemenPANRB, semua itu kami laksanakan semaksimal mungkin dan bisa kami rasakan manfaatnya secara langsung di Delapan Area Perubahan RB yang semua kita pahami adalah area-area penting untuk mengefektifkan pelaksanaan RB di lingkungan Setjen MPR," katanya.

Kedua, tentu kepada jajaran pejabat di Setjen MPR bahwa kegiatan pada hari ini harus menjadi perhatian untuk bisa mencermati seluruh area demi area, termasuk jika terjadi temuan oleh tim evaluator, ke depan bisa segera dilakukan perbaikan secara tepat dengan melakukan langkah-langkah konkret sesuai yang diharapkan evaluator, sehingga good governance sebagai harapan semua akan

'tools' yang dapat diandalkan, sesuai sasaran RB yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

"Dari catatan evaluasi RB SAKIP yang kami lakukan, kami memandang bahwa implementasi RB SAKIP di Setjen MPR telah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2021 mencapai 72,53 dalam kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa Setjen MPR telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan," ungkap Andi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi SAKIP Setjen MPR sendiri dilakukan sampai pada level Unit, yaitu unit Deputy Administrasi serta Unit Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi. Pada Unit Deputy Administrasi, evaluasi Setjen MPR dikoordinasi oleh Ibu Siti Fauziah. Sedangkan pada Unit Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, evaluasi Setjen MPR dikoordinasi oleh Bapak Dyastasita. Evaluasi RB dan SAKIP ini selesai sekitar pukul 16.00 WIB. □

DER

Setjen MPR Launching Sistem Pengamanan Jaringan Digital MPR-CISRT



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SESJEN MPR Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono SH., MH., meluncurkan MPR-CISRT (Computer Security Insiden Response Team) atau Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber. MPR-CISRT yang dibentuk oleh Setjen MPR sejak Agustus 2022 itu difungsikan untuk mengamankan data dan informasi dari ancaman gangguan siber.

Hadir dalam Launching MPR-CISRT yang digelar di Ballroom, Hotel Shantika, Jakarta, 10 Oktober 2022, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Drs. Luki Hermawan, MSi., Direktur Keamanan Siber dan Sandi Negara Pemerintah Pusat Marsekal Pertama TNI Yos Alfantino, Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah SE., MN., serta para pejabat Eselon II, IV, baik dari Setjen MPR maupun BSSN.

Ma'ruf Cahyono menuturkan, terbentuknya MPR-CISRT adalah bagian dari tindaklanjut Setjen MPR terhadap kebijakan pemerintah yang telah mencanangkan pemerintahan yang berbasis elektronik. Sudah banyak aktivitas, kegiatan, dan tindakan Setjen MPR dalam menerapkan kebijakan itu. "MPR-CISRT adalah salah satu bagian di antaranya karena kita tahu persis bahwa data dan informasi harus dijaga keamanannya," ujarnya.

Pengamanan data dan informasi, menurut Ma'ruf Cahyono, sangat penting agar data dan informasi yang dimiliki tetap utuh. "Data dan informasi yang ada di Setjen MPR merupakan bahan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh MPR maupun masyarakat. Tim MPR-CISRT merupakan bagian dari pemberi layanan itu," paparnya.

Ma'ruf Cahyono berharap, ke depan, MPR-CISRT menjadi tim yang bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maksimal, sehingga data dan informasi yang ada di Setjen MPR yang di dalamnya merupakan data dan informasi terkait dengan proses teknis, administrasi, maupun substansif dari kerja Setjen MPR maupun lembaga MPR dapat terjamin keamanannya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ma'ruf, data dan informasi yang ada di Setjen MPR adalah data yang strategis. Oleh karena itu, MPR-CISRT harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan identifikasi, evaluasi, terhadap kondisi penyimpanan data dan informasi, apakah data dan informasi yang ada sudah aman. "Dengan bimbingan, arahan, dan binaan BSSN, kita akan terus melakukan

komunikasi dan koordinasi sehingga MPR-CISRT yang terbentuk bisa menjamin keamanan data yang ada", ujarnya.

Diungkapkan Ma'ruf, untuk membentuk MPR-CISRT, dipersiapkan berbagai perangkat yang ada. Dilandasi dengan SK Setjen MPR No. 179B Tanggal 1 Agustus 2022 untuk membentuk tim. "Artinya ada pelembagaan organisasi," tuturnya.

Dirinya berharap, ke depan tim diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi, baik personal maupun teknis. Dijelaskan kompetensi personal menyangkut bagaimana ia mampu menjaga keamanan data dan informasi sehingga diperlukan SDM aparatur yang memiliki kejujuran, integritas, dedikasi, dan hal-hal yang kedisiplinan.

Sedang kompetensi teknis, SDM yang ada harus menguasai teknologi informasi, terutama terkait dengan tugas MPR-CISRT. "Kemampuan SDM tentu harus terus ditingkatkan," tegasnya. Untuk itu, ke depan, SDM akan didorong melakukan berbagai training, pelatihan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan maksimal. "Kalau diperlukan lagi dalam kaitan dengan infrastruktur, sarana, dan prasarana, tentu akan kita lengkapi," tegasnya. "Agar MPR-CISRT bisa bekerja maksimal," tambahnya. □

AWG-DER





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. Wakil Ketua MPR

Target Terpenuhi, Forum MPR Terbentuk Dengan Spirit Dasasila Bandung, MPR Membuat Sejarah

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States) pada 24-26 Oktober 2022 di Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan konferensi internasional ini dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia yang diinisiasi oleh MPR RI.

Konferensi internasional ini diikuti para Ketua dan Anggota Delegasi dari Negara Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Kerajaan Bahrain, Republik Irak, Republik Islam Iran, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Maroko, Republik Arab Mesir, Republik Mozambik, Republik Islam Pakistan,

Negara Palestina, Kerajaan Saudi Arabia, Republik Yaman, Republik Turki, dan Kerajaan Yordania, serta Sekretaris Jenderal Perhimpunan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC—Parliamentary Union of the OIC Members State), dan Direktur Liga Muslim Dunia (World Moeslem League) di Indonesia. Konferensi internasional ini dibuka secara resmi oleh Menkopolkam Prof. Dr. Mahfud MD mewakili Presiden RI Joko Widodo pada Selasa, 25 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, tempat dahulu diselenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.

Pimpinan MPR telah menunjuk Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid dan Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad sebagai steering comitte dari konferensi internasional ini. Hidayat Nur Wahid juga diamanahkan untuk memimpin sidang-sidang dalam konferensi ini serta memimpin pembahasan di Komite Kerja yang mempersiapkan Deklarasi Bandung.

Untuk mengetahui lebih jauh konferensi internasional ini dan hasil-hasilnya, Majelis mewawancarai Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, beberapa waktu lalu. Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini. Petikannya.

Apa yang melatarbelakangi usulan pembentukan Forum MPR Dunia?

Usulan pembentukan Forum MPR Dunia sebenarnya berangkat dari pemahaman kita terhadap kegiatan yang dilakukan MPR, yaitu sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika). Kita menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ada dua alinea, yaitu alinea pertama dan alinea keempat, yang secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia merdeka bukan hanya untuk dirinya sendiri. Maka, ketika MPR menyosialisasikan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, MPR pun terlibat untuk

mendukung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan sesuai alinea pertama, dan alinea keempat dengan ikut terlibat dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Inti dari dua pernyataan itu kemudian menghadirkan pemahaman bahwa MPR juga wajar bila melakukan peran-peran diplomasi keparlemenan pada tingkat internasional. Karena itulah, ketika Pimpinan MPR berkunjung ke Riyadh, Arab Saudi, pada Desember 2019 atau beberapa bulan setelah Pimpinan MPR periode 2019-2024 dilantik pada Oktober 2019, Pimpinan MPR menyampaikan tentang usulan pembentukan Forum MPR Dunia atau Majelis Syuro Dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pada waktu itu, Pimpinan MPR hampir semua hadir, kecuali Wakil Ketua Ahmad Basarah dan Lestari Moerdijat, dan karena saya fasih berbahasa Arab maka saya diamanahkan untuk menerjemahkan atau menyampaikan tentang usulan pembentukan Forum MPR Dunia atau Majelis Syuro Dunia itu.

Dalam konteks itu, kita sudah berkomunikasi dengan Ketua Parlemen Arab Saudi bahwa usulan Forum MPR Dunia ini adalah dalam rangka untuk menguatkan kerjasama dan saling tukar pengalaman, serta untuk merealisasikan amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks Indonesia dengan MPR-nya, maka usulan itu agar Majelis Syuro eksis, kuat,

dan bisa berperan menghadirkan perdamaian abadi, juga kemajuan berdemokrasi dan parlemen.

Ketua Majelis Syuro Arab Saudi menyambut antusias usulan itu. Beliau menyampaikan bahwa ide itu sangat baik dan penting dilakukan persiapan untuk bisa diwujudkan, karena forum itu akan mengokohkan hubungan antar-parlemen, termasuk MPR dan Majelis Syuro. Atas dukungan itu, ketika Pimpinan MPR diterima Raja Salman, usulan itu kembali disampaikan Ketua MPR. Saya juga hadir dalam pertemuan itu. Raja Salman juga memberikan dukungan luar biasa atas usulan itu dan beliau juga minta agar dilakukan persiapan dengan baik untuk bisa diwujudkan.

Kemudian, Pimpinan MPR bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (World Moeslem League). Lagi-lagi, dan diluar dugaan, Liga Muslim Dunia sebagai organisasi antar-bangsa dan antar-negara dan non parlemen ternyata juga mendukung usulan itu dan sepakat bahwa sangat wajar bila forum semacam itu dibentuk karena akan menguatkan hubungan antar-parlemen, termasuk juga menguatkan hubungan antar-umat.

Setelah itu, Ketua MPR berkunjung ke Maroko dan bertemu dengan Ketua Majelis Mutasyar di Maroko. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR menyampaikan usulan yang sama dan mendapat dukungan yang luar

biasa dan antusiasme. Bahkan Ketua Mutasyar menyampaikan akan mengajak pimpinan parlemen yang lain dari negara-negara Afrika maupun negara-negara Arab untuk ikut mendukung usulan MPR RI ini.

Sepulang dari kunjungan kita ke Arab Saudi dan Maroko, dalam satu rapat Pimpinan MPR, Rapim pada intinya menerima dan mengakomodasi apa yang sudah kita lakukan dalam kunjungan ke Arab Saudi dan Maroko. Tetapi, memang tidak dapat ditindaklanjuti karena terjadi pandemi Covid-19. Untuk sementara kita agak terhenti. Dalam rapat Pimpinan MPR berikutnya usulan pembentukan Majelis Syuro Dunia itu untuk sementara tidak dibahas lagi. Namun, sudah muncul dalam pidato Ketua MPR pada Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2020 yang menegaskan bahwa MPR akan menyelenggarakan Majelis Syuro Dunia yang akan dideklarasikan pada tahun 2021. Karena pandemi Covid-19 belum reda, rencana itu mundur ke tahun 2022.

Pada waktu peringatan HUT MPR, pada 30 Agustus 2020, kita menyelenggarakan seminar nasional (Seminar Nasional "Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syuro Dunia") untuk pembentukan forum MPR itu. Sebelum penyelenggaraan seminar nasional itu, atau setelah pulang dari kunjungan ke Riyadh, kita sudah menugaskan atau kerjasama dengan Lembaga Pengkajian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tentang pembentukan forum ini. UIN sudah melakukan pengkajian dan rekomendasinya adalah pembentukan forum bersama dengan OKI ini dimungkinkan dengan beberapa alternatif, yaitu apakah dengan nama sendiri atau hanya forum yang bersifat ad hoc, atau hanya sekadar tempat untuk berdiskusi. Itu semua serba dimungkinkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pandemi Covid-19 mulai reda, rapat-rapat Pimpinan MPR kembali membahas rencana pembentukan Majelis Syuro Dunia. Dalam Rapim muncul keinginan agar pembentukan Majelis Syuro itu tidak hanya dengan negara-negara anggota kerjasama Islam (OKI), tetapi meluas ke seluruh dunia. Bahkan, waktu itu ada usulan untuk mendatangi negara-negara anggota di Dewan Keamanan PBB.

Jadi, semuanya sepakat bahwa secara prinsip kita akan membentuk forum yang

bersifat inklusif kemudian bisa mendunia, tetapi juga tidak menganulir apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan Arab Saudi dan Maroko. Kemudian, pada Juni 2022, kita mengundang para duta besar negara-negara OKI yang ada di Jakarta untuk menyampaikan progres dan perkembangan dari forum ini. Dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan para duta besar, para duta besar menyambut positif usulan atau inisiasi dari MPR RI membentuk Forum Majelis Syuro.

Sejak awal kita juga berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tentang pembentukan forum ini. Pihak Kemenlu juga sangat mendukung dan bahkan memberikan masukan dan mengirimkan expert-nya. Tim dari MPR juga berkoordinasi dengan pihak Kemenlu. Setelah itu kita mengundang duta besar dari negara-negara OKI, beberapa bulan berikutnya, September 2022, kita mengundang lebih luas lagi dari kedutaan besar negara-negara OKI di Jakarta. Mereka yang kita undang hampir semuanya datang dan lagi-lagi mereka sangat mendukung serta meminta agar para duta besar ini mendapat tembusan surat undangan agar bisa ikut mengingatkan parlemen di negaranya masing-masing.

Dalam posisi semacam inilah kemudian Pimpinan MPR mengutus saya bersama Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kembali ke Arab Saudi dan Maroko untuk memberitahukan kepada mereka tentang perkembangan persiapan kita dan untuk memastikan kehadiran mereka. Ternyata, pihak Arab Saudi dan Maroko tetap konsisten dengan dukungannya agar forum ini bisa terbentuk. Mereka juga akan mengajak (parlemen negara-negara) yang lain. Seluruh proses ini di satu pihak memang terkait dengan parlemen OKI, tetapi dalam waktu bersamaan juga didukung Kemenlu, duta besar kita di Arab Saudi maupun Maroko, dan para duta besar negara-negara OKI yang ada di Jakarta. Atas dasar itulah maka dilaksanakan seluruh persiapan pembentukan forum ini.

Bahkan, atas inisiatif sendiri, saya kemudian berangkat ke Albania untuk mengundang Ketua Parlemen Albania agar bisa hadir dengan harapan menjadikan forum ini sebagai forum terbuka dalam tingkat yang lebih luas, karena sudah masuk dengan Eropa. Secara prinsip dan lisan mereka

menyampaikan akan hadir, tetapi ternyata waktunya bersamaan dengan pertemuan parlemen untuk masalah Ukraina sehingga mereka tidak bisa datang.

Atas dasar itulah, kita semakin mengintensifkan penyelenggaraan forum ini. Surat-surat (undangan) sudah kita kirimkan dan kita terus mem-*follow up* bekerjasama dengan Kemenlu dan kedutaan besar mereka yang ada di Jakarta. Akhirnya konferensi internasional ini bisa terselenggara dengan juga dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Jadi, memang penyelenggaraan konferensi internasional dalam rangka pembentukan Forum MPR Dunia ini



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mendapat dukungan dari banyak pihak?

Sepenuhnya diketahui dan didukung oleh Pimpinan MPR, sepenuhnya didukung oleh Kemenlu, dan sepenuhnya mendapat dukungan dari kedutaan besar negara-negara OKI yang ada di sini. Sejak awal, meski dimulai dengan parlemen negara-negara anggota OKI, kita tidak mempermasalahkan keinginan untuk menghadirkan forum yang bersifat mendunia dan inklusif, tetapi kita juga tidak menganulir bahwa kita memulai dengan negara-negara OKI. Jadi, dari parlemen negara-negara OKI kita kembangkan menjadi forum internasional yang terbuka.

Dari sidang-sidang konferensi

internasional yang berlangsung dari Selasa siang (25/10/2022) hingga Rabu dini hari (26/10/2022), sepertinya sidang berjalan cukup alot. Apa yang menjadi perdebatan atau perbedaan pandangan dalam sidang itu?

Sesungguhnya pada hari Selasa (25/10/2022) ada permintaan dari Sekjen PUIC (Parliamentary Union of the OIC Members State/Perhimpunan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI) untuk bertemu dengan Pimpinan MPR RI. Saya dan Wakil Ketua Fadel Muhammad ikut mendampingi Ketua MPR dalam pertemuan dengan Sekjen PUIC. Pihak parlemen OKI ingin mendapatkan penjelasan apakah forum yang diinisiasi MPR ini akan menandingi parlemen OKI atau akan mengurangi kewenangan parlemen OKI, atau akan bersama dengan parlemen OKI.

Dalam pertemuan kita menegaskan bahwa forum ini tidak dalam rangka menduplikasi parlemen OKI, apalagi untuk memecahbelah parlemen OKI. Tetapi, juga tidak menjadi bawahan parlemen OKI. Saya menyampaikan bahwa forum sejenis juga sudah ada di negara-negara Arab dan Afrika. Di negara-negara Arab ada forum parlemen negara-negara Arab, di Afrika ada forum parlemen negara-negara Afrika. Keduanya organisasi besar, yaitu organisasi persatuan parlemen negara-negara Arab dan organisasi persatuan parlemen negara-negara Afrika. Keduanya eksis selain parlemen negara-negara anggota OKI.

Anggota parlemen negara-negara Arab dan anggota parlemen negara-negara OKI membentuk Asosiasi Majelis Syuro atau Senat, atau majelis dengan nama yang setara untuk negara-negara Arab dan negara-negara Afrika. Saya sampaikan kepada Sekjen PUIC bahwa asosiasi majelis syuro itu ada. Asosiasi itu tidak mengerdilkan peran parlemen OKI, tidak menduplikasi parlemen OKI. Majelis itu bisa berjalan dan dalam kondisi independen. Sekjen PUIC bisa menerima pemikiran bahwa forum yang diinisiasi MPR adalah forum yang bukan menegasikan parlemen OKI, tapi juga bukan bawahan parlemen OKI. Forum ini adalah forum yang bersama dengan parlemen OKI.

Sehingga kegiatan forum yang diinisiasi MPR RI ini nanti akan bersama atau menjadi bagian dari kegiatan parlemen OKI.

Bentuknya adalah koordinatif dan kolaboratif. Sekjen parlemen OKI menyampaikan, “Ya, Oke kalau demikian.” Bahkan pihak Sekjen parlemen OKI menyampaikan dukungannya dan siap menjadi fasilitator untuk membesarkan dan mengembangkan kegiatan dari forum ini. Dari beberapa agenda parlemen OKI, ada beragam forum di sana, dan nanti akan ditambahkan satu forum baru yaitu forum untuk majelis syuro, MPR, atau nama sejenis dalam parlemen OKI. Itulah yang akhirnya kita sepakati secara prinsip demikian.

Pada hari Selasa (25/10/2022), ketika pembukaan konferensi ini, Ketua MPR dalam sambutannya menyebutkan alasan mengapa forum ini dibentuk, apa tujuannya, dan juga

pembentukan forum. Kita memang telah mengirimkan informasi melalui surat tentang bagaimana forum ini dan apa tujuannya, tetapi sepertinya delegasi belum mendapat informasi yang utuh. Karena itu, dalam pengantar pimpinan rapat, saya menyampaikan bahwa kita fokus untuk mendukung pembentukan forum (Forum MPR Dunia).

Tentu saja kita membuka ruang untuk masing-masing delegasi menyampaikan selain masukan, juga isu yang khas di masing-masing negara yang akan menguatkan pembentukan forum ini, bukan masalah konflik antar-negara, bukan masalah-masalah yang bisa memecah-belah. Hal itulah yang kita sepakati dengan

mendukung forum ini. Palestina dan Yordania secara terbuka mendukung forum ini. Tetapi mayoritas delegasi, termasuk Sekjen Parlemen OKI menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi bagian yang menguatkan parlemen OKI, atau menguatkan persatuan parlemen OKI. Mereka mengkhawatirkan di luar OKI, tidak serta merta negara-negara atau parlemen negara-negara itu mempunyai prinsip yang sama dengan OKI. Mereka sebut misalnya India. India mempunyai parlemen dan berdemokrasi, tetapi secara prinsip dia tidak sejalan (dengan OKI) dan terutama pasti akan ditolak oleh Pakistan. Jangan kita memasukkan yang baru, tetapi justru memecah yang lama.

Kemudian juga misalnya kasus Cina, masalah yang terkait dengan Uighur. Di Parlemen OKI ada forum untuk masalah Islam, termasuk Uighur. Kalau ini masuk, nanti bukan malah membantu menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru, yang sudah ada malah menjadi pecah.

Prinsipnya, Sekjen Parlemen OKI mengatakan, kalau Indonesia nanti akan membentuk forum berikutnya silakan. Tetapi yang bersama dengan OKI, biar saja yang sudah dengan OKI. Jadi, hanya menambah forum baru, tapi kesertaannya tetap dalam kontek ini. Sekali lagi mereka mengatakan kalau Indonesia nanti membentuk yang lain silakan, mereka tidak mempunyai hak untuk melarang. Tapi, yang sudah bersama dengan parlemen OKI di sini, biarlah ini saja. Perdebatan ini cukup panjang karena kami juga harus berkomunikasi dengan Pimpinan MPR bagaimana kita mendapatkan jalan tengah yang terbaik.

Itu satu sisi. Sisi berikutnya isu tentang masalah Palestina. Pimpinan Palestina mengusulkan agar masalah Palestina menjadi perhatian serius dari forum ini, forum di mana negara-negara OKI diundang. Menurut mereka, kita berada di Bandung dan Bandung adalah kota bersejarah di mana dahulu Palestina juga diundang mengikuti KAA di Bandung. Palestina juga menyampaikan dukungan kepada Aljazair yang baru 10 hari sebelum acara konferensi internasional di Bandung terjadi satu rekonsiliasi di Aljazair yang diinisiasi Presiden Aljazair, dan bersatulah faksi-faksi Palestina dan mereka menandatangani.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nama yang diusulkan untuk forum ini. Ketua MPR menyebutkan nama Forum for World Consultative Assembly (Forum MPR Dunia). Tentu saja, karena ini pidato pembukaan, tidak ada yang mendebat dan tidak ada yang menyatakan menolak atau menerima. Pidato Ketua MPR adalah pidato yang disampaikan untuk rasionalisasi pembentukan forum ini.

Saya sejak semula ditunjuk sebagai Ketua Steering Comitte. Ketua MPR juga menyebutkan saya akan memimpin sidang-sidang di konferensi internasional ini yang juga dihadiri Sekjen Parlemen OKI. Dalam rapat (sidang) kita memegang prinsip yang kita ajukan, yaitu tentang pembentukan forum. Jadi, fokus untuk mendukung

pihak Arab Saudi dan Maroko pada waktu proses pembentukan forum ini karena forum ini diharapkan menjadi tempat kita bisa berkolaborasi, menyatukan pendapat, bermusyawarah, bukan forum untuk beradu, berselisih, atau bertengkar.

Tapi, dalam penyampaian pendapat dari masing-masing delegasi memunculkan beragam hal yang membawa perdebatan, termasuk tentang bagaimana hajat forum ini, apakah internasional dalam arti melibatkan negara-negara di luar OKI, sebagaimana yang dipikirkan sebagian Pimpinan MPR, atau forum ini berada di bawah OKI, atau berkolaborasi dengan OKI.

Memang ada yang secara terbuka

Mestinya, konferensi internasional di Bandung menindaklanjuti sehingga masalah Palestina menjadi masalah spesifik yang menjadi perhatian.

Jadi, semua negara mendukung forum yang diinisiasi MPR. Kami juga perlu komunikasikan dengan Pimpinan MPR, karena dalam pemikiran sebagian Pimpinan MPR agar permasalahan ini jangan sampai kemudian menghadirkan semacam duplikasi seolah-olah MPR melakukan peran diplomasi politik yang sudah dilakukan oleh DPR. Padahal, kita menegaskan forum ini bukan duplikasi. Kalau kemudian ada sikap-sikap mendukung Palestina, karena para delegasi semuanya menyampaikan sikap itu, dan Indonesia sendiri sikapnya juga konsisten. Pada Selasa (24/10/2022), Perdana Menteri Palestina diterima Presiden Jokowi di Istana Bogor, dan Presiden Jokowi menyampaikan kembali komitmennya mendukung Palestina dan bahkan siap mendukung kemerdekaan dan bersedia menjadi fasilitator untuk rekonsiliasi faksi-faksi Palestina yang “belum bersatu”.

Dari kondisi semacam itu di mana masih ada yang belum sepenuhnya selesai dan masalah Palestina juga belum selesai sampai Selasa malam itu, tetapi belum deadlock dan masih berlanjut. Karena itu, dibentuk satu panitia kecil yang terdiri dari sembilan negara dan satu organisasi internasional, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Maroko, Turki, Mesir, Iran, Aljazair, Pakistan, Palestina, dan Parlemen OKI. Setelah sidang diskors, Pimpinan MPR mengadakan rapat yang intinya adalah secara prinsip semua sepakat bahwa forum itu penting dan harus terbentuk. Karena itu, beberapa yang belum disepakati akan kita kelola sedemikian rupa agar tetap bisa dibuat kesepakatan untuk forum itu agar besok (Rabu, 26/10/2022) bisa dideklarasikan.

Saya diamanahkan untuk mempersiapkan rapat kecil dan untuk mengakomodasi beragam usulan, termasuk dari Maroko, Aljazair, dalam draf komunikasi atau Resolusi Bandung yang kita akan buat. Saya bersama tim Sekretariat menyiapkan bahan itu sampai menjelang pukul 03.00 pagi baru selesai. Pagi hari, jam 08.00 WIB, kita rapat kembali. Saya memimpin rapat kecil itu. Alhamdulillah, dari bahan yang kita siapkan dan masukan dari floor pada waktu rapat pleno, relative bisa

cepat kita selesaikan. Hampir dua jam, dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 09.50, kemudian semuanya bisa menyepakati terkait dengan bentuk forum ini dan posisinya dengan PUIC bahwa forum ini adalah bagian daripada forum-forum yang ada di PUIC, dan bukan berarti sekali lagi bahwa forum ini dikooptasi oleh PUIC.

Saya tanyakan pada mereka bahwa forum ini menjadi bagian dari forum-forum yang ada di PUIC, apakah maknanya forum usulan MPR ini dikooptasi oleh forum parlemen OKI, mereka menjawab sama sekali tidak. Mereka mengatakan, ini terjadi pada semuanya. Negara kita anggota OKI, anggota PBB, apakah negara kita dikooptasi oleh PBB dan OKI? Kan, tidak. Anggota parlemen kita

inklusif, ini menjadi bagian daripada menuju pada inklusivitas berikutnya. Inklusif juga aneh kalau menolak OKI.

Jadi forum ini bersama dengan OKI dan menjadi bagian forum-forum yang ada di OKI. Tidak di bawah payung OKI, tapi menjadi bagian dan bersama OKI. Mereka memberi jaminan bahwa forum ini tidak berarti dikooptasi oleh parlemen OKI, dan diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan parlemen-parlemen dari negara manapun yang diinginkan oleh MPR di luar dari forum yang dibentuk dengan OKI.

Apa hasil dari konferensi internasional yang diselenggarakan di Bandung itu?

Konferensi internasional di Bandung itu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah juga anggota parlemen OKI, apakah parlemen kita dikooptasi OKI? Kan juga tidak. Kalau kemudian mengikuti aturan yang ada di organisasi di mana kita berada, wajar saja karena semua juga demikian.

Bagaimana dengan inklusivitas Forum MPR Dunia ini?

Mereka memberi jaminan, terserah pada MPR, sekalipun kegiatan bersamaan dengan OKI atau menjadi bagian dari kegiatan yang diselenggarakan OKI, mereka menegaskan MPR boleh saja membuat forum berikutnya dengan mengundang sendiri di luar dari parlemen OKI. Sesungguhnya, sejak kita bicara tentang parlemen OKI, tidak pernah dianulir untuk kemudian dibatalkan. Tapi, sambil bicara tentang parlemen yang bersifat

menghasilkan tujuh poin. Pertama, Majelis Syuro, Majelis Suyukh atau Senat maupun lembaga parlemen lain dengan nama yang berbeda-beda yang diundang MPR Indonesia menyepakati usulan MPR RI untuk pembentukan forum bagi MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, dan nama parlemen yang lainnya bersama dengan parlemen OKI dan menjadi bagian dari forum-forum yang ada di parlemen OKI. Ini yang menurut saya sangat penting dan malah ini juga usulan dari mereka.

Saya tambahkan bahwa tidak ada yang memperlumahkan pembentukan forum ini. Apa yang dimaksudkan oleh MPR adalah tentang apa yang dinyatakan dalam kandungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mereka sepakat dan tidak memperlakukan itu.

Kedua, penegasan tentang masalah Palestina tetap menjadi masalah yang dibicarakan. Masalah Palestina tetap menjadi isu sentral forum dan umat Islam hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina, serta berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai kerangka hukum internasional.

Mereka tadinya mengusulkan agar disebutkan Palestina sebagai masalah pertama dan paling utama untuk parlemen OKI maupun kalangan umat, dan mengakui bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri hingga kemerdekaannya dengan ibukota Jerusalem Timur. Tapi saya sampaikan bahwa saya agak keberatan dengan pernyataan itu, karena dengan penyebutan pertama dan paling utama menjadi seolah-olah Indonesia tidak mempunyai masalah lain, kecuali masalah Palestina. Padahal tentu Indonesia dan negara-negara lain mempunyai permasalahan mendesak di masing-masing negara. Akhirnya, disepakati untuk tidak menyebut sebagai masalah pertama dan utama, tapi menjadi masalah sentral yang menjadi perhatian dari negara-negara ini.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia pada poin ke-1 dan ke-2, maka dibentuklah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis lainnya bersama PUIC, sesuai kewenangan masing-masing lembaga, terutama konsultasi dan kerja sama untuk mengatasi tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan dan generasi muda.

Keempat, mencermati dinamika perkembangan global yang bisa menimbulkan kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensional di setiap negara yang berdampak pada tingkat regional maupun internasional, diperlukan adanya partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Lembaga Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya, sesuai dengan komitmen terhadap Dasa Sila Bandung serta Piagam PBB.

Kelima, terkait dengan tindak lanjut dari forum ini akan dibentuk Komite Kerja yang terdiri dari sembilan negara dengan berkoordinasi bersama Pimpinan MPR RI dan Sekretariat Jenderal PUIC, untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, syarat-syarat keanggotaan forum. Selanjutnya, Komite Kerja akan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyampaikan laporan pekerjaan pada pertemuan forum berikutnya. Pertemuan berikutnya akan kita selenggarakan bisa melalui zoom atau juga offline.

Keenam, menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada MPR RI atas inisiatif Prakarsa penyelenggaraan konferensi dalam rangka pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai forum di antara forum-forum PUIC lainnya.

Ketujuh, para delegasi konferensi ini menyampaikan ucapan selamat kepada Republik Indonesia atas penyelenggaraan dan Presidensi G-20 pada tahun 2022, serta mengharapkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan tugas tersebut.

Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak dengan pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai forum di antara forum-forum PUIC lainnya?

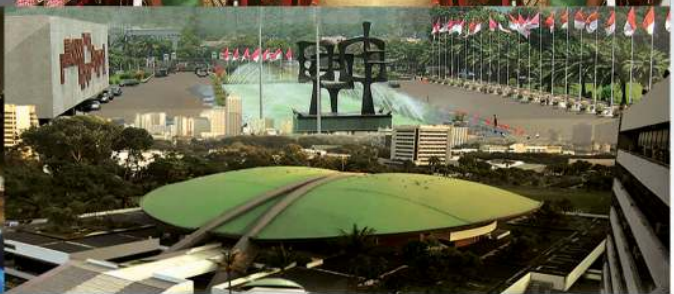
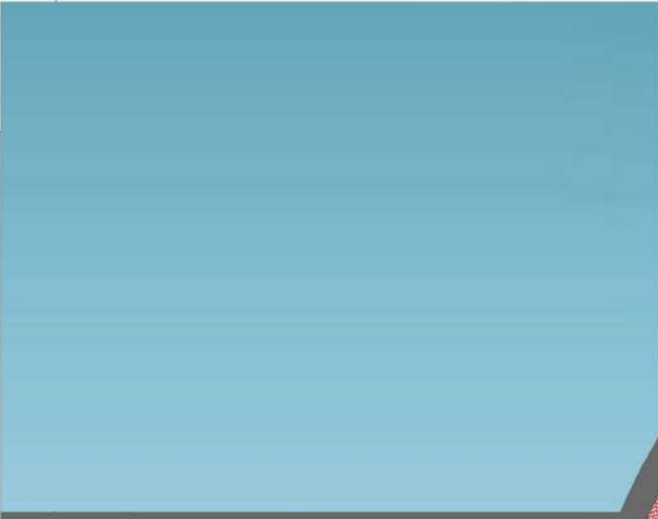
Harapan saya, MPR bisa menghasilkan satu legacy dan menambah harum nama Indonesia, karena Indonesia kembali mengambil peran untuk menggelorakan kembali semangat Bandung. Ini yang ditangkap oleh parlemen-parleemn negara-negara anggota OKI. Kemarin terlihat betul bagaimana mereka sangat antusias. Bahkan, dimasukkan juga Dasasila Bandung. Forum ini berdasar kepada semangat Dasasila Bandung dan juga ketentuan bersama di PBB.

Jadi, tujuan kita tercapai. Alhamdulillah dengan terbentuknya forum dan juga dengan terbawanya spirit Dasasila Bandung, serta disepakatinya untuk tindak lanjut dari forum ini melalui Komite Kerja. Bahkan, Sekjen Parlemen OKI sudah sepakat untuk mempersiapkan satu hari tersendiri bagi forum ini untuk pengembangan forum ini bersama dengan forum-forum lainnya yang ada di parlemen OKI.

Ketika para delegasi menyikapi usulan dari MPR RI, mereka sangat apresiatif dan sangat menghormati serta sangat mendukung. Sekali lagi ini menghadirkan ingatan akan Indonesia yang diterima, dihormati, dan Indonesia yang mempunyai inisiatif yang positif. Mereka juga berharap agar forum ini bisa menyelenggarakan kegiatan dengan baik, karena forum ini bisa menguatkan majelis-majelis, seperti MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, dan sebagainya sehingga mereka bisa juga terlibat di dalam menghadirkan beragam solusi terhadap masalah terkait masalah perempuan, anak, pemuda, Palestina, dan sebagainya.

Harapan kami selanjutnya adalah pembentukan forum yang mendapat dukungan dari pemerintah, Kemenlu, negara-negara sahabat di OKI, dan Sekjen OKI, menjadi awal yang bagus untuk bisa kita lanjutkan, dan bahkan bisa menjadi semacam embrio untuk terbentuknya komitmen dari Pimpinan MPR untuk pembentukan Forum MPR Dunia dalam makna yang seluas-luasnya. □

BSC-DER



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Masih Energik, Tampil di Konferensi *Internasional MPR*



Reza Artamevia

REZA Artamevia, salah seorang artis penyanyi Tanah Air di era 90-an, memiliki sederetan hits lagu-lagu lawas, salah satunya lagu “Pertama.” Rabu (26/10/2022), penyanyi yang memulai kariernya sebagai penyanyi latar grup band Dewa 19 ini tampil beraksi di acara penutupan Konferensi Internasional MPR di Hotel Pullman, Bandung, Rabu (26/10/2022).

“Assalamualaikum, to all delegates, welcome to Bandung to this one of most beautiful city in Indonesia. I hope yo’ll enjoy this momen,” sapa Reza, di hadapan para delegasi peserta konferensi dari 13 negara dan dua organisasi Islam dunia.

Di akhir performance, Reza menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap agar Konferensi Internasional MPR di Kota Bandung itu menjadi sesuatu yang baik untuk Bandung, Indonesia, dan dunia. □

DER



Pengamen Cilik *Terkenal Setelah* Tampil di Istana

MASIH ingat **Farel Prayoga**, bocil atau bocah cilik pelantun lagu 'Ojo Dibandingke' yang beruntung diundang ke Istana Negara untuk bernyanyi di hadapan Presiden RI dan tamu kehormatan lainnya pada rangkaian perayaan HUT ke-17 RI.

Lagu Ojo Dibandingke itu awalnya hanya wara wiri di kanal media sosial seperti *Tiktok*. Tapi, setelah di undang perform di Istana, Farel yang sudah menekuni profesinya sebagai pengamen sejak kelas 2 SD ini tiba-tiba melejit dan sangat viral.

Sekarang bocil ini sudah menjadi artis terkenal. Hidupnya kini berubah 180 derajat. Walaupun demikian, Farel tak akan lupa masa lalunya yang sangat susah. Saking susahya, mau beli tempe saja harus utang di warung. "Bu, beli tempennya, nanti sore saya bayar," itu sedikit kisah Farel tentang perjalanan hidupnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Farel Prayoga



Rieke Diah Pitaloka

Visi Misi Pemilu Harus untuk Rakyat

PADA akhir September lalu, ada pertemuan antara Badan Pengkajian MPR dan Bawaslu. Politisi PDI Perjuangan, **Rieke Diah Pitaloka**, hadir sebagai anggota Badan Pengkajian MPR. Pemeran "Oneng" dalam sinetron "Bajaj Bajuri" itu bicara soal visi dan misi dari para kontestan pemilu untuk rakyat.

"Ini perlu saya tekankan, soalnya pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 adalah agenda bangsa yang sangat berat. Sebab, penyelenggaraannya secara serentak, namun dengan visi dan misi yang sangat beragam dari para kontestan," katanya. Semestinya, tegas "Oneng", eh Rieke, ada visi misi yang sama dan harus dipatuhi, serta dijalankan setiap kontestan Pemilu 2024.

"Visi misi itu tidak sembarang, karena harus mengandung nuansa persatuan, kesatuan, dan semangat untuk membangun bangsa," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai

MASJID Walima Emas di Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai Gorontalo menjadi salah satu destinasi yang digandrungi para wisatawan. Masjid ini terletak di ketinggian yang sangat strategis membuat wisatawan bisa menikmati keindahan Kota Gorontalo dan Teluk Tomini, sama baiknya.

Di Masjid Walima Emas pengunjung bisa mengabadikan kedatangannya dengan latar belakang yang sangat indah. Ada hamparan laut, bukit atau ornamen masjid yang memang terlihat sangat indah dengan warnanya yang kontras.

Masjid Walima Emas bukan hanya menyajikan pemandangan yang indah, tetapi juga ketenangan yang sangat terasa. Terlebih bagi mereka yang hendak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hembusan angin dan ketenangan suasana memudahkan jemaah melakukan peribadatan dengan khusyuk. Apalagi, jika peribadatan itu dilakukan pada malam hari. Salat tahajud atau bermunajat kepada Allah di tempat ini, pasti terasa tenang sekali.

Walima Emas memiliki bentuk dan warna yang sangat unik. Bentuk kubahnya sangat

khas menyerupai kue kolombengi. Sementara warna emasnya membuat masjid ini terlihat sangat kokoh dan anggun, sejak dari kejauhan. Untuk menuju ke sana, pengunjung akan menemui rute yang menanjak disertai pemandangan hijau, laiknya permadani.

Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Walima Emas dilakukan pada tahun 2008, dan baru selesai pada 2012.

Lamanya pembangunan masjid terjadi karena keterbatasan biaya yang dimiliki panitia pembangunan, sehingga proses pembangunan berlangsung secara perlahan-lahan.

Menurut salah satu anggota masyarakat di sana, masjid ini banyak dikunjungi wisatawan. Namun, karena banyak ternak yang berkeliaran dan selalu meninggalkan kotoran, pintu gerbang menuju masjid





kerap di kunci. Tujuannya, agar kebersihan masjid terjaga, dan tidak meninggalkan najis.

Selain Masjid Walima Emas, Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai juga memiliki destinasi lain yang tak kalah memikat. Yaitu Taman Wisata Bubohu. Tempat ini menyimpan berbagai peninggalan adat budaya dari para pendahulu. Di Taman Wisata Bubohu juga terdapat sejarah Ke-rajaaan Gorontalo, dari yang kecil-kecil hingga besar.

Saat memasuki kawasan Taman Wisata Bubohu pengunjung akan disambut dengan kumpulan fosil kayu. Fosil-fosil ini berada tepat di depan pintu masuk desa. Tidak hanya pemandangan indah itu saja. Di dalam kawasan Taman Wisata Bubohu juga terdapat barisan gubuk khas Gorontalo yang berjajar rapi atau yang sebut juga Wambohe.

Untuk memasuki Kawasan tersebut,

wisatawan diharapkan membayar tiket masuk. Anehnya, harga tiket ini tidak dipatok khusus, tetapi dibebaskan sesuai kemampuan dan keikhlasan pengunjung. Kemudian penjaga loket akan menyerahkan biji-bijian untuk dimasukkan ke dalam wadah. Biji-bijian dalam wadah ini akan dihitung pada waktu tertentu untuk mengetahui jumlah pengunjung yang datang.

Tempat ini menyediakan ketenangan dan nuansa adat Gorontalo yang sangat kental. Karena itu, tidak ada salahnya jika kawasan tersebut menjadi salah satu rujukan untuk dikunjungi, agar bisa mengenal provinsi Gorontalo secara lebih mendalam.

Banyak Pemabok

Pendirian Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai sendiri diinisiasi

oleh salah satu putera terbaik Bongo. Yaitu, Yotama Uti Gorontalo XVIII (Yosep Tahir Maruf). Karena jasa-jasanya, Yosep Tahir Maruf diberikan gelar kehormatan Taa Loo Pobahayu Wu'udu. Yang berarti Putera kelahiran Indonesia yang telah menciptakan destinasi wisata religious Bubohu.

Menurut sejarahnya, pendirian Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai, muncul karena keprihatinan Yosep Tahir Maruf terhadap kondisi kampungnya. Saat itu, sebagian besar warga desa berprofesi sebagai nelayan. Kehidupan laut yang berat, membuat masyarakat akrab dengan minuman keras dan mabuk-mabukan.

Untuk meluruskan kebiasaan buruk itulah Yosep Tahir Maruf mengusahakan berdirinya Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai. Secara perlahan-lahan ia membangun Masjid Walima Emas juga Taman Wisata Bubohu. Saat ini, Masjid Walima Emas dan Taman Wisata Bubohu serta Pantai Dulanga menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup dikenal masyarakat. Apalagi, jarak destinasi tersebut dari kota Gorontalo relatif dekat, sekitar 45 menit.

Yang lebih mengasyikkan, jalan menuju Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Batudaa Pantai ini bisa menjadi destinasi tersendiri. Pasalnya, jalur yang dilewati terdiri dari kawasan bukit dan Teluk Tomini. Jalan tersebut berkelak-kelok melintasi tanjakan dan turunan. Bila dinikmati menggunakan sepeda motor tentu bisa menantang adrenalin tersendiri. □

MBO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UN. Kabar duka baru saja menghampiri Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S.Pt. (48). Sabtu (22/10/2022), pukul 05.40 WIB, Ibu Biasmawati, ibunda Yandri Susanto, berpulang ke Rahmatullah untuk selamanya. Duka mendalam sangat dirasakan Yandri, hingga sang ibu dimakamkan di kampung halamannya, Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu terlihat sangat terpukul atas kepergian sang ibu. Berkali-kali dia menyeka air matanya yang berlinang, hingga diciturnya jenazah sang ibu. Yandri memimpin sendiri salat jenazah atas ibunya, baik di Jakarta maupun sesaat sebelum dimakamkan. Yandri juga turun ke liang lahat, mengantarkan sang ibu untuk terakhir kali sebelum menemui Tuhannya, Allah SWT.

Kepergian ibu adalah musibah yang besar bagi Yandri. Maklum, sejak kecil hingga menjabat sebagai pimpinan MPR sekarang, Yandri sangat dekat dengan ibunya. Ia tidak pernah lupa meminta doa restu dari sang ibu. Termasuk ketika dilantik menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI dan juga Wakil Ketua MPR, sang ibu tampak selalu hadir mendampingi.

"Saya adalah orang pertama yang datang bersama orangtua saat dilantik menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI dan juga dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI," kata Yandri menggambar kedekatan dengan

orangtua, khususnya ibu.

Yandri percaya, keberhasilan yang dicapainya saat ini, sebagian merupakan buah dari doa-doa yang dipanjatkan orangtuanya, khususnya sang ibu. Setiap hari ibunya selalu mendoakan hal-hal yang terbaik. Dan, itu membuat jarak langkahnya menuju sukses semakin dekat. Tetapi, seberat apapun sedih yang harus dirasakan, Yandri tak ingin larut dalam duka, saat ini ia sudah beraktivitas normal seperti sedia kala.

Yandri Susanto adalah Pimpinan MPR RI sisa periode 2019-2024. Ia menjadi pimpinan MPR melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), menggantikan Zulkifli Hasan yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan. Pembacaan sumpah janji sebagai pimpinan MPR dilakukan oleh Yandri pada Kamis (30/6/2022), berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor: 62/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPR/MPR Sisa Masa Jabaran 2019-2024.

Pengangkatan Yandri menggantikan Zulkifli Hasan menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional tidak mengagetkan. Karena, sejak lama, ia sudah digadang-gadang sebagai kader PAN yang pilih tanding. Keberhasilannya melenggang di DPR RI sejak pemilu 2009-2014 menjadi salah satu barometernya. Apalagi sejak Fraksi PAN di DPR memberi banyak kepercayaan kepada pria yang

H. Yandri Susanto S.Pt

Sukses Yandri, Antara Bengkulu dan Banten



FOTO-FOTO: STIMEWA

lahir di Palak Siring, Bengkulu, 7 November 1974 ini. Salah satu yang menonjol dari perjalanannya di ranah legislatif itu adalah menjabat Ketua Komisi VIII DPR RI, membidangi masalah Agama, sosial dan kebencanaan.

Revisi UU Haji

Sebagai Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yandri Susanto S.Pt., sangat menguasai persoalan Ibadah Haji. Tak terkecuali pelaksanaan Ibadah haji tahun 2022, atau ibadah haji paska pandemi Covid-19. Menurutnya, ibadah haji tahun 2022 terlaksana dengan sangat baik. Terlebih, bila dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2022, pelayanan yang diberikan Kementerian Agama dan Kesehatan terhadap 100 ribu jemaah haji Indonesia bisa dibilang sangat bagus. Prestasi tersebut harus dipertahankan, termasuk bila tahun depan jumlah jemaah yang diberangkatkan diperkirakan akan bertambah sebanyak 85%. Karena itu, sejak dini segala urusan yang kecil-kecil dan detail perlu dipastikan sedari awal, agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan.

Selain itu, terjadinya kenaikan biaya haji yang sangat tajam,

sekitar Rp1,5 triliun untuk membayar berbagai keperluan, termasuk tenda dan tempat tidur di Arafah dan Mina perlu dibahas ulang. Kenaikan biaya haji ini harus mendapat perhatian. Karena naiknya biaya haji belum diikuti dengan perbaikan pelayanan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Dirjen Haji, termasuk Konsul Haji ataupun Konsul Jendral serta dubes, perlu berkomunikasi dengan pemerintah Saudi. Terutama dengan badan pelaksana haji yang diikuti oleh Gubernur Mekah.

“Perlu ada komunikasi dua arah secara berkesinambungan, tidak dadakan dan bukan hanya menerima keputusan dari Saudi saja. Tapi perlu ada dialog yang saling menguntungkan antara Saudi dan Indonesia sehingga biaya yang sangat tinggi itu bisa dinikmati secara maksimal dari sisi fasilitas dan pelayanan, meskipun upaya untuk menekan besarnya biaya tetap harus diusahakan,” tambah Yandri.

Yandri berharap, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memangkas daftar tunggu keberangkatan jemaah haji. Saat ini, daftar tunggu keberangkatan haji masih terlalu lama, mencapai puluhan tahun. Untuk itu, pemerintah harus melakukan lobi khusus dengan pemerintah Kerajaan Saudi. Sekalipun, pemerintah Saudi sendiri akan membuka tambahan kuota yang lebih banyak, mencapai 5 juta jemaah.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Kita perlu merevisi UU No 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan ibadah Haji. Agar pemerintah memiliki ruang untuk memanfaatkan kuota dadakan yang sesekali muncul. Seperti tahun 2022, terdapat 10.000 kuota jemaah yang tidak jadi diambil, karena keterbatasan peraturan.

Yandri mengakui, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya memangkas daftar tunggu, meski belum memberikan hasil yang signifikan. Tetapi, usaha itu harus tetap dilaksanakan. Termasuk ketika pemerintah Saudi memperluas Masjidil Haram. Serta berencana membuat underground dan meningkat Arafah serta Mina.

“Daftar tunggu kerangkaan ibadah haji adalah problem semua negara, bukan hanya Indonesia. Pemerintah Saudi juga sadar problem tersebut sehingga mereka terus berupaya menambah kapasitas jemaah haji,” ungkap suami Ratu Rahmatu Zakiyah.

Bukan Karbitan

Sebagai politisi, ayah tiga putera yang genap berusia 48 tahun pada 7 November 2022 ini, menempuh perjalanan kariernya mulai dari bawah. Yandri menyelesaikan pendidikannya, mulai dari sekolah dasar

hingga perguruan tinggi di Bengkulu. Kemudian ia terjun ke dunia politik, sebagai kader di Partai Amanat Nasional. Ia aktif di organisasi sayap, Barisan Muda (BM) PAN, sebagai Sekretaris Jendral BM PAN periode 2006-2011. Kemudian menjadi Ketua Umum BM PAN periode 2012-2016. Setelah itu, ia melompat menjadi Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN periode 2010-2015 sesuai amanat Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa. Selain di BM PAN, Yandri juga mengasah dirinya dengan terlibat di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat periode 2008-2011.

Pada pemilu 2009 Yandri ikut berebut kursi di DPR RI Dapil Lampung I. Tetapi, dewi fortuna belum berpihak padanya, ia belum berhasil melenggang ke Senayan. Baru setelah tiga tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2012, Yandri dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan Fauzan Syai'e.

Tahun 2014, Yandri Susanto langsung terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Dapil Banten II. Peruntungannya kembali berulang pada Pemilu 2019, dan mengantarnya menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Yandri yang sempat memimpin





Komisi VIII harus melepas amanat tersebut karena ditunjuk menjadi Pimpinan MPR RI.

“Di MPR ini kita harus mengutamakan politik kebangsaan, jadi tidak perlu ada debat keras seperti di DPR. Tetapi, saya senang, karena ini adalah kepercayaan yang harus saya laksanakan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Ibarat kata orang bijak, jadilah seperti ikan di laut. Yandri telah melewati satu persatu babak perjalanannya hingga duduk sebagai pimpinan MPR tanpa gejolak. Ia tetap bersahaja, seperti biasa. Senyum dan spanya mengalir apa adanya. Jabatannya kini tak membuat Yandri kehilangan jadinya sebagai sosok yang supel, mudah tersenyum, dan dekat dengan semua kalangan.

Pemandangan itu terlihat jelas saat ia menerima delegasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan, juga ketika menerima delegasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, pada hari yang lain. Yandri melayani sesi foto dengan para mahasiswa, hingga sebagian besar rombongan telah meninggalkan ruang pertemuan.

“Hidup hanya sekali dan semua tahapan itu pasti dilalui, maka

jangan hilangkan kesempatan, kemudian fokus dalam hidup, dan yang paling penting adalah beribadah kepada Allah,” pesannya singkat. □

MBO

Biodata

Nama : **H. Yandri Susanto S. Pt.**
 Tempat/Tgl. Lahir : Palak Siring, Bengkulu, 7 November 1974
 Nama Istri : Ratu Rahmatu Zakiyah

Riwayat Pendidikan

Lulus SD Negeri Agung (1987)
 Lulus SMP Negeri Kedurang (1990)
 Lulus SMA Negeri 1 Manna (1993)
 Lulus S-1 Universitas Bengkulu (1998)

Riwayat Organisasi:

Wakil Sekretaris Jenderal DPP BM PAN (2004–2006)
 Sekretaris Jenderal DPP BM PAN (2006–2011)
 Ketua Bidang Pariwisata KNPI (2008–2011)
 Ketua Umum DPP BM PAN (2011–2016)
 Ketua DPP PAN (2015–2020)
 Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (2020–2025)

Riwayat Pekerjaan:

Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI (2004)
 Manager Direktur PT Solusi Plus (2004–2010)
 Direktur Utama PT. Suplai Plus (2010–2012)
 Anggota PAW DPR-RI (2012–2014)
 Anggota DPR-RI (2014–2019)
 Anggota DPR-RI (2019–2024)
 Anggota Komisi II DPR RI (2014–2019)
 Ketua Komisi VIII DPR RI (2019–2022)
 Wakil Ketua MPR RI (2022–sekarang)



Memperkokoh Jati Diri Bangsa

DUNIA kini memasuki masa transisi dengan segumpal transformasi dengan peluang dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pandemi dan disrupsi karena inovasi teknologi menuntut adaptasi manusia pada seperangkat kenormalan baru. Sebuah kenyataan bahwa kehidupan manusia tak lagi sama seperti periode sebelum pandemi. Selain pandemi dan disrupsi, krisis politik global mengubah pola keterhubungan antarnegara dalam satu kawasan dan antara negara di dunia. Budaya populer dalam berbagai bentuk menarik minat generasi Z dan milenial ke dalam pusaran pencarian jati diri sebagai anak bangsa Indonesia. Pada saat bersamaan infiltrasi ideologi tak terhindarkan melalui distorsi informasi yang menyasar sejarah bangsa atau sekadar menebar propaganda karena kepentingan tertentu. Propaganda melalui media digital dioptimalkan sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi baru dalam kehidupan berbangsa. Jika bukan dikotomi karena kepentingan sosial politik maka atribut identitas kelompok yang digunakan untuk mempertebal sekat perbedaan.

Inilah sekelumit tantangan dari dunia yang sedang berproses, dunia yang terus berubah. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi dunia yang molek akibat sentuhan teknologi dengan ragam tawaran yang dapat mengakibatkan lunturnya nilai-nilai kebangsaan? Mengapa memperkokoh jati diri bangsa menjadi solusi untuk menghadapi dimensi transformatif dunia saat ini?

Pulih dan Bangkit: Berorientasi Masa Depan

Indonesia baru saja merayakan 77 tahun kemerdekaan (17/08) lalu dengan tema perayaan: pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini mengandaikan semua sektor telah dan akan dipersiapkan lebih matang agar pembangunan terus berjalan di tengah ragam tantangan global. Berbagai kebijakan strategis adaptif pada sektor-sektor potensial patut dirumuskan dengan efektif dan tepat sasaran agar luput dari resesi ekonomi.

Sebuah kenyataan yang tak dapat ditolak, dua tahun berlalu sejak Maret 2020, pandemi belum mereda. Lebih dari 13 juta manusia terinfeksi. Di tengah berbagai ancaman krisis lanjutan, berupa resesi maupun ketahanan pangan setiap negara terus berupaya bangkit dan pulih. Sektor potensial yang patut diandalkan adalah pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Pengembangan sektor potensial mesti didukung inovasi teknologi, sementara literasi digital masih terbilang rendah. Dampaknya, optimalisasi teknologi bukan lagi untuk mendukung pemulihan dan kebangkitan,

justru menjadi wadah pertarungan kepentingan yang ujungnya mengancam keutuhan bangsa. Inilah paradoks peluang dan tantangan dalam upaya pulih dan bangkit. Orientasi masa depan menjadi prasyarat setiap upaya bertahan dari gempuran krisis karena pandemi dan disrupsi sekaligus beradaptasi dalam laju perubahan zaman.

Terkait orientasi masa depan, William MacAskill, filsuf moral asal Skotlandia, pengajar di Oxford, pencetus gerakan altruisme efektif, menulisnya dalam *What We Owe The Future* (2022). MacAskill menyebut *longtermisme* sebagai upaya meningkatkan masa depan manusia (kemanusiaan) sebagai prioritas moral utama saat ini. Manusia perlu menemukan titik pijak untuk berbenah, berubah, menata kembali dunia karena pengaruh teknologi melalui kecerdasan buatan, perubahan iklim, pandemi, dan perang nuklir. Pengaruh teknologi menciptakan ragam ancaman terhadap keamanan hidup manusia. Berhadapan dengan situasi ini, perspektif longtermist dirumuskan agar diimplementasikan pada setiap bidang kehidupan dengan keyakinan bahwa manusia memiliki sumber daya (*resources*) dan ketahanan (*resilience*) untuk menyudahi berbagai ancaman tersebut dan memastikan keberlangsungan peradaban manusia.

Bangsa Indonesia lahir dari keragaman identitas suku bangsa, bahasa, agama, bahasa dan adat istiadat. Kekuatan utama bangsa ini adalah kesatuan dalam keberagaman. Pancasila sebagai ideologi, filosofi sekaligus norma dasar telah menjadi perekat lebih dari setengah abad perjalanan bangsa dengan berlandaskan pada konstitusi UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka untuk menyikapi dunia yang terus berubah, memperdalam pemahaman terhadap konsensus kebangsaan menjadi solusi sekaligus refleksi kritis untuk memperkokoh jati diri bangsa. Dari sini setiap peristiwa dapat dimaknai seturut persepsi dan pola pikir kemanusiaan Indonesia.

Senada dengan itu, menurut MacAskill, untuk meramu masa depan dan mengubah dunia, manusia harus mengevaluasi setiap perbuatan dengan mempertimbangkan urgensi tindakan yang berefek jangka panjang dan memenuhi kebutuhan nyata. Sebab perjumpaan teknologi, ilmu pengetahuan dan aktivitas politik memiliki potensi untuk menentukan masa depan manusia. Hal ini berarti setiap pilar kebangsaan mesti menjwai setiap tindakan individu, komunitas masyarakat, lembaga negara bahkan para pimpinan lembaga dengan persepsi perilaku yang berorientasi pada masa depan bangsa. Menyikapi dunia yang berubah bukan dengan membiarkan diri jatuh dalam jebakan-jebakan primordial modern yang cenderung destruktif

Oleh:
Dr. Lestari Moerdijat, S.S.,M.M.
Wakil Ketua MPR RI



tetapi sebaliknya mengubah setiap tawaran melalui pemikiran kritis konstruktif berpijak pada nilai luhur kebangsaan dengan satu visi, untuk generasi masa depan bangsa.

Seruan pulih dan bangkit bukan terbatas pada dinamika kebijakan publik, atau jargon perayaan sesaat. Pulih dan bangkit mesti menjadi gerakan kultural dan moral disertai kesadaran bahwa masa depan Indonesia menjadi tanggung jawab semua warga negara. Pada puncaknya, pulih dan bangkit merupakan gerak bersama menciptakan masa depan gemilang. Cita-cita ini hanya mungkin jika seluruh elemen mampu mengoptimalkan peluang perubahan dan mampu berhadapan dengan tantangan pada jati diri bangsa.

Merawat Kebhinnekaan, Menjaga Indonesia

Menciptakan masa depan bangsa tak mungkin tanpa fondasi yang kokoh. Penderitaan manusia yang disebabkan pandemi dan disrupsi mestinya memiliki nilai edukatif. Penderitaan akibat krisis global memiliki dimensi kontemplatif yang patut ditelaah secara sadar, melalui perjalanan berpikir logis-kritis untuk menyimpulkan solusi inovatif dalam kompleksitas masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, pertahanan keamanan, dan sektor lain yang terdampak. Fakta penderitaan global menjadi cermin untuk meletakkan sebuah komitmen bahwa merawat kebhinekaan, menjaga Indonesia adalah keniscayaan. Memperkokoh jati diri bangsa mutlak dilakukan dengan penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan visi para pendiri bangsa (*founding parent's vision*).

Pendidikan menjadi sektor potensial untuk memperkokoh jati diri bangsa. Giroux (2017) dalam *Why Universities Must Defend Democracy* menekankan sekaligus mengingatkan peran universitas sebagai ruang aman untuk terus mempromosikan nilai kewarganegaraan, imajinasi sosial, cita-cita demokrasi, dan nilai sipil yang berpartisipasi secara kritis. Giroux, menekankan pengembangan pendidikan tinggi sebagai ruang nyaman untuk berpikir walau berlawanan dengan pendapat umum, celah untuk menggali dan mempertanyakan kebijakan publik, melihat dan membayangkan dunia dari sudut pandang berbeda, merefleksikan diri sendiri dan yang paling penting membarui pemahaman mendalam tentang arti "memikul tanggung jawab".

Tanggung jawab setiap anak bangsa saat ini adalah menjadi yang pertama dalam menjaga identitas Indonesia, memperkokoh jati diri bangsa dari gempuran infiltrasi ideologi. Edukasi menjadi instrumen untuk menggali kedalaman diri, memahami arti menjadi Indonesia dan menyadari bahwa Indonesia adalah entitas satu kesatuan dalam

seperangkat perbedaan. Dalam geliat menggali, memahami dan menyadari identitas dimaksud mengkritik diri sendiri diperlukan. Berbagai pertanyaan dapat diajukan untuk menjangkau kedalaman dan keluasan pemahaman terkait identitas yang melekat.

Hal tersebut menjadi proses yang melekat pada setiap individu sebab ruang pertama otokritik datang dari lembaga akademik. Geliat epistemik berwujud kritik selalu memiliki kebaruan pemikiran berbasis kebenaran ilmiah maupun refleksi. Kritik menjadi ruang untuk memberi arti pada perjumpaan antara ide dan realitas. Dengan demikian transformasi dunia dengan tantangan maupun ancamannya tidak serta merta melunturkan jati diri bangsa Indonesia, justru menjadi wadah untuk terus merawat kebhinekaan, beradaptasi, bertumbuh, memperdalam kapasitas untuk menghadirkan ragam inovasi untuk kemajuan bangsa dan wujud menjaga Indonesia.

Refleksi

Perubahan dunia tak hanya menyajikan tantangan eksternal namun menciptakan kekisruhan internal bagi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, saat ini patut diakui bahwa atribut berbangsa dan bernegara terkubur dalam selubung sektarianisme, polarisasi sosial dan ego kelompok. Alasan yang mendasari fakta sosial ini yakni kontestasi politik yang tak disudahi dengan rekonsiliasi.

Mari kita dalam sebuah seruan bahwa bangsa merdeka adalah mereka yang mengoptimalkan setiap sumber daya untuk kebaikan semua (*common good*). Masyarakat beradab adalah mereka yang senantiasa mengisi setiap ruang dengan dinamika belajar untuk bertumbuh sebagai bangsa yang adil dan sejahtera. Merdeka merupakan langkah pertama untuk meramu dan menapaki masa depan sejak hari ini. Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara secara berkelanjutan mesti menjadi urgensi dari setiap dinamika sosial dan politik. Dengan rendah hati mengakui keragaman dan memperkokoh persatuan tanpa reduksi atas identitas kebangsaan merupakan cara untuk memperkokoh jati diri bangsa.

Sebuah harapan bahwa seruan mempererat kesatuan bangsa tidak hanya sebatas halusinasi yang terkontrol, mudah rapuh dan defensif atas kemungkinan perubahan. Setiap anak bangsa memiliki kapasitas untuk menjaga Indonesia, memeluk setiap buku perbedaannya dengan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab di balik setiap visi dan kerja untuk masa depan bangsa, kemanusiaan Indonesia harus menjadi yang utama. (RLM) . □

Bambang Soesatyo:

Jatuh Bangun Menuju 60 Tahun

Menjadi politisi handal, pengusaha sukses, serta menjabat ketua umum berbagai organisasi diraih oleh Bambang Soesatyo dengan tidak mudah. Untuk menjadi wakil rakyat di Senayan, ia harus sampai lima kali ikut pemilu. Semua kisah hidupnya itu dirangkum dalam buku yang beberapa waktu lalu dirilis. Banyak kenangan yang tergambar di buku yang ber-cover dirinya. Salah satu kenangan itu adalah saat mobil yang ditunggangi mengalami kecelakaan.

MENITI perjalanan hidup hingga seperti saat ini, menjadi Ketua MPR dan puluhan jabatan ketua umum di berbagai organisasi, diraihnya dengan tidak mudah. Bambang Soesatyo, sosok yang dimaksud, mengenang semua kisah yang dialami politisi Partai Golkar itu dalam sebuah buku yang berjudul: *60 Tahun Meniti Buih Di Antara Karang*.

Buku itu tidak hanya menceritakan dirinya dalam berbagai aktivitas — mulai sebagai politisi hingga pengusaha — namun juga menunjukkan bahwa Anak Jakarta itu juga banyak teman dan kawan.

Di Bagian 5 buku itu sederet orang-orang penting, seperti Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua BIN, KASAD, serta para ketua umum partai politik dan organisasi kepemudaan, bicara tentang pria yang akrab disapa Bamsoet itu. Dari berbagai komentar mereka tentang Bamsoet cukup menggambarkan bahwa mereka memang dekat dengan politisi kawaakan Partai Golkar ini.

Buku setebal 239 halaman itu terbagi dalam 5 Bagian. Bagian 1 – 2, memaparkan kisah dirinya sebagai politisi Partai Golkar dan kiprahnya menjadi wakil rakyat. Bagian 3 menunjukkan dirinya aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, olahraga, dan hobi. Bagian 4 point-point dirinya mendapat berbagai penghargaan dan tanda kehormatan. Serta Bagian 5 pendapat para pejabat negara, kepala BUMN, dan pengusaha tentang dirinya.

Di halaman 19, mengungkap pintu masuk atau awal mula menjadi politisi. Di dalam ini ia menceritakan bahwa untuk duduk di kursi DPR bukanlah perkara mudah. Alumni Perguruan Tinggi Jayabaya itu sampai harus jatuh bangun, sampai lima kali ikut pemilu. Baru pada Pemilu 2009, ia terpilih. Awal-awal ikut pemilu, disebut oleh Bamsoet sebagai sarana untuk uji coba saja, sebab pada pemilu pertama yang diikutinya itu saingannya orang-orang kuat, seperti Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Harmoko. Tak hanya macan-macan Golkar yang dihadapi, nomer urut sebagai caleg juga tidak menguntungkan, yakni No.18. "Tidak ada salahnya saya mencoba," ujarnya dalam buku itu.

Bamsoet mengaku, dia tidak akan menjadi politisi partai berlambang pohon beringin bila tidak bergabung dengan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), salah satu underbouw Golkar.

Saat duduk sebagai wakil rakyat, Bamsoet bukan anggota DPR kebanyakan. Entah karena pengalaman organisasinya yang lihai membuat kecakapan berorganisasi dirinya mendapat tempat. Ia menduduki posisi yang strategis, misalnya Ketua Komisi I, Ketua Komisi III, dan Ketua Fraksi Partai Golkar, hingga menjadi Ketua DPR. Dalam masa-masa itu dia juga terlibat dalam berbagai pansus.

Kesibukan sebagai politisi tidak membuat dirinya kehabisan waktu untuk aktif dalam berbagai macam organisasi. Ada puluhan organisasi yang menempatkan Bamsoet pada posisi ketua umum atau jabatan-

jabatan strategis lainnya. Salah satunya aktif dan sering hadir dalam kegiatan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Di halaman 91, dia bercerita tentang kedudukannya sebagai Ketua Umum IMI periode 2021-2024. Di saat-saat hari libur, terutama Sabtu dan Minggu, Bamsoet kerap hadir di Sirkuit Sentul, Bogor, atau di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan kegiatan otomotif.

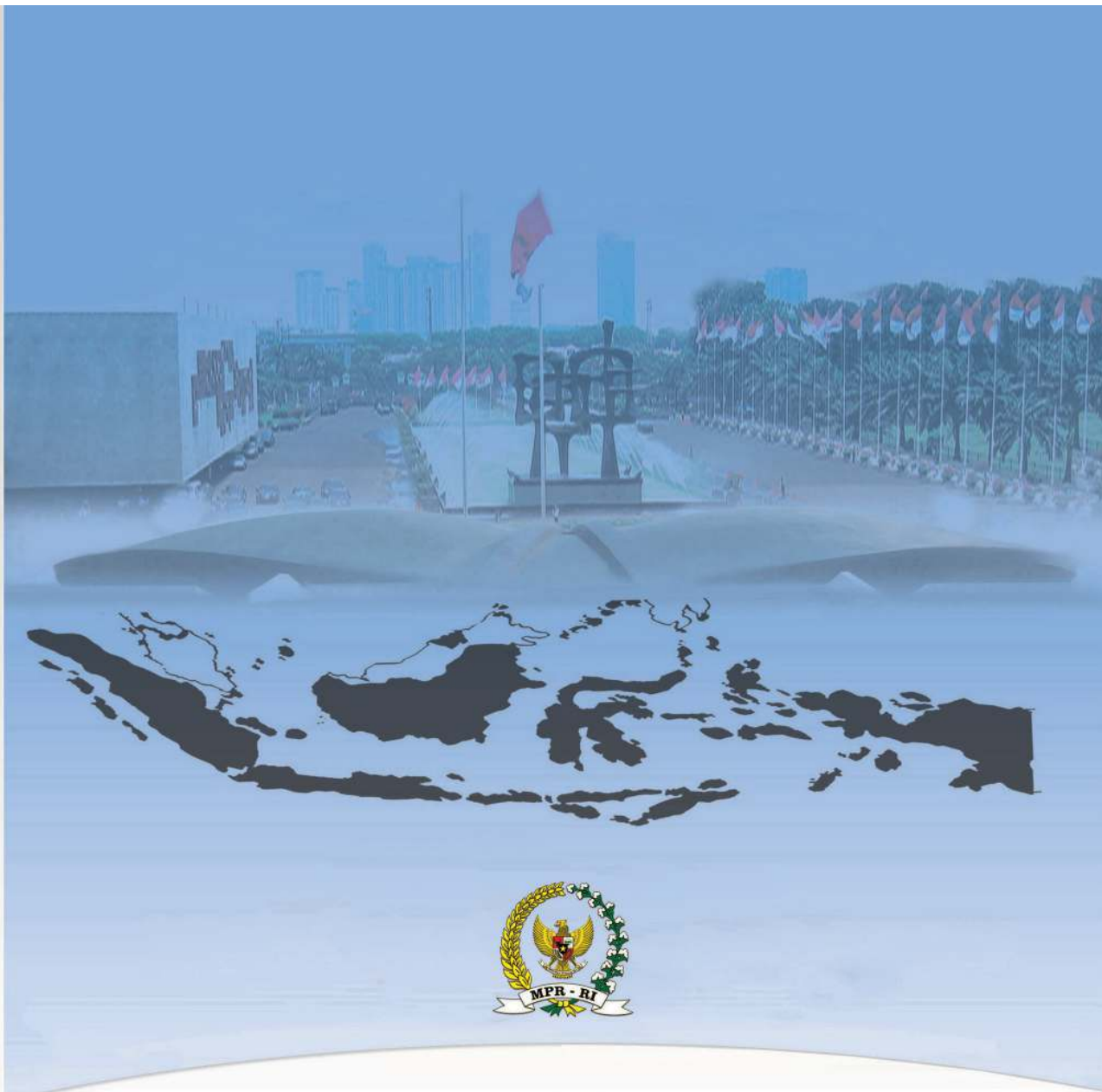
Aktif dalam dunia otomotif yang dilakukan rupanya menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Buktinya, dalam sambutan, halaman 8, Joko Widodo mengatakan: "Saya mengapresiasi kontribusi Pak Bambang dalam berbagai kegiatan sosial dan hobi. Yang saya tahu, beliau aktif dalam dunia otomotif dan saat ini menjadi Ketua Umum IMI. Beliau memberikan dukungan besar dalam penyelenggaraan balap Moto-GP

2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat."

Dari sekian kisah hidup pastinya banyak yang dikenang, sebab semuanya manis, kalau pahit akan menjadi pelecut untuk bangkit. Satu di antara kisah hidup yang tak terlupakan itu adalah saat mobil yang ditunggangi *salto* dan risek. Di halaman 159 diceritakan, menjelang pembukaan dan mengikuti *Kejurnas Sprint Rally Slalom dan Drifting 2021* di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, 27 November 2021, dia bersama dengan pembalap Sean Gelael mengalami kecelakaan saat menguji lintasan dengan mobil Citroen C3 R5. Kendaraan tersebut sempat terbang dan salto tiga kali hingga ringsek dan hancur di beberapa bagian. "*Allhamdulillah* saya serta Sean selamat tanpa mengalami luka," ujarnya dalam buku itu. □

AWG





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI